

**ANALISIS PERKEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY*  
DALAM PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA  
PASCA PENERAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
(SDGS)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Akbar Syahputra  
NPM : 2005180041  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

### MEMUTUSKAN

Nama : AKBAR SYAHPUTRA  
NPM : 2005180041  
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY*  
DALAM PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI  
INDONESIA PASCA PENERAPAN *SUSTAINABLE*  
*DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

### Tim Penguji

Penguji I



Ira. Hj. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

Penguji II



(HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si)

Pembimbing



(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua



Sekretaris

c. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA) (Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AKBAR SYAHPUTRA

N.P.M : 2005180041

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat Rumah : DESA PEMATANG PELINTAHAN DUSUN IV KEC. SEI RAMPAH

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERKEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY*  
DALAM PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA  
PASCA PENERAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2024

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Dekan


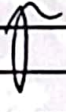
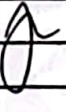
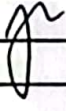
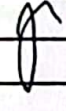
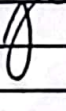
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.

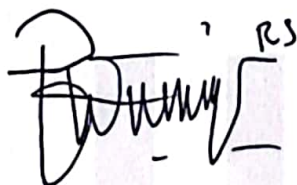
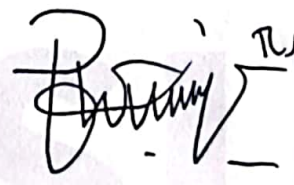
**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Lengkap : AKBAR SYAHPUTRA  
 N.P.M : 2005180041  
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
 Alamat Rumah : DESA PEMATANG PELINTAHAN DUSUN IV KEC. SEI RAMPAH  
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERKEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY* DALAM PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA PASCA PENERAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
06/08/2024	Bab 4 : Membuat gambaran umum, geografis dan Demografis di Indonesia .		
14/08/2024	Bab 4 : Perbaiki data demografi dan Perambahkan data penduduk dan tenaga kerja .		
22/08/2024	Bab 4 : Perbaiki data demografi dan Perambahkan data indikator ekonomi dan sosial .		
29/08/2024	Bab 4 : Perbaiki data rumusan masalah tentang Produktifitas Pertanian, industri dan jasa		
26/08/2024	Bab 4 : Regresi data melalui excel dan jabarkan hasilnya .		
28/08/2024	acc skripsi / sidang tugas akhir .		

Medan, 29 Agustus 2024  
 Diketahui /Disetujui  
 Ketua Program Studi  
 Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si . Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

**Nama Lengkap** : AKBAR SYAHPUTRA

**N.P.M** : 2005180041

**Program Studi** : EKONOMI PEMBANGUNAN

**Alamat** : DESA PEMATANG PELINTAHAN DUSUN IV KEC.  
SEI RAMPAH

**Judul Tugas Akhir** : ANALISIS PERKEMBANGAN KONSEP *GREEN*

*ECONOMY* DALAM PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA  
DI INDONESIA PASCA PENERAPAN *SUSTAINABLE*  
*DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri., kecuali pad bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**

**AKBAR SYAHPUTRA**

## ABSTRAK

### ANALISIS PERKEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY* DALAM PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA PASCA PENERAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)

Akbar Syahputra

Program Studi Ekonomi Pembangunan

[Akbarsyahputra513@gmail.com](mailto:Akbarsyahputra513@gmail.com)

Tujuan penelitian ini adalah Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang intensitas emisi, intensitas energi final, pendapatan nasional bruto perkapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sector industri, produktivitas tenaga kerja sektor jasa (selama 5 – 10 Tahun), dan Melakukan estimasi tentang pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, SDGs, produktivitas, dan regulasi pemerintah terhadap *green economy* di Indonesia (selama 5 - 10 tahun). Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yaitu kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan produktivitas tenaga kerja indonesia menunjukkan tren yang bervariasi berdasarkan jumlah produktivitas dan tenaga kerja selama periode (selama 5 – 10 Tahun). Secara umum, sebagian besar produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan. Meskipun perkembangan mengalami stagnasi pada tahun-tahun tertentu. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja itu sendiri antara lain Jumlah Tenaga Kerja, Produk Domestik Bruto Perkapita, Konsumsi Energi. Hasil estimasi model Ekonometrika terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja adalah positif dan sesuai dengan hipotesa penelitian dimana variabel Jumlah Tenaga Kerja, Produk Domestik Bruto Perkapita, Konsumsi Energi berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di indonesia.

**Kata Kunci :** Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, Produk Domestik Bruto Perkapita, Konsumsi Energi

## ***ABSTRACT***

### ***ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY CONCEPT IN LABOR PRODUCTIVITY IN INDONESIA AFTER THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)***

**Akbar Syahputra**

***Development Economics Study Program***

**[akbarsyahputra513@gmail.com](mailto:akbarsyahputra513@gmail.com)**

*The purpose of this study is to conduct a descriptive economic analysis of emission intensity, final energy intensity, gross national income per capita, agricultural productivity, industrial sector labor productivity, service sector labor productivity (for 5-10 years), and to estimate the influence of variables Economic Growth, SDGs, productivity, and government regulations on the green economy in Indonesia (for 5-10 years). The research method used is a mixed method, namely descriptive qualitative and quantitative. The results of this study show that the development of Indonesian labor productivity shows a varying trend based on the amount of productivity and workforce during the period (for 5-10 years). In general, most labor productivity has increased. Although development has stagnated in certain years. There are several factors that influence labor productivity itself, including the Number of Workers, Gross Domestic Product Per Capita, Energy Consumption. The results of the Econometric model estimation of the factors affecting Labor Productivity are positive and in accordance with the research hypothesis where the variables of the Number of Labor, Gross Domestic Product Per Capita, Energy Consumption have a significant effect on Labor Productivity in Indonesia.*

***Keywords:*** *Labor Productivity, Number of Labor, Gross Domestic Product Per Capita, Energy Consumption*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum, Wr.Wb*

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Perkembangan Konsep *Green Economy* Dalam Produktivitas Tenaga Kerja Di Indonesia Pasca Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGS)**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki, dan ilmu kepada saya dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terima kasih untuk yang tercinta Bapak (Alm) dan Mama yang telah memberikan doa, rasa cinta, kasih sayang, dan dukungan yang luar biasa serta mendidik dan mendukung saya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas



Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  7. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  8. Ibu Dra. Hj. Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  9. Bapak dan Ibu Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
  10. Bapak dan Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam hal akademik.
  11. Kepada keluarga tercinta saya yang selalu memberi semangat bahagia kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
  12. Kepada Novi Anggriani, S.E terima kasih banyak yang telah mensupport saya dalam pembuatan tugas akhir ini dari awal hingga selesai.
  13. Kepada sahabat saya Rafly Anggoro, S.Tr yang jauh disana
- Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi

semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih , Wassamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2024

Penulis

Akbar Syahputra

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	17
1.3    Batasan Masalah.....	18
1.4    Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian .....	18
1.4.1    Rumusan Masalah .....	18
1.4.2    Tujuan Penelitian.....	18
1.5    Manfaat Penelitian.....	19
1.5.1    Manfaat Akademik .....	19
1.5.2    Non Akademik .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
2.1    Landasan Teori .....	20
2.1.1    Pembangunan Ekonomi .....	20
2.1.2    Millenium Development Goals (MDGs) ke Sustainable Development Goals (SDGs) .....	27
2.1.3    Produktivitas .....	31
2.1.6 Green Ekonomi .....	49
2.1.7    Regulasi Pemerintah.....	60
2.2    Penelitian Terdahulu .....	63
2.3    Kerangka Penelitian .....	65
2.3.7    Tahap Penelitian .....	65
2.3.8    Kerangka Analisis Penelitian .....	65
2.3.9    Kerangka Konseptual Model Estimasi.....	65
2.4    Hipotesis .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>



3.1	Pendekatan Penelitian.....	67
3.2	Definisi Operasional.....	67
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	68
3.3.1	Tempat Penelitian.....	68
3.3.2	Waktu Penelitian.....	68
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	68
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.6	Model Estimasi.....	69
3.7	Metode Estimasi.....	70
3.8	Teknik Analisis Data.....	71
3.8.1	Metode Analisis Ekonomi Deskriptif.....	71
3.8.2	Analisis Model Ekonometrika.....	71
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>78</b>
4.1	Gambaran Umum Indonesia.....	78
4.2	Perkembangan Dari Indikator <i>Green Economy</i> Di Indonesia.....	113
4.3	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	124
4.4	Pembahasan Hasil Model Regresi.....	135
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	135
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>138</b>
5.1	Kesimpulan.....	138
5.2	Saran.....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>140</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	63
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	68
Tabel 4.1 Ketenagakerjaan Indonesia .....	81
Tabel 4.2 Hasil Olahan Regresi Linear Berganda.....	124
Tabel 4.3 Hasil Regresi Multikolinieritas .....	125
Tabel 4.4 Hasil Regresi Setelah Menghapus Variabel LU .....	125
Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi .....	126
Tabel 4.6 Statistika Deskriptif.....	127
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas .....	133
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas .....	134
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi .....	134

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Capaian MDGs Indonesia tahun 2008 .....	2
Gambar 1.2 Skor Pencapaian SDGs Negara Asia Tenggara (2022).....	4
Gambar 1.3 10 Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca .....	6
Gambar 1.4 Pilar <i>Green Economy</i> .....	10
Gambar 1.5 Tren Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Indonesia (2018-2023) .....	14
Gambar 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kumulatif (2013-2023).....	15
Gambar 1.7 Konsumsi Energi Terbarukan di Indonesia Tahun 2013-2022 .....	16
Gambar 2.1 <i>Milenium Development Goals</i> ( MDGS ) .....	28
Gambar 2.2 <i>Sustainable Development Goals</i> ( MDGS ).....	29
Gambar 2.3 Keterkaitan Pembangunan Rendah Karbon dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).....	52
Gambar 2.4 Kurva Lingkungan Kuznets .....	58
Gambar 2.5 Kerangka Analisis Penelitian .....	65
Gambar 2.6 Bagan Kerangka Model Estimasi.....	65
Gambar 3.1 Uji t-hitung .....	73
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2019-2023.....	79
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1962-1966 .....	83
Gambar 4.3 Tingkat inflasi Indonesia Tahun 1962-1966.....	84
Gambar 4.4 PDB Perkapita Tahun 1962-1966.....	86
Gambar 4.5 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1998-2004.....	88
Gambar 4.6 Tingkat inflasi Indonesia Tahun 1998-2004.....	90
Gambar 4.7 PDB Perkapita Tahun 1998-2004.....	92
Gambar 4.8 Gini Ratio Tahun 1998-2004.....	93
Gambar 4.9 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004-2014.....	95
Gambar 4.10 Tingkat inflasi Tahun 2004-2014 .....	96
Gambar 4.11 PDB Perkapita Tahun 2004-2014.....	98
Gambar 4.12 Gini Ratio Tahun 2004-2014.....	99



Gambar 4.13 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2023.....	101
Gambar 4.14 Tingkat inflasi 2014-2023 .....	102
Gambar 4.15 PDB Perkapita Tahun 2004-2014.....	104
Gambar 4.16 Gini Ratio Tahun 2004-2014.....	105
Gambar 4.17 Jumlah Penduduk Miskin 1998-2004.....	107
Gambar 4.18 IPM Indonesia Tahun 2010-2014.....	109
Gambar 4.19 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010-2014.....	110
Gambar 4.20 IPM Indonesia 2015-2023 .....	111
Gambar 4.21 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010-2014.....	112
Gambar 4.22 Intensitas Emisi Tahun 2014-2023 .....	114
Gambar 4.23 Intesitas Energi Final Tahun 2014 – 2023 .....	116
Gambar 4.24 Pendapatan Nasional Bruto Perkapita Tahun 2014 – 2023 .....	118
Gambar 4.25 Produktivitas Pertanian Tahun 2019 – 2023.....	119
Gambar 4.26 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri 2019 – 2023 .....	121
Gambar 4.27 Produktivitas Tenaga Kerja Jasa 2014 – 2023 .....	122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada September 2000, dalam KTT Millennium PBB di New York, 189 negara, telah mendeklarasikan *Millennium Development Goals (MDG)* atau Tujuan Pembangunan Millenium, yang berisi delapan tujuan yang ingin dicapai pada 2015 untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan global. Sejak disepakatinya pada bulan September 2000, *MDGs* telah menjadi suatu paradigma pembangunan hampir seluruh negara-negara di dunia. Walaupun tujuan dan target *MDGs* tidak mengikat secara hukum, namun banyak negara-negara tetap memantau pencapaiannya melalui beberapa indikator pencapaian di negaranya masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat global terhadap pelaksanaan *MDGs*. Di Indonesia, pelaksanaan *MDGs* telah memberikan perubahan yang positif. Walaupun masih ada beberapa target *MDGs* yang masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya, tetapi sudah banyak target yang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan bahkan telah tercapai.

Selain itu, angka kejadian tuberkulosis di Indonesia sudah berhasil mencapai target *MDGs* yaitu dari 343 pada tahun 1990 menjadi 189 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2011 (Bappenas, 2012). Sebuah laporan satuan tugas PBB, yang mempersiapkan konferensi PBB mengenai pembangunan berkelanjutan 2012 (yang juga dikenal dengan Rio+20), memuji kemajuan pesat dalam pencapaian *MDGs*. Namun demikian laporan tersebut masih tetap menyoroti kendala dan tantangan yang belum terselesaikan. Dalam kerangka *MDGs*, lingkungan hanya disebutkan di bawah satu tujuan saja yakni tujuan ke-7, Memastikan Kelestarian

Lingkungan Hidup. Sebaiknya agenda pembangunan selanjutnya dapat memperkuat peran sentral faktor lingkungan dan memperlakukan faktor lingkungan sebagai dasar bagi semua hasil pembangunan. *MDGs* hanya fokus pada hasil yang seharusnya dicapai oleh negara berkembang, seperti memerangi kemiskinan dan kelaparan serta membatasi peran negara maju untuk memberikan bantuan pembangunan dan pendampingan teknis. Berikut data capaian *MDGs* Indonesia:

INDIKATOR		1990	SAAT INI	TARGET	STATUS	
<b>TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN</b>						
<b>Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan Kurang dari US\$ 1 perhari</b>						
1	Kemiskinan (1\$ per-hari)	20,6%	7,5%	10%	Telah tercapai	●
1.1a	Kemiskinan (Nasional)	15,1 %	15,4%	7,5%	Perlu kerja keras	▼
1.1b	Kemiskinan (2\$ per-hari)		49,0%		Tinggi	
1.2	Indeks kedalaman kemiskinan	2,7%	2,77%		Stagnan	
1.2a	Indeks keparahan kemiskinan		0,76%		Stagnan	
1.3	Proporsi konsumsi penduduk termiskin	9,3%	9,7%		Stagnan	
<b>Target 1B: Meneydiakan seutuhnya Pekerjaan yang produktif dan layak, terutama untuk perempuan dan kaum muda</b>						
1.4	Pertumbuhan PDB per proporsi jumlah pekerja		4,3%			
1.5	Rasio pekerja terhadap populasi		67,3%			
1.6	Proporsi pekerja yang hidup dengan kurang dari \$1 per-hari		8,2%			
1.7	Proporsi Pekerja yang memiliki rekening pribadi dan anggota keluarga bekerja terhadap jumlah pekerja total		62%		Perlu kerja keras	
<b>Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk yang Menderita Kelaparan</b>						
1.8	Malnutrisi Anak	35,5%	28,7%	18%	Perlu kerja keras	
1.9	Kecukupan konsumsi kalori	9%	6%	5%	Sesuai Target	▼

**Gambar 1.1 Capaian MDGs Indonesia tahun 2008**

Sumber: [www.undp.org](http://www.undp.org), 2008

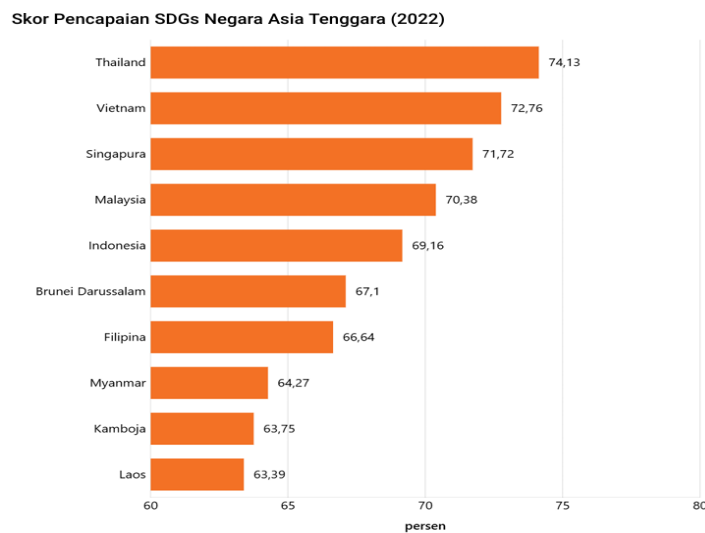
Setelah melihat perubahan besar karena penerapan *MDGs* 2008, negaranegara telah memikirkan dan merancang suatu agenda pembangunan baru yang harus disiapkan untuk menggantikan dan meneruskan *MDGs*. Banyak pihak yang berpendapat bahwa agenda pembangunan yang menetapkan keberlanjutan dan



kesetaraan harus lebih diutamakan untuk menjadi agenda pembangunan selanjutnya. Suatu agenda pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

*Sustainable Development Goals* selanjutnya disebut (*SDGs*) menjadi suatu hal yang paling sering dibicarakan untuk dijadikan agenda pembangunan selanjutnya. Agar *SDGs* menjadi suatu agenda mampu mencakup semua kalangan, banyak pertemuan yang telah dilakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi dari semua kalangan dalam menyusunnya. Pada tanggal 31 Juli 2012, Sekretaris Jendral PBB memilih Presiden Bambang Yudhoyono sebagai *co-chair High-Level Panel of Eminent Persons* (HLPEP) bersama David Cameron (PM Inggris) dan Ellen Johnson Sirleaf (Presiden Liberia). HLPEP ini merupakan suatu forum yang diharapkan dapat menjadi suatu kanal konsultatif yang diusahakan untuk menjadi kanal yang lebih terbuka, inklusif, dan melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan masukan terkait agenda pembangunan pasca-2015. Inti dari agenda pembangunan yang disusun oleh forum ini adalah mengakhiri kemiskinan ekstrim melalui pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Menindaklanjuti usulan-usulan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berbagai macam indikator pemantaunya, maka publikasi ini diharapkan mampu menjadi kajian awal untuk memetakan indikator, target dan tujuan *SDGs* yang telah diusulkan dan mengetahui ketersediaan indikator-indikator tersebut di Indonesia. Selain itu, publikasi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terkait indikator-indikator pendekatan yang digunakan untuk memantau tujuan pembangunan berkelanjutan.

(SDGs) yang melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 target yang dijadikan tuntutan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan di harapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, social dan ekonomi ([www.undp.org](http://www.undp.org))



**Gambar 1.2 Skor Pencapaian SDGs Negara Asia Tenggara (2022)**

Sumber: - Sustainable Development Report [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)

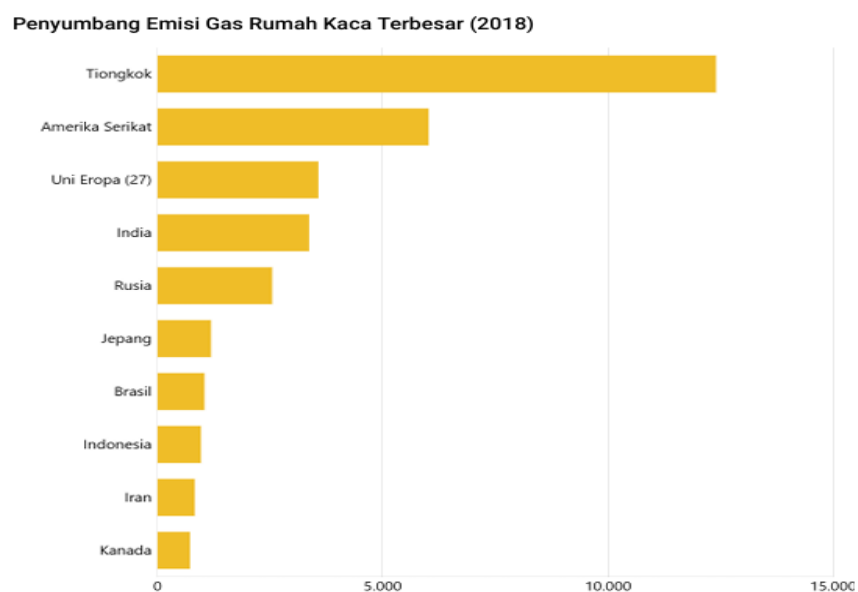
Sejak tahun *Sustainable 2015 Indonesia Development* telah Goals mengadopsi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau (SDGs). SDGs adalah agenda bersama negara-negara anggota PBB untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Secara umum SDGs memiliki 169 target yang terangkum dalam 17 tujuan besar, yang semuanya diharapkan bisa tercapai pada 2030. Menurut *Sustainable Development Report 2022*, saat ini Indonesia sudah berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian itu meningkat dibanding tahun 2015 yang skornya masih 65,03%. Namun, sampai 2022 Indonesia masih mendapat label

'merah' atau dinilai memiliki tantangan besar dalam penanganan masalah kelaparan, kesehatan, keberlanjutan kota, pelestarian ekosistem laut dan daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan, serta kemitraan global. Pada 2022 pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5 seperti terlihat pada grafik. Terkait kondisi ini, pada September 2022 Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk mendorong kinerja pencapaian SDGs. "Dengan telah ditetapkannya Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah," kata Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam siaran persnya, Senin (26/9/2022).

Agenda 2030 terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) atau tujuan global yang akan menjadi tuntutan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan, yang dimulai dengan pernyataan bersejarah untuk mengakhiri kemiskinan di semua tempat secara permanen. Dalam tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan ([www.undp.org](http://www.undp.org)).

Saat ini, Uni Eropa adalah komunitas regional yang beranggotakan 28 negara (Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Itali, Latvia, Lithuania,

Luxemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia dan Inggris). Upaya-upaya Uni Eropa dalam membatasi emisi gas rumah kaca negara-negara anggotanya berasal dari pertimbangan yang melibatkan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Kebijakan ini seperti penentuan alokasi emisi tahunan bagi negara-negara anggota, laporan mengenai gas rumah kaca per tahun negara-negara anggota, dan menerapkan nilai potensial pemanasan global bagi negara-negara anggota.



**Gambar Grafik 1.3 10 Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca**

Sumber: - *World Resource Institute (WRI)* Indonesia [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)

*World Research Institute (WRI)* mencatat, lebih dari setengah emisi gas rumah kaca global disumbang sepuluh negara di dunia. Dari data *Climate Watch* yang dirilis WRI Indonesia, Tiongkok menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar hingga awal 2018. Negeri Tirai Bambu itu menghasilkan 12.399,6 juta metrik ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO<sub>2</sub>e). Jumlah itu setara 26,1% dari total emisi global. Amerika Serikat menyusul dengan menyumbang 6.018,2 MtCO<sub>2</sub>e yang setara dengan 12,7% emisi global. Kemudian, Uni Eropa menyumbang 3.572,6 MtCO<sub>2</sub>e atau setara 7,52% emisi global. Indonesia pun masuk dalam daftar

sepuluh negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Tercatat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Tanah Air sebesar 965,3 MtCO<sub>2</sub>e atau setara 2% emisi dunia. Mayoritas emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor energi.

Ada konsensus umum bahwa Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke 21 akan menghasilkan paket yang terdiri dari berbagai instrumen dengan bentuk hukum yang berbeda: kesepakatan hukum inti, keputusan Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan kemungkinan deklarasi politik. Memutuskan ketentuan dan masalah mana yang termasuk dalam instrumen tertentu, dan kombinasi terakhir instrumen, merupakan aspek kunci dari apa yang akan dinegosiasikan. Oleh karena itu, hasilnya harus dinilai berdasarkan keseluruhan "paket", bukan hanya berdasarkan kesepakatan inti. UNFCCC memiliki ketentuan umum yang tidak menciptakan hak dan kewajiban hukum bagi negara. Namun kesepakatan tersebut secara keseluruhan masih dapat dianggap sebagai kesepakatan hukum (Northrop & Waskow, 2015).

Pembatasan emisi gas rumah kaca merupakan sesuatu kebijakan yang penting dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan emisi gas rumah kaca merupakan masalah lingkungan universal berupa pemanasan global yang memiliki dampak besar, dan penanganannya harus dilakukan secara serentak dan bersama-sama. Salah satu contoh bencana alam skala besar yang diakibatkan oleh pemanasan global adalah badai Katrina yang menghantam Louisiana, Mississippi dan Alabama pada tanggal 24 sampai 31 Agustus 2005. Setelah badai Katrina, kawasan New Orleans dan sekitarnya yang padat penduduk mengalami banjir yang menewaskan 10 ribu orang dan setengah juta jiwa kehilangan tempat tinggal.

*Brown GDP* adalah istilah yang merujuk pada *produk domestik bruto (GDP)* yang didominasi oleh aktivitas ekonomi yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, terutama melalui penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Dalam konteks ini, "*brown*" mengacu pada kegiatan yang tidak berkelanjutan atau merusak lingkungan. Upaya meningkatkan PDB tanpa memperhatikan masalah lingkungan sering disebut sebagai PDB coklat atau (*Brown GDP*). Di sebagian besar negara-negara dunia ketiga pembangunan ekonomi masih sering diukur dari PDB coklat ini.

Jika tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan maka perlu dipertanyakan kembali apakah tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai dari peningkatan PDB saja. Peningkatan PDB berarti kapasitas produksi nasional meningkat secara agregatif. Permasalahan apakah peningkatan kapasitas produksi tersebut ternyata menimbulkan masalah-masalah degradasi lingkungan dalam metode PDB coklat hal tersebut tidak diperhitungkan

*Brown gdp* menggambarkan pembangunan ekonomi yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil dan tidak mempertimbangkan efek samping negatif yang ditimbulkan oleh produksi dan konsumsi ekonomi terhadap lingkungan (*World Bank 2013*). lanjut dari *Brown gdp*, *Green GDP* adalah koreksi dari konsep PDB coklat yang tidak mengakomodasi kegagalan pasar. Model PDB coklat adalah representasi dari teori ekonomi pasar, menurut Suparmoko dan Maria (2000) produsen harus membayar semua biaya material dan jasa yang digunakan untuk memproduksi output termasuk pembuangan limbah. Secara sama konsumen yang membeli barang tersebut juga membayar semua biaya tersebut termasuk pembuangan limbah. Dalam dunia nyata hal tersebut tidak berlaku, pihak



produsen maupun konsumen sama-sama tidak mau menanggung dampak dari tindakan ekonominya. Dalam teori ekonomi inilah yang disebut oleh eksternalitas.

*Produk Domestik Bruto Hijau (PDB Hijau/Green GDP)*. Pembangunan ekonomi dalam arti sempit dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertambahan PDB. Jika PDB meningkat maka dapat diartikan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi. Upaya meningkatkan PDB tanpa memperhatikan masalah lingkungan sering disebut sebagai PDB coklat atau (*Brown GDP*). Di sebagian besar negara dunia ketiga pembangunan ekonomi masih sering diukur dari PDB coklat ini. Istilah ini sering digunakan untuk menekankan perlunya pergeseran menuju "*green GDP*," yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Green GDP mencakup dampak lingkungan dalam perhitungan GDP, mempertimbangkan faktor seperti polusi, degradasi sumber daya alam, dan emisi karbon.

*Green Economy* memiliki perbedaan dengan ekonomi konvensional yang mana PDB tidak lagi menjadi acuan tingkat keberhasilan suatu negara melainkan dengan menggunakan konsep PDB Hijau. Penghitungan PDB konvensional menggunakan pendekatan produksi, sedangkan pada PDB Hijau akan dilakukan penyesuaian dengan memasukkan faktor deplesi, degradasi, dan manfaat jasa lingkungan untuk melihat bertambah atau berkurangnya nilai PDB (Nurrochmat, dkk 2011).

Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), konsep ekonomi hijau ditandai dengan rendahnya emisi karbon, penggunaan sumber daya yang efisien, dan inklusi sosial. Pemerintah Indonesia menggunakan konsep *Green*

*Economy* atau ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya jangka menengah panjang untuk mengurangi emisi karbon dan mentransformasikan sektor ekonomi.



**Gambar 1.4 Pilar *Green Economy***

Dari gambar diatas terdapat beberapa pilar *green economy* sebagai berikut :

## 1. LINGKUNGAN

- a) Kawasan Hutan
- b) Persentase Energi Terbarukan
- c) Pengelolaan Limbah
- d) Persentase Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- e) Persentase Lahan Gambut Terdegradasi

## 2. EKONOMI

- a) Intensitas Emisi
- b) Intensitas Energi Final
- c) Pendapatan Nasional Bruto
- d) Produktivitas Pertanian
- e) Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri

f) Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa

### 3. SOSIAL

a) Rata-rata Lama Sekolah

b) Harapan Hidup

c) Tingkat Kemiskinan

d) Tingkat Pengangguran

Pilar ekonomi dengan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang bersifat berkelanjutan, maka terbentuklah konsep Ekonomi Hijau atau *Green Economy*. Ekonomi hijau dan pertumbuhan hijau adalah kecenderungan menuju strategi terpadu dan komprehensif yang memasukkan aspek sosial dan lingkungan ke dalam proses ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan membangun ekonomi hijau, pertumbuhan hijau membantu penggunaan modal alam yang bertanggung jawab, mencegah dan menurunkan polusi, dan menghasilkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Ekonomi hijau merupakan sebuah gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial tanpa adanya resiko kerusakan alam. Penyelenggaraan ekonomi hijau di Indonesia didasarkan pada kesepakatan internasional Paris *Agreement* tentang pentingnya ekonomi yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup digunakan untuk mengoperasionalkan kesepakatan tersebut. Pembangunan ekonomi hijau dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target

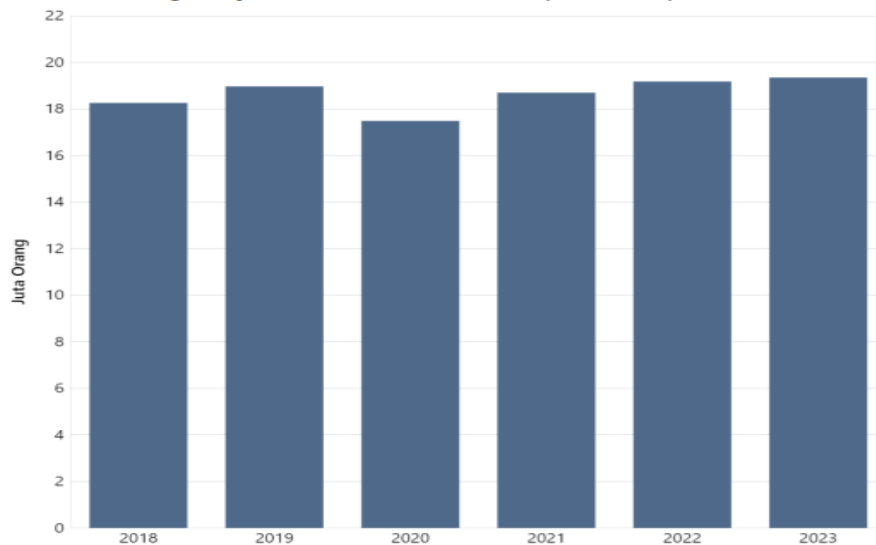
Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Masih terdapat beberapa instrumen regulasi lainnya secara spesifik yang juga terkait dengan ekonomi hijau.

Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa kebijakan desentralisasi fiskal untuk mengatur dan mendukung prinsip ekonomi dan pertumbuhan hijau, sehingga Indonesia dapat mewujudkan tujuan yang telah ditandatangani pada Perjanjian Paris. Di Indonesia, konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan secara tersirat terdapat pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 dengan menyatakan bahwa —perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionalll sehingga konsep Ekonomi Hijau sejalan dengan dasar negara Indonesia.

Menurut (Sukirno, 2011) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barangbarang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Rifda Atiqoh, 2020).

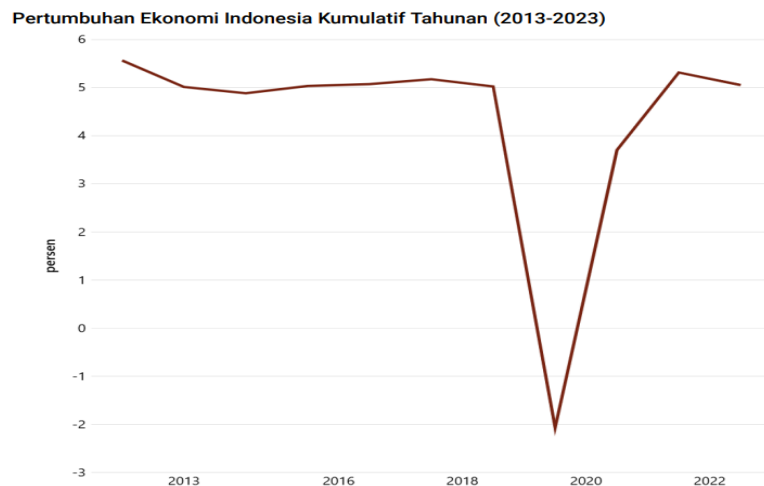
Didalam suatu perekonomian, keseluruhan jumlah output yang diproduksi oleh suatu wilayah dapat didekati dengan data *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* yang nilainya sama dengan keseluruhan jumlah pendapatan diwilayah tersebut (Mankiw, 2012). Dengandemikian, dari Persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bukan saja dipengaruhi oleh pendapatan perkapita awal, investasi modal fisik, investasi modal manusia, dan pertumbuhan penduduk diwilayah itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh pendapatan perkapita awal dari wilayah lain, investasi modal fisik dan modal manusia dari wilayah lain, pertumbuhan penduduk dari wilayah lain, serta pertumbuhan ekonomi dari wilayah lain.

**Tren Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Indonesia (2018-2023)****Grafik 1.5 Tren Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Indonesia (2018-2023)**

sumber : - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan jumlah tenaga kerja sektor industri mencapai 19,34 juta sepanjang 2023. Jumlah itu meningkat tipis 0,88% dibanding 2022 sebesar 19,17 juta orang "[Kenaikan jumlah pekerja] diiringi dengan kenaikan upah sebesar 7,3%," tulis Kemenperin dalam laporan yang diterima Databoks, Kamis (28/12/2023). Capaian 2023 juga tercatat paling tinggi selama enam tahun terakhir. Adapun jumlah terendah pada rentang 2018-2023 terjadi pada 2020 yang hanya menumbang 17,48 juta pekerja sektor industri. Proyeksi 2024 Kemenperin mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan akibat dampak geoekonomi dan geopolitik yang kemungkinan besar akan tetap berlangsung pada tahun 2024..



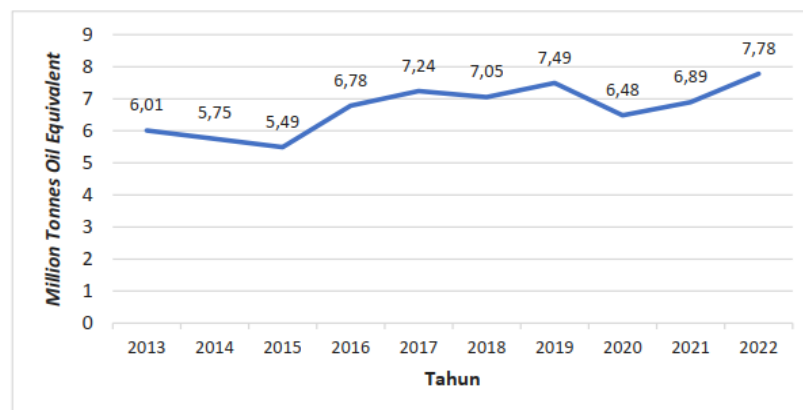


**Gambar Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kumulatif ( 2013 – 2023 )**

Sumber:- Badan Pusat Statistik (BPS) [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05% secara kumulatif (*cumulative-to-cumulative/ctc*) sepanjang 2023. Persentase pertumbuhan itu lebih rendah 0,26 poin persen dibandingkan capaian 2022 yang sebesar 5,31% (*ctc*). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berdasarkan hitungan tahunan tumbuh 5,04% (*year-on-year/yoy*) pada kuartal IV 2023. Capaian ini naik tipis 0,08 poin persen dari sebelumnya yang sebesar 4,96% pada kuartal IV 2022. Ekonomi kuartal IV 2023 juga tumbuh 0,45% secara kuartal (*quarter-to-quarter/qtq*) dari kuartal III 2023. Angka ini turun 1,15 poin persen dari pertumbuhan kuartal III terhadap kuartal II yang sebesar 1,60%. Amalia Widyasanti, Plt. Kepala BPS menyebut, pola yang terjadi secara kuartal (*qtq*) pada kuartal IV biasanya lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya atau termasuk pola musiman. (Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Turun Jadi 4,94% per Kuartal III 2023) Namun secara keseluruhan, Amalia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2023 tetap terjaga, meski mengalami penurunan. "Di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tumbuh solid," kata Amalia pada konferensi

pers daring, Senin (5/2/2024). Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan *Produk Domestik Bruto (PDB)* atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75 juta atau US\$4.919,7. Nilai PDB ADHB pada 2023 melampaui 2022 yang sebesar Rp19.588,1 triliun. Sementara PDB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp12.301,4 triliun pada 2023. Nilai ini juga naik dari PDB ADHK 2022 yang sebesar Rp11.710,2 triliun. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 13,96% pada 2023. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi lembaga nonproft yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%



**Gambar Grafik 1.7 Konsumsi Energi Terbarukan di Indonesia Tahun 2013-2022**

Sumber: *BP Statistical Review of World Energy, 2023 (diolah)*

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa meskipun konsumsi energi terbarukan di Indonesia terus meningkat akan tetapi konsumsi energi terbarukan di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Dimana rata-rata konsumsi energi terbarukan Indonesia selama tahun 2013-2022 hanya sebesar 6.06 *million tonnes oil equivalent* saja. Hal ini dikarenakan konsumsi energi Indonesia masih didominasi dari konsumsi energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara.

Namun konsumsi energi terbarukan di Indonesia selama tahun 2013-2022 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat akan lingkungan semakin meningkat sehingga mengakibatkan masyarakat perlahan-lahan mulai beralih ke konsumsi energi terbarukan meskipun peningkatannya tidak begitu signifikan.

Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut. Untuk itu penelitian ini berjudul **“ANALISIS PERKEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY* DI INDONESIA PASCA PENERAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Indonesia perlu mengadopsi kebijakan Uni Eropa seperti alokasi emisi, laporan tahunan, dan nilai potensial pemanasan global sesuai dengan Kesepakatan Paris.
2. Mdgs mengalami kemajuan namun terdapat kendala dalam pembangunan dan pendampingan teknis.
3. Pencapaian Sdgs indonesia dari tahun 2015 – 2022 meningkat dari 65.03% menjadi 69,16%, namun pada tahun 2022 juga indonesai masih mendapat label merah dalam penanganan masalah kelaparan.
4. *Green economy* memerlukan koordinasi yang lebih baik antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, serta perubahan perilaku konsumen.

5. Peningkatan pekerja Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 – 2019 sebesar 3,73%, namun mengalami penurunan ditahun 2019 sebesar 9,63%.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai analisis perkembangan konsep *green economy* yang mengangkat pilar ekonomi di Indonesia pasca penerapan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa.

### **1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan dari indikator ekonomi yang menggunakan konsep *green economy* di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sektor jasa di Indonesia dalam target SDGs tahun 2030?

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang intensitas emisi, intensitas energi final, pendapatan nasional bruto perkapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sector industri, produktivitas tenaga kerja sektor jasa.

2. Melakukan estimasi tentang pengaruh variabel Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, Produk Domestik Bruto Per kapita, dan Konsumsi Energi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Akademik**

#### **A. Bagi Peneliti:**

1. Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
2. Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

#### **B. Bagi Mahasiswa:**

1. Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
2. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana.

### **1.5.2 Non Akademik**

Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pembangunan Ekonomi**

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Todaro, 2015).

Pembangunan menurut Nugroho dan Rochman Dahuri (2004) dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Tikson (2005), pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran 14 melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dll. Sedangkan transformasi budaya sering



dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekulerisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

## **A. Aliran Klasik**

### **1. Adam Smith**

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara *agregat*. Smith

pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap penumpukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikaan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi penumpukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

Kelemahan Teori Adam Smith

- a. Pengabaian masyarakat secara luas
- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

## **2. David Ricardo**

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus

terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

### **3. Thomas Robert Malthus**

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

*Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keternbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

#### 4. Teori Karl Marx

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi.

Menurutnya berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap :

1. Masyarakat kumunal primitive, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
2. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik factor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim. Mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan dsb. Karena murah nya harga buruh maka minat pemilik factor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.
3. Masyarakat fiodal, kaum bangsawan memiliki factor produksi utama yaitu tanah.. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sector pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar

yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya system fiodal. Kelas borjuis yang memilki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tarif serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum fiodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi munyukai system ini

4. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh. Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas.
5. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.

Marx meramalkan keruntuhan system kapitalis, menurutnya terjadi karena adanya:

- a. Akumulasi yang menyebabkan perbedaan kaya miskin semakin lebar
- b. Kesengsaraan, karena kemiskinan semain luas
- c. Krisis, karena daya beli masyarakat semakin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (*over production*). Harga barang-barang merosot dan produksi terpaksa ditahan.

- d. Konsentrasi, penggabungan perusahaan-perusahaan agar tidak bangkrut karena persaingan dalam masyarakat kapitalis

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

### **2.1.2 Millenium Development Goals (MDGs) ke Sustainable Development Goals (SDGs)**

Transisi dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencerminkan evolusi pemikiran dan pendekatan dalam agenda pembangunan global. Menurut para ahli, pergeseran ini menandai transisi dari pendekatan yang lebih sempit dan target-oriented dalam MDGs menjadi pendekatan yang lebih holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam SDGs (UN DESA, 2015). Para ahli menyoroti bahwa SDGs memperluas cakupan agenda pembangunan dengan memasukkan isu-isu yang tidak tercakup

secara memadai dalam MDGs, seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi (Griggs et al., 2013). Selain itu, ada penekanan yang lebih besar pada inklusivitas, partisipasi, dan tanggung jawab bersama dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dengan mengakui bahwa tantangan pembangunan global memerlukan kolaborasi lintas sektor, lintas batas, dan lintas generasi (Le Blanc, 2015). Pergeseran dari MDGs ke SDGs juga mencerminkan pengakuan akan kompleksitas tantangan pembangunan dan interkoneksi antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Nilsson et al., 2016). Dalam konteks ini, para ahli menekankan pentingnya terus-menerus memperbarui strategi, memperbaiki kapasitas, meningkatkan pemantauan dan evaluasi, serta memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan SDGs secara komprehensif dan efektif (Hesselbarth & Schaltegger, 2014). Dengan demikian, transisi dari MDGs ke SDGs tidak hanya melibatkan perubahan dalam sasaran pembangunan, tetapi juga mewakili pergeseran paradigmatik yang lebih luas dalam pemikiran dan praktik pembangunan global.



Gambar 2.1 *Milenium Development Goals ( MDGS )*

Sumber : [www.undp.org](http://www.undp.org)



### 1) Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs):

1. Eradikasi Kemiskinan dan Kelaparan: Target mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem dan kelaparan.
2. Pendidikan Dasar Berkualitas: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar.
3. Kesehatan Ibu dan Anak: Menurunkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi
4. Kesetaraan Gender: Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
5. Penyakit Menular: Mengurangi penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
6. Lingkungan Hidup: Meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta mengurangi kerusakan lingkungan.



Gambar 2.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sumber : [www.indonesia.un.org](http://www.indonesia.un.org)

### 2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):

1. Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi.
2. Tidak Ada Kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan,

meningkatkan nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan: Memastikan kehidupan sehat dan promosi kesejahteraan untuk semua pada semua usia.
4. Pendidikan Berkualitas: Memastikan akses yang inklusif, adil, dan berkualitas terhadap pendidikan yang baik.
5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi Terjangkau dan Bersih: Meningkatkan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif serta menciptakan pekerjaan layak untuk semua.
9. Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Kurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi kesenjangan antara dan dalam negara.
11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan: Menghasilkan dan mengonsumsi secara berkelanjutan.
13. Tindakan untuk Iklim: Mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi

perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan di Bawah Air: Melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut dan laut dalam.
15. Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat: Memperkuat mekanisme pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan : pentingnya kerjasama global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

### **2.1.3 Produktivitas**

Produktivitas merupakan faktor sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan suatu organisasi/perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap organisasi/perusahaan menginvestasikan sumber- sumber vital (sumber daya manusia, bahan dan uang) untuk memproduksi barang/jasa. Dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia tersebut secara efektif akan memberikan hasil yang lebih baik.

Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh pekerja dalam satuan waktu dinamakan produktivitas (Mankiw, 2007; Ray, 1998; Todaro & Smith, 2006). Dalam pasar kerja, di sisi penawaran adalah jumlah penduduk usia kerja yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja baik bekerja atau mencari kerja (angkatan kerja). Jadi pekerja di sini merupakan salah satu faktor produksi di

samping modal fisik, modal uang, sumber daya alam, uang dan teknologi. Dibanding dengan faktor produksi yang lain, modal manusia ini merupakan faktor produksi yang unik, tidak seperti modal fisik yang berupa mesin atau tanah misalnya, yang bisa berproduksi tanpa kehadiran si pemilik modal fisik ini (Ananta, 1990). Modal manusia ini tidak dapat dipisahkan secara fisik dari tenaga kerja itu sendiri karena modal manusia bisa merasakan kelelahan, kepanasan, dan ketidaknyamanan kondisi kerja.

Dalam proses produksi, peningkatan produktivitas (istilah ekonominya pertumbuhan output) bisa diperoleh melalui penambahan jumlah tenaga kerja, maupun juga melalui peningkatan efektivitas (*effective work*) para pekerja yang bekerja. Istilah *effective work* menunjukkan seberapa efektif seorang tenaga kerja berkontribusi dalam pembentukan barang dan jasa (*output*) dengan asumsi input lainnya tidak berubah. Dengan tingkat output yang sama, bisa saja dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang berbeda. Semakin sedikit jumlah pekerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu, semakin efektif pekerja tersebut dalam bekerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa produktivitas tenaga kerja terkait dengan alasan kedua dan menjadi indikator yang dapat dipakai sebagai ukuran efektivitas tenaga kerja. Selain itu efektivitas dan juga efisiensi faktor pekerja juga ditentukan oleh tersedianya peralatan untuk memproduksi barang dan jasa, yang umumnya sebanding dengan peningkatan kemajuan teknologi.

Perlu dibedakan antara produktivitas secara makro suatu negara dengan produktivitas seorang pekerja (individu). Produktivitas secara makro dicerminkan dari besarnya jumlah barang dan jasa (*output*) per unit input faktor produksi sedangkan produktivitas tenaga kerja merupakan jumlah output yang dihasilkan

oleh setiap unit tenaga kerja. Unit tenaga kerja itu sendiri bisa diukur dengan banyaknya pekerja (jumlah orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan) ataupun jumlah jam kerja yang dikontribusikan untuk menghasilkan sebuah produk. Produktivitas tenaga kerja (*labor productivity*) mencerminkan kinerja pekerja. Kinerja pekerja ini menentukan tingkat upah atau penghasilan yang diterima pekerja. Kinerja pekerja ini menentukan tingkat upah ataupun penghasilan yang diterima pekerja yang merupakan sarana untuk memperbaiki standar kehidupan. Tinggi rendahnya upah yang diterima pekerja akan menentukan tingkat standar kehidupan pekerja dan keluarganya.

Dalam literatur, (Mankiw, 2007; OECD, 2001; Ray, 1998) menyebutkan beberapa hal yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja setidaknya terdapat tiga argumen yang dapat menjadi sinyal adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai berikut:

1. Produktivitas meningkat jika terjadi peningkatan output tanpa adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, padahal disaat yang bersamaan juga tidak ada peningkatan input lainnya. Ini berarti bahwa setiap pekerja mampu menghasilkan output yang lebih tinggi tanpa bantuan tambahan input.
  2. Produktivitas meningkat jika jumlah output yang dihasilkan lebih besar tanpa adanya kenaikan jumlah tenaga kerja, dan disaat yang bersamaan terjadi peningkatan input lainnya. Berarti setiap pekerja menggunakan input lainnya (seperti modal fisik, modal manusia, maupun bahan baku) dalam jumlah besar.
- Produktivitas meningkat jika pertumbuhan output lebih besar dibanding pertumbuhan pekerja.

### **1. Faktor - faktor produktivitas**

Jika suatu perekonomian sangat bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka penurunan ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat dihindari akan memberikan hambatan yang signifikan terhadap total output, konsumsi, dan akumulasi modal. Hal ini tidak berarti bahwa produksi pada akhirnya akan menurun. Peningkatan investasi pada modal produktif dapat mengimbangi penurunan ketersediaan sumber daya sehingga konsumsi tidak perlu menurun. Namun, kecil kemungkinannya perekonomian pasar mau berinvestasi pada modal yang dibutuhkan untuk jalur pertumbuhan tersebut jika hasil investasi menurun seiring dengan menurunnya ketersediaan input energi tak terbarukan yang diperlukan. Memang benar, model pertumbuhan menunjukkan bahwa tanpa peningkatan pengembalian investasi modal atau perubahan teknis, konsumen dan investor pada akhirnya akan melihat konsumsi dan produksi menyusut hingga nol, meskipun peningkatan konsumsi mungkin terjadi dalam jangka waktu dekat (Benchekroun dan Withagen, 2011).

Alasan peralihan ke investasi pada sumber daya terbarukan yang lebih besar adalah karena hal ini menghasilkan manfaat produksi dalam jangka panjang. Dalam kasus perikanan, misalnya, regenerasi alami meningkat seiring dengan jumlah stok yang lebih besar dibandingkan dengan stok yang sangat sedikit, biaya penangkapan ikan turun, dan hal ini meningkatkan surplus di sektor ini. Secara umum, berkurangnya tekanan terhadap sumber daya terbarukan dapat meningkatkan jasa ekosistem dan meningkatkan produktivitas ekosistem, dan pada akhirnya juga produktivitas sektor ekonomi yang bergantung pada ekosistem. Peningkatan

produktivitas jangka panjang akan mengimbangi biaya ekonomi akibat berkurangnya produksi karena pengurangan pemanenan (dengan asumsi profil ekstraksi yang sebelumnya tidak berkelanjutan juga tidak efisien secara ekonomi). Peningkatan tingkat keuntungan jangka panjang dari ekstraksi pada akhirnya akan merangsang investasi dan pertumbuhan. Namun dalam kerangka yang dibahas di sini, trade-off antarwaktu yang dihadapi dalam upaya pemulihan penggunaan modal alam yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan di masa lalu tidak dapat dihindari

Pertimbangan serupa juga diterapkan dalam kasus pencemaran stok. Pengurangan aliran emisi menimbulkan biaya mitigasi langsung, namun konsentrasi polutan yang lebih rendah di atmosfer, badan air, atau tanah menghasilkan dampak produktivitas jangka panjang. Peningkatan produktivitas ini dapat berasal dari dampak kesehatan (pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif dan lebih sedikit sumber daya yang dikeluarkan untuk perawatan medis), atau jasa ekosistem (lingkungan yang lebih bersih menghasilkan jasa yang lebih berharga, seperti stok ikan yang lebih melimpah, biaya pengolahan air yang lebih rendah), atau pendapatan pariwisata jika wisatawan tertarik dengan fasilitas alam. Model DICE yang dikembangkan oleh Nordhaus (1994, 2008) untuk mempelajari kebijakan ekonomi perubahan iklim bergantung pada asumsi yang sangat mirip. Dalam model tipe Ramsey ini, penghindaran perubahan iklim meningkatkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Kapanpun kebijakan penggunaan sumber daya mempengaruhi tingkat pengembalian, yaitu produktivitas marjinal modal buatan manusia, terdapat dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan melalui perubahan yang disebabkan

oleh investasi modal. Biaya kebijakan lingkungan hidup menjadi lebih besar (kebijakan tersebut menurunkan output secara langsung, dan melalui pengurangan produk marjinal modal, kebijakan ini juga mengurangi investasi secara tidak langsung), namun manfaatnya juga meningkat. Seberapa besar efek keseimbangan atau interaksi umum ini bergantung pada seberapa penting input modal buatan manusia dibandingkan dengan input sumber daya dan seberapa kuat hasil yang semakin berkurang (Smulders, 2000).

## **2. Pengukuran produktivitas**

Dalam konsep ekonomi hijau, alam sebagai stok memberikan manfaat langsung kepada konsumen. Hutan berkualitas tinggi memiliki nilai kenyamanan, keberadaan stok ikan paus memiliki nilai tersendiri, dan akumulasi stok karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) memberikan nilai negatif atau eksternalitas negatif. Baik N, melalui aliran sumber daya alam yang disediakan oleh jasa ekosistem, maupun sumber daya yang diambil dari alam, R, mempengaruhi produksi. (Heal, Solow, dan Stiglitz, 1974).

Polusi, misalnya, dapat merugikan produktivitas pekerja, dan tekanan lingkungan akibat perubahan iklim akan merugikan produktivitas faktor total di bidang pertanian pada khususnya. Selain itu, air bersih bermanfaat bagi proses produksi (Heal, Solow, dan Stiglitz, 1974).

Output maksimal  $Y$  yang dapat diperoleh dengan input faktor tertentu dijelaskan oleh fungsi produksi  $F$  dengan sifat neoklasik standar (kuasi-konkavitas, produk input marjinal positif tetapi menurun, produk marjinal tak terbatas karena penggunaan input menjadi nol). Dengan menghilangkan referensi terhadap angkatan kerja yang diasumsikan konstan untuk menyederhanakan penjelasan,



model produksi yang berguna dengan modal alam dan sumber daya ekstraktif serta modal fisik dapat ditulis sebagai (Heal, Solow, dan Stiglitz, 1974):

$$Y = F(K, R, N)$$

Baik stok modal buatan manusia maupun stok lingkungan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang pertama meningkat seiring dengan investasi bersih, yaitu jumlah output yang tidak digunakan untuk konsumsi,  $C$ , untuk biaya ekstraksi sumber daya,  $yR$  (di mana  $y$  adalah biaya ekstraksi unit), dan untuk penggantian modal yang sudah usang,  $y_k$  (di mana  $Y$  adalah tingkat penyusutan) (Heal, Solow, dan Stiglitz, 1974).

$$\dot{K} = F(K, R, N) - C - \mu - R - \delta K$$

Kualitas lingkungan meningkat jika penggunaan sumber daya lebih sedikit dibandingkan regenerasi alami:

$$\dot{N} = E(N) - R$$

Fungsi  $E$  menggambarkan bagaimana alam beregenerasi. Stok sumber daya mempunyai kapasitas untuk tumbuh, namun tidak dapat tumbuh dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini menyiratkan bahwa  $E$  merupakan fungsi dari stok  $N$  dan menjadi nol jika stok mendekati ukuran maksimum bio-fisiknya. Karena terdapat batasan dalam berinvestasi pada kualitas lingkungan hidup, timbul trade-off dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau. Tidak mungkin membiarkan input sumber daya tumbuh tanpa akhirnya menghabiskan sumber daya tersebut. Dalam kasus ekstrim, persediaan sumber daya benar-benar tidak dapat diperbarui; maka  $E(N) = 0$  dan regenerasi tidak terjadi. Ini adalah asumsi yang kuat dan tidak terlalu realistis untuk modal alam secara keseluruhan, meskipun hal ini tentu saja berlaku untuk

beberapa bagian dari modal alam, dan bahkan modal alam terbarukan (misalnya perikanan) dapat habis hingga tidak dapat dipulihkan lagi.

Produksi bruto kini bergantung pada modal dan dua jenis energi,  $R$  dan  $B$ , sedangkan PDB adalah produksi bruto dikurangi biaya produksi energi. Bagian dari PDB yang tidak dikonsumsi diinvestasikan dalam persediaan modal fisik:

$$K = F(K, R, + B, N) - [M(S)R + \beta B] - \delta K - C$$

Di mana  $F$  adalah produksi kotor (seperti pada bagian sebelumnya, tenaga kerja sebagai input produksi diabaikan) dan istilah dalam tanda kurung adalah biaya produksi energi.

Inti dari perubahan iklim dan polusi stok adalah bahwa emisi fosil terakumulasi di udara dan atmosfer, dan emisi kumulatif yang lebih besar menurunkan kualitas lingkungan secara terus menerus. Jika peluruhan (penyerapan)  $\text{CO}_2$  dan polutan dari atmosfer dapat diabaikan, kita menemukan bahwa kualitas lingkungan dan cadangan fosil yang terpelihara berhubungan positif: semakin sedikit bahan bakar yang diekstraksi, semakin sedikit partikel karbon yang terakumulasi di atmosfer. Dalam model ini berarti:

$$N = S - S_0 + S_0$$

Dan

$$\dot{N} = -R$$

Kita melihat bahwa formulasi ini menyiratkan  $E(N) = 0$ , yaitu perekonomian bergantung pada sumber daya tak terbarukan dibandingkan sumber daya terbarukan dan stok polusi yang tidak dapat diubah. Hal ini memungkinkan kita untuk menunjukkan dengan jelas implikasi dari sifat tidak terbarukan dan tidak dapat diubah yang terkait dengan masalah perubahan iklim.

Tanpa kebijakan lingkungan hidup, perekonomian pada awalnya hanya menggunakan energi fosil (mengabaikan pasar khusus), dan beralih ke energi terbarukan ketika biaya ekstraksi fosil menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya pendukungnya. Perubahan iklim dan polusi meningkat selama energi fosil digunakan. Biaya pasokan energi fosil juga meningkat seiring dengan menipisnya cadangan energi. Awalnya, perekonomian tumbuh karena rendahnya biaya energi dan tingginya marginal produk modal merangsang investasi. Namun, pertumbuhan melambat seiring dengan meningkatnya biaya energi dan berkurangnya keuntungan modal. Van der Ploeg dan Withagen (2013), yang mengabaikan dampak produktivitas terhadap kualitas lingkungan, menunjukkan bahwa hal ini kemungkinan besar akan mengakibatkan melampaui batas (*overshooting*): pada awalnya modal dan konsumsi tumbuh ke tingkat yang tinggi, namun kemudian mulai menurun ketika energi menjadi mahal dan pada akhirnya perekonomian beralih ke perekonomian pendukung yang mahal.

#### **2.1.4 Produk Domestik Bruto (PDB)**

##### **1) Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap sektor produktif dalam suatu negara selama satu periode tertentu (Arsyad, 1999). Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) dan produk Nasional Bruto (PNB) sebenarnya berbeda, pada PNB digunakan istilah *national* karena batasannya nasional kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di dalam negeri maupun luar

negeri harus dimasukkan ke dalam PNB. Sedangkan istilah *domestic* digunakan karena batasannya wilayah suatu negara, termasuk di dalamnya warga negara asing dan perusahaan-perusahaan asing.

Dalam dunia perekonomian baik itu di negara berkembang maupun negara maju, produksi barang dan jasa tidak hanya berasal dari negara tersebut, tetapi juga berasal dari negara lain. Adanya perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara akan membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut. Operasi tersebut merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi suatu negara. Nilai produksi yang disumbangkan perlu dihitung dalam pendapatan nasional yang berupa PDB. Sehingga, PDB dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa suatu negara yang diproduksi milik warga negara tersebut dan negara asing pada negara tersebut (Sukirno, 2002).

PDB digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar berlaku menjelaskan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku setiap tahunnya, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan pergeserannya, sedangkan untuk PDB atas harga

konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2019).

Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan sebagai indikator untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dikatakan tumbuh yaitu ketika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat tahun sebelumnya. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian suatu negara yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB).

## **2) Metode Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)**

Salah satu metode perhitungan produk domestik bruto, yaitu dengan metode pengeluaran (expenditure method). Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian:

- a. konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption ( C )
- b. Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption ( G )
- c. Pengeluaran Investasi/ Investment Expenditure ( I )

d. Ekspor Neto/ Net Export ( X – M ) Metode perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:

$$PDB = C + G + I + (X-M)$$

Dimana:

C = konsumsi rumah tangga

G = konsumsi / pengeluaran pemerintah

I = PMTDB

X = ekspor

M = impor

Adapun komponen dari pada perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran adalah sebagai berikut:

a. Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/ barang tahan lama (non-durable goods).

b) Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)

Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government expenditure).

Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Itulah sebabnya dalam data statistik PDB, pengeluaran konsumsi pemerintah nilainya lebih kecil daripada pengeluaran yang tertera dalam anggaran pemerintah (sisi pengeluaran anggaran negara).

### C ) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Investment Expenditure)

Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan/ meningkatkan nilai tambah. Termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk mengetahui berapa potensi produksi, akan lebih akurat bila yang dihitung adalah investasi neto (net investment), yaitu investasi bruto dikurangi penyusutan. Penghitungan PMTDB ini menunjukkan bahwa pendekatan pengeluaran lebih mempertimbangkan barang-barang modal yang baru (newly capital goods). Barang-barang modal tersebut merupakan output baru, karena itu harus dimasukkan dalam perhitungan PDB.

### d) Ekspor Neto (Net Export)

Ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar dari pada impor. Begitu juga sebaliknya. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia)

### 3) PDB Harga Berlaku dan PDB Harga Konstan

Produk domestik bruto terbagi atas PDB harga berlaku dan PDB harga konstan. PDB harga berlaku merupakan hasil perkalian harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan.

$$\text{PDB Berlaku} = \text{output} \times \text{harga berlaku}$$

Perhitungan PDB berdasarkan harga berlaku kurang mencerminkan kondisi perekonomian yang sesungguhnya, karena adanya perbedaan harga pada setiap

tahunnya akibat pengaruh inflasi. Untuk menghasilkan perhitungan yang akurat, maka perhitungan PDB didasarkan pada harga konstan.

$$\text{PDB Konstan} = \text{output} \times \text{harga konstan}$$

PDB konstan diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan tahun dasar (based year) yang merupakan tahun dimana perekonomian dalam kondisi stabil. Harga barang pada tahun tersebut digunakan sebagai harga konstan. Nilai PDB konstan ini disebut juga sebagai PDB riil. Sedangkan nilai PDB berlaku disebut PDB nominal.

### 2.1.5 Konsumsi Energi

#### a. Energi

Menurut UU No. 30 Tahun 2007, Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Energi mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Hamdi (2016), sumber energi berdasarkan cadangan (jumlah) yang tersedia di alam dan kapasitas regenerasinya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

#### 1) Sumber Energi Tak Terbarukan (*Non-Renewable Energy Source*)

energi tak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya sangat terbatas di bumi. Menurut Goldemberrg (2010), *Non-renewable sources of energy*



*are those which nature is unable to replace in a time span compatible with its consumption by human beings.*” Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sumber energi ini tidak dapat diperbaharui lagi jika telah habis. Penggunaan yang berlebihan berdampak pada masalah ketersediaan sumber energi ini. Hodgson (2010) menambahkan, *“Most of energy is generated by non-renewable source as coal, oil and natural gas, this immediately raises the problem of what to do when they become exhausted”*. Hal ini dapat didefinisikan sebagai energi yang digunakan dan dihasilkan oleh sumber energi tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menimbulkan masalah ketika energinya habis.

Konsumsi energi tak terbarukan (fossil) adalah konsumsi energi yang bersumber dari alam dan jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi jika telah habis. Sumber energi tak terbarukan terdiri dari:

1. Batu Bara

Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar dan relatif murah. Batu bara adalah mineral organik yang dapat terbakar, terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengendap, selanjutnya berubah bentuk akibat proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun. Komponen penyusun batu bara yaitu campuran karbon, hydrogen, oksigen, dan nitrogen. Oleh karena itu, batubara termasuk dalam kategori bahan bakar fosil. Ketersediaan batu bara cukup berlimpah di alam sehingga banyak digunakan dan diperkirakan tetap menjadi sumber energi utama di masa yang akan datang.

## 2. Minyak Bumi

Minyak bumi adalah salah satu sumber energi utama yang banyak digunakan di berbagai negara di dunia sebagai bahan bakar. Kebutuhan bahan bakar selalu meningkat seiring dengan penggunaannya di bidang industri maupun transportasi. Oleh karena itu, penggunaan minyak bumi dalam jumlah besar ada di negara-negara berkembang.

## 3. Gas Alam

Gas alam memasok lebih dari 20 persen kebutuhan energi di seluruh dunia. Gas alam merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana ( $CH_4$ ). Energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara. Selain itu penggunaannya jauh lebih bersih dan sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan.

## 2) Sumber Energi Terbarukan (*Renewable Energy Source*)

Menurut Hamdi (2016), Sumber energi terbarukan adalah sumber energi alam yang dapat langsung digunakan secara bebas dan bisa diperbarukan secara terus-menerus dan tak terbatas. Jadi, konsumsi energi terbarukan adalah konsumsi energi yang bersumber dari alam yang langsung dapat digunakan secara bebas dan bisa diperbarukan secara terus menerus dan tak terbatas. Fay dan Golamb (2002) menyatakan bahwa contoh sumber energi terbarukan.

### a) *Hydropower* (Energi Air)

Air merupakan salah satu sumber energi yang sangat besar. Sebagai sumber energi, air dapat terbarukan, yang secara terus-menerus tersirkulasi oleh penguapan dan peresapan yang terjadi dalam siklus air. Air yang mengalir dapat

dijadikan energi untuk memutar kincir yang selanjutnya energi tersebut digunakan untuk proses mekanis industri. Energi aliran air juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui turbin dan generator.

b. *Biomass Power* (Energi Biomassa)

Biomassa adalah material organik yang mempunyai simpanan energi dari matahari dalam bentuk energi kimia. Kayu merupakan sumber energi biomassa yang masih sering digunakan. Sumber energi biomassa lainnya termasuk makanan hasil panen, rumput dan tanaman lain, limbah dan residu pertanian atau pengolahan hutan, komponen organik limbah rumah tangga dan industri, gas metana hasil dari timbunan sampah. Biomassa dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan sebagai bahan bakar transportasi.

c. *Geothermal* (Energi Panas Bumi)

Panas yang terkandung dalam perut bumi menghasilkan uap dan air panas yang dapat digunakan untuk memberikan tenaga pada generator dan menghasilkan listrik, atau untuk pemakaian lain seperti pemanasan rumah dan pembangkit daya pada industri. Energi panas bumi dapat diambil dari sumber di bawah tanah dengan pengeboran atau dari sumber lain yang lebih dekat dengan permukaan bumi.

d. *Solar Energi* (Energi Matahari)

Matahari merupakan sumber energi terbesar. Sinar matahari dapat digunakan untuk memanasi, memberikan penerangan, atau mendinginkan rumah atau bangunan lain, menghasilkan listrik, memanaskan air dan bermacam proses industri. Kebanyakan sumber energi terbarukan lainnya berasal baik secara langsung maupun tidak langsung dari matahari.

## B. Fungsi Konsumsi Energi

Menurut Dewan Energi Nasional (2018), Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Konsumsi energi terdiri dari konsumsi energi final dan energi primer. Energi final adalah energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. Sedangkan, energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Konsumsi energi dapat dilihat dari intensitas dan elastisitas energi. Intensitas energi adalah jumlah total konsumsi energi per unit produk domestik bruto. Sedangkan, elastisitas energi adalah perbandingan antara laju pertumbuhan energi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa satuan energi diantaranya yaitu *BOE (Barrel Oil Equivalent)*, *BOPD (Barrel Oil per Day)*, *Btu (British Thermal Unit)*, dan *MTOE (Million Tonnes Oil Equivalent)*. Persamaan fungsi konsumsi energi adalah sebagai berikut:

$$E_{i,j} = I_{i,j} \times V_{i,j}$$

Sedangkan, persamaan untuk fungsi intensitas energi adalah sebagai berikut:

$$I_{ij} = \frac{E_{ij}}{P_{ij}}$$

Dimana:

$E$  : Konsumsi/Permintaan energi

$I$  : Intensitas

$V$  : *Value Added*

$P$  : PDB

$i$  : Sektor

$j$  : Komponen pengguna energi

### C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Energi

Menurut Suparmoko (2009) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi antara lain yaitu; (1) Selera, diantara orang-orang yang berumur sama dan berpendapatan sama, beberapa orang dari mereka mengkonsumsi lebih banyak daripada yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sikap dalam penghematan (*thrift*). (2) Faktor sosial ekonomi misalnya: umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga. (3) Kekayaan, secara eksplisit maupun implisit, sering dimasukkan dalam fungsi konsumsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. (4) Keuntungan/kerugian kapital (*windfall gain*), keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong bertambahnya konsumsi, sebaliknya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi. (5) Tingkat bunga, naiknya tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. (6) Tingkat harga, naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan mengubah konsumsi riilnya walaupun ada kenaikan pendapatan nominal dan tingkat harga secara proporsional.

#### 2.1.6 Green Ekonomi

*Green economy* adalah konsep keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang berkaitan dengan perilaku ekonominya melalui regulasi. Dalam pengertian yang ada di UNEP, ekonomi hijau merupakan salah satu solusi bagi masalah lingkungan yang melibatkan aspek ekonomi yang saat ini banyak dihadapi oleh negara-negara industri di dunia yaitu pencemaran lingkungan.

David Pearce dalam Makmun (2016) menjelaskan lebih lanjut bahwa ekonomi hijau merupakan “suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi

mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan”. Ekonomi hijau dimaksudkan untuk keuntungan jangka panjang melalui penggerakkan ekonomi yang rendah karbon (undp, 2016).

*Green economy* sebagai suatu pembangunan ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2008). Dalam praktiknya rendah karbon, hemat sumber daya dan inklusif secara sosial. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja harus didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengurangi emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem

Ekonomi hijau adalah ekonomi di mana kebijakan dan inovasi lingkungan, ekonomi dan sosial memungkinkan masyarakat untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia secara inklusif, sambil mempertahankan sistem alam yang menopang kita (EEA, 2013). Definisi untuk ekonomi hijau yang dikemukakan umumnya memiliki inti yang sama. Dalam mendefinisikan konsep ekonomi hijau tidak ada definisi tunggal dan umum yang disepakati secara internasional. Untuk itu definisi *green economy* mensyaratkan adanya fleksibilitas juga pertimbangan tertentu atas perbedaan tingkat pembangunan dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap negara. Dalam strategi transformasi ekonomi Indonesia, ekonomi hijau ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas lingkungan. Implementasi ekonomi hijau secara bertahap diadopsi ke dalam pembuatan kebijakan nasional. Adapun capain

yang diinginkan oleh pemerintah dalam rangka mengadaptasi ekonomi hijau sebagai berikut :

### **1. Pembangunan Rendah Karbon**

Dunia sampai saat ini dihadapkan pada tantangan terkait perubahan iklim terutama meningkatnya emisi karbon. Upaya pengurangan emisi karbon sangat diperlukan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan rendah karbon dibutuhkan sebagai sebuah jalan tengah dalam isu ini. Pembangunan rendah karbon yakni pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Pemahaman dan penerapan konsep ini tidak selamanya sama di berbagai negara, tetapi setidaknya terdapat kesamaan dalam tiga elemen utama yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, memanfaatkan energi rendah karbon dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rendah karbon (*low carbon economy*) dimaknai sebagai mengurangi emisi karbon, mengurangi penggunaan energi fosil tradisional dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sesuai target. Selain itu, ditujukan untuk mengoordinasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan iklim yang mahal. Selanjutnya Cranston dan Hammond (2010) menyimpulkan bahwa ekonomi rendah karbon bermakna menyeimbangkan pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.



**Gambar 2.3 Keterkaitan Pembangunan Rendah Karbon dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

*Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas dan Sekretariat RAN-GRK 2023*

Keterkaitan pembangunan rendah karbon diantaranya terdiri dari tiga pilar yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama adalah pilar ekonomi mencakup tujuan (7) yaitu penggunaan energi bersih dan terjangkau, tujuan (8) mengenai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, tujuan (9) industri, inovasi dan infrastruktur, dan tujuan (17) berkenaan dengan kemitraan guna mencapai tujuan. Keterkaitan kedua dengan pilar sosial mencakup tujuan (1) tanpa kemiskinan, tujuan (2) tanpa kelaparan, dan tujuan (4) pendidikan berkualitas, dan pilar yang ketiga adalah lingkungan diantaranya mencakup tujuan (6) air bersih, tujuan (11) keberlanjutan kota dan komunitas, tujuan (12) konsumsi dan produksi bertanggung jawab, tujuan (14) kehidupan bawah laut, dan tujuan (15) kehidupan di darat yang didukung oleh tujuan (13) yaitu perubahan iklim.

## **2. Konsep Emisi Gas Rumah Kaca**

Perubahan iklim menjadi perhatian yang mencuat seiring dengan naiknya isu pemanasan global, karena dampak yang ditimbulkannya menjadi disruptif terhadap berbagai aspek sosial ekonomi serta keberlanjutan ekosistem. Adanya peningkatan



emisi gas rumah kaca yang terjadi dapat menyebabkan pemanasan global yang dapat menaikkan suhu global dan pada akhirnya berdampak pada perubahan iklim. Dengan kegiatan manusia (antropogenik) yang terus meningkat setelah era pra-industri sangat berpengaruh terhadap peningkatan penggunaan energi dari bahan bakar minyak terutama dalam proses industri, transportasi, dan berbagai kegiatan manusia lainnya, hal tersebut menyebabkan emisi gas rumah kaca meningkat dengan cepat.

Dari semua jenis gas rumah kaca di atmosfer yang keberadaannya berpotensi menyebabkan perubahan iklim global yang paling utama adalah CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, dan N<sub>2</sub>O. Dari ketiga jenis gas ini, yang paling banyak kandungannya di atmosfer ialah CO<sub>2</sub>. Emisi gas CO<sub>2</sub> yang terus meningkat seiring pembakaran bahan bakar fosil yaitu batu bara, minyak, dan gas alam akan berdampak pada perubahan iklim global, berupa suhu, kenaikan permukaan laut, pola sirkulasi atmosfer, ekosistem.

### **3. Konsep Konsumsi Bahan Bakar Fosil**

Energi merupakan faktor penting dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi, seperti konsumsi, distribusi hingga produksi semuanya membutuhkan energi. Energi sama berpengaruh pentingnya pada pertumbuhan ekonomi karena berperan strategis sebagai sumber penerimaan negara, bahan baku industri, bahan bakar dan kegiatan ekonomi lainnya. Bertambahnya jumlah penduduk dapat berpengaruh tajam pada peningkatan jumlah pengguna energi. Peningkatan konsumsi energi ini secara otomatis membuat cadangan sumber energi berbasis fosil terus berkurang jumlahnya. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi primer. Bahan bakar fosil yang banyak digunakan berupa minyak bumi, gas alam, dan batubara. Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan bahan bakar fosil semakin meningkat yang

diikuti dengan semakin menipisnya persediaan. Adapun energi baru terbarukan (EBT) terdiri dari, *geothermal*, *hydropower*, angin, solar, *biofuel*, *biomass*, biogas, dan EBT lainnya masih terbatas ketersediaannya. Melalui pengembangan energi baru terbarukan ini diharapkan menjadi sumber alternatif baru bagi permasalahan energi. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing global ekonomi, serta memberikan insentif tambahan untuk kelestarian lingkungan dan keamanan energi (Rudenko, 2018).

Konsumsi energi terjadi di berbagai sektor seperti rumah tangga, komersial, industri, dan transportasi. Semakin baik suatu negara dalam mengelola energi maka semakin efisien negara tersebut karena melalui efisiensi energi, permintaan energi harus dapat dikelola dengan baik serta berkelanjutan guna mengurangi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perencanaan dan pengembangan sektor energi yang baik mutlak diperlukan untuk dapat menjamin keberhasilan pembangunan.

#### **4. Konsep Populasi Perkotaan**

Lebih dari setengah populasi dunia sekarang tinggal di daerah perkotaan semakin banyak di kota-kota yang sangat padat. Pertumbuhan penduduk perkotaan dunia demikian cepat sehingga diperkirakan proporsi penduduk perkotaan akan terus meningkat. Perekonomian yang terpusat di kota-kota besar akan menimbulkan lonjakan perpindahan penduduk yang kebanyakan berasal dari luar daerah dengan beragam tujuan, inilah yang disebut dengan urbanisasi. Kualitas standar hidup di pusat-pusat kota tentu saja merupakan ukuran kesejahteraan yang penting sehingga menimbulkan keinginan masyarakat untuk tinggal di perkotaan. Urbanisasi memberikan pengaruh terhadap kebutuhan konsumen dan gaya hidup rumah

tangga, misalnya akan memengaruhi permintaan energi perkotaan. Aktivitas seperti penggunaan infrastruktur, penggunaan transportasi, energi, dan transisi kegiatan dari pertanian ke industri yang menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil meningkat yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan polusi lingkungan atau emisi karbon dioksida. Hal ini juga dipengaruhi oleh kuantitas populasi penduduk kota yang semakin banyak dapat menyebabkan emisi karbon dioksida di suatu negara meningkat. Tidak mengherankan bahwa pemanasan global yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia yang disebabkan oleh gas rumah kaca yang berasal dari kegiatan manusia sendiri, sebagian besar berasal dari perkotaan diperkirakan bahwa perkotaan mengonsumsi sekitar 78% energi global dan menghasilkan lebih dari 60% emisi karbon global (Habitat, 2013).

Kota merupakan sistem rumit yang komponennya saling berhubungan. Kota harus bisa bertransformasi menjadi kota rendah karbon yang menunjukkan pola pembangunan kota dan pengembangan sosial masyarakat ditujukan mengurangi emisi karbon dan mengubah perilaku konsumsi masyarakat tanpa mengorbankan keseluruhan kualitas hidupnya. Pembangunan kota rendah karbon akan gagal ketika hanya berfokus pada satu atau sebagian komponen saja seperti ekonomi, struktur industri, struktur energi, sistem transportasi, konsumsi sosial dan lainnya. Pembangunan kota harus berprinsip pada pembangunan berkelanjutan, efisiensi energi dan memanfaatkan sumber daya energi dan teknologi produksi rendah karbon juga merubah pola konsumsi dan perilaku untuk menjaga emisi GRK tetap rendah.

## 5. Konsep Kawasan Hutan

Hutan merupakan pusat global keanekaragaman hayati dan modulator penting bagi laju perubahan iklim. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengemukakan hutan berdasarkan jenisnya terdapat hutan primer, hutan yang diregenerasi secara alami dan hutan yang ditanam. Hutan primer dapat dijelaskan sebagai hutan spesies asli yang diregenerasi secara alami, di mana tidak ada indikasi aktivitas manusia yang terlihat jelas dan proses ekologis tidak terganggu secara signifikan. Selanjutnya, hutan yang diregenerasi secara alami dikatakan terdapat indikasi aktivitas manusia yang terlihat jelas. Termasuk area yang ditebang secara selektif, area yang beregenerasi setelah penggunaan lahan pertanian, area yang pulih dari kebakaran yang disebabkan oleh manusia dan lain sebagainya. Definisi hutan yang ditanam adalah sebagian besar terdiri dari pohon-pohon yang didirikan melalui penanaman atau penyemaian yang disengaja.

Deforestasi adalah penyebab hilangnya hutan dimana terjadi pemindahan total pohon untuk konversi hutan ke penggunaan lahan lain seperti pertanian, pertambangan, atau perkotaan. Hal ini mengakibatkan konversi hutan secara permanen menjadi alternatif penggunaan lahan sehingga pohon-pohon tidak diharapkan untuk tumbuh kembali di area tersebut. Deforestasi juga mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan karbon yang lebih besar dibandingkan dengan degradasi. Pendorong degradasi, termasuk penebangan dan terutama kebakaran hutan pasti dapat berdampak besar pada kesehatan hutan yang menyebabkan populasi hewan menurun, pohon dapat mati, dan CO<sub>2</sub> dipancarkan namun sifatnya sementara. Tetapi besarnya dampak ketika deforestasi terjadi adalah hampir semua karbon yang tersimpan di pepohonan dan tumbuh-tumbuhan hilang.

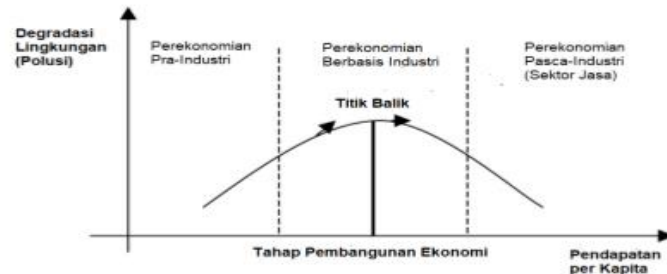
Sehingga pengurangan luasan kawasan hutan atau deforestasi dapat mengancam hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan emisi gas CO<sub>2</sub>.

## **6. Konsep Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. *Produk Domestik Bruto (PDB)* digunakan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB per kapita digunakan untuk mengukur output ekonomi rata-rata (atau pendapatan) per orang ini di negara tersebut.

*Produk Domestik Bruto (PDB)* merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu baik menggunakan perhitungan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku (PDB nominal) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tanpa penyesuaian inflasi yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan (PDB riil) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang disesuaikan dengan inflasi atau deflasi dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas harga dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan

pendekatan pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama.



**Gambar 2.4 Kurva Lingkungan Kuznets**

*Sumber: Pembangunan Ekonomi 2020*

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap degradasi lingkungan dapat dijelaskan melalui Kurva Lingkungan Kuznets atau *Environmental Kuznet Curve* (EKC) karena degradasi lingkungan dapat diukur dengan banyaknya emisi CO<sub>2</sub>. Terlihat pada gambar 2.3 EKC terbagi atas tiga tahap, yaitu pada tahap pertama yang disebut sebagai *pre-industrial economics*, tahap kedua disebut sebagai *industrial economics*, dan tahap ketiga dikenal sebagai *post-industrial economics* (*service economy*). Pembangunan ekonomi yang direpresentasikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, pada tahap awal dimana pembangunan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan industrialisasi akan diiringi dengan peningkatan kerusakan lingkungan (Panayotou, 1993). Hal ini dikarenakan perilaku dan kebutuhan masyarakat pada awalnya berusaha terus meningkatkan taraf ekonomi sehingga kurang memedulikan dampaknya terhadap keberlanjutan jangka panjang. Setelah mencapai titik PDB per kapita tertentu, perekonomian akan bertransisi ke sektor jasa yang membutuhkan eksploitasi sumber daya lebih sedikit disertai peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat, juga adaptasi teknologi yang modern serta ramah lingkungan sehingga kerusakan lingkungan akan menurun.

## 7. Konsep Indeks Globalisasi

Globalisasi merupakan proses dimana perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu sehingga mendorong perekonomian global, dan keterbukaan global terhadap pembuatan kebijakan ekonomi. globalisasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu globalisasi ekonomi merujuk pada keterbukaan perdagangan dan jasa, aliran investasi dan keuangan, globalisasi sosial merujuk pada migrasi internasional, aliran informasi dan budaya, dan globalisasi politik merujuk pada konvergensi pada sistem politik antar negara (Dreher, 2006)

Globalisasi merupakan proses dimana perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu sehingga mendorong perekonomian global, dan keterbukaan global terhadap pembuatan kebijakan ekonomi. globalisasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu globalisasi ekonomi merujuk pada keterbukaan perdagangan dan jasa, aliran investasi dan keuangan, globalisasi sosial merujuk pada migrasi internasional, aliran informasi dan budaya, dan globalisasi politik merujuk pada konvergensi pada sistem politik antar negara (Dreher, 2006). paten, pelajar internasional, *franchise* luar negeri, ekspor teknologi tinggi, dan globalisasi politik meliputi jumlah duta besar, keanggotaan organisasi internasional, partisipasi misi perdamaian. Indeks globalisasi KOF diukur dari dimensi ekonomi dengan bobot 36%, dimensi sosial 38%, dan dimensi politik 26% yang memiliki skala pengukuran 1 sampai dengan 100 semakin tinggi nilai indeks mengindikasikan bahwa tingkat globalisasi yang terjadi di suatu negara semakin tinggi. Globalisasi mengacu pada integrasi berbagai negara dari aspek ekonomi, sosial dan politik yang dapat berimplikasi terhadap lingkungan. Dengan perkembangan teknologi, perdagangan bebas, keuangan internasional, dan operasi multinasional dari

perusahaan, globalisasi telah mengubah dunia dengan cepat dan menyeluruh (Garrett, 2000).

Ekonomi hijau memiliki beberapa elemen kunci penting dalam transisinya, yaitu nilai modal alam, regulasi dan insentif ekonomi yang tepat, regulasi lingkungan dan penegakan hukum yang tepat, pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, distribusi pendapatan dan standar sosial yang adil, dan investasi dalam pelatihan dan pendidikan lingkungan (*United Nations Institute for Training and Research*, 2013). Beberapa ciri dari ekonomi hijau dalam buku yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yaitu:

- (i) peningkatan investasi hijau;
- (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau;
- (iii) peningkatan pangsa sektor hijau;
- (iv) penurunan energi/sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi;
- (v) penurunan CO<sub>2</sub> dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta
- (vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (*decrease in wasteful consumption*)

(Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2014: 20).

Ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, merupakan ciri-ciri yang disesuaikan dengan definisi ekonomi hijau UNEP. Selain itu, ciri-ciri ini dimaksudkan untuk memahami penerapan ekonomi hijau oleh suatu negara, yang dilakukan secara bertahap.

### **2.1.7 Regulasi Pemerintah**

Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017. Indonesia telah mencanangkan sejumlah strategi dalam pencapaian SDGs, diantaranya produktivitas sektor



ekonomi, perekonomian hijau, transformasi digital, relokasi atau pemindahan ibu kota. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda yang diadopsi semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Terdapat 17 SDGs yang merupakan seruan untuk bertindak bagi seluruh negara tanpa terkecuali dalam kemitraan global. Tujuan-tujuan tersebut diformasikan sebagai strategi global dalam rangka mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya yang dunia hadapi. Indonesia termasuk salah satu dari negara-negara yang berkontribusi untuk mencapai *goals* yang telah dicanangkan sebelum tahun 2030. Sebelumnya, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai wujud peran aktif pemerintah dalam mencapai SDGs tersebut.

SDGs telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Seluruh 17 goals dari SDGs didukung 7 agenda pembangunan Indonesia. Indonesia berkomitmen terhadap pembangunan nasional, khususnya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan juga *National Determined Contribution* (NDC) yang telah menjadi komitmen bersama negara anggota Perjanjian Paris. Indonesia telah menargetkan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% (*unconditional*) dan 41% (*conditional*). Untuk mewujudkan ini, kemudian dibentuk *Low Carbon Development* Indonesia (LCDI) untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca yang rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. eksistensi inisiatif pembangunan rendah karbon atau LCDI didasarkan pada pendekatan yang ilmiah, sehingga menghasilkan kontribusi kepada RPJMN 2020-2024. Bappenas sendiri

meletakkan LCDI sebagai prioritas nasional. Mengingat pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan salah satu indikator dalam pembangunan nasional. Sedangkan, ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan untuk mewujudkan LCDI termasuk transisi energi, manajemen sampah, dan membangun sektor industri hijau.

Pemerintah Indonesia dalam mencapai SDG's telah memasukan isu keberlanjutan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Indonesia melalui Peraturan Presiden No.85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Pada tahun ini, rencana kerja tahunan bertemakan mencapai pembangunan atau pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Widyawati R.F (2021)	PENGARUH FDI, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN TEKNOLOGI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI EUROPEAN UNION-18	Pertumbuhan Ekonomi, FDI, Produktivitas Tenaga Kerja, Teknologi	Hasil estimasi menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 18 negara Uni Eropa tahun 2014-2019. Ini artinya produktivitas tenaga kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi
2	Dina Sofia Aprilia, & Inaya Sari Melati	Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Modal Usaha dan Bauran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha UMKM Sentra Batik Kota Pekalongan	tenaga kerja, modal usaha, bauran pemasaran, keberhasilan usaha	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha industri batik Kelurahan Kradenan Kota Pekalongan. Hal ini berarti jumlah tenaga kerja memberikan kontribusi untuk meningkatkan keberhasilan usaha bagi industri batik Kelurahan Kradenan Kota Pekalongan. Dengan melakukan peningkatan keahlian dan ketrampilan jumlah tenaga kerja maka akan meningkatkan keberhasilan usaha.
3	Fauzi, R, (2017).	<i>Effects of Energy Consumption , Forest Areas and Economic Growth toward CO emissions in 6 (six) ASEAN</i>	Konsumsi energi, luas kawasan hutan, dan emisi CO <sub>2</sub> , Globalisasi, Urbanisasi, dan PDB perkapita.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi dengan menambahkan variabel luas kawasan hutan mempunyai pengaruh terhadap emisi CO <sub>2</sub> dengan tingkat kepercayaan terhadap model sebesar 97,84%.
4	Bakhri, M. S, (2018)	Konsumsi Energi, Pertumbuhan Ekonomi, Globalisasi dan Emisi CO <sub>2</sub> : Studi Kasus ASEAN-5	Globalisasi, PDB perkapita, dan emisi CO <sub>2</sub> , Konsumsi bahan bakar fosil, luas kawasan hutan,	Hasil dari penelitian ini adalah Konsumsi energi dan globalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap emisi CO <sub>2</sub> di ASEAN-5. Dalam dua dekade terakhir pertumbuhan ekonomi

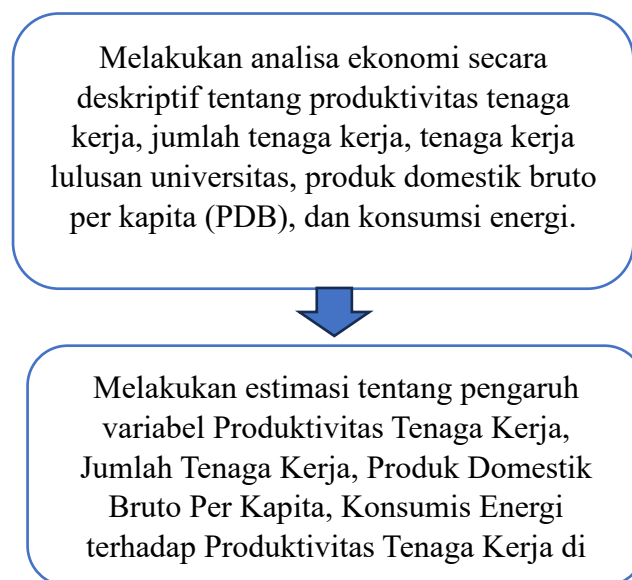
			urbanisasi, dan PDB perkapita	mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap emisi CO <sub>2</sub> di ASEAN-5.
5	Masykur, M. (2023)	Pengaruh Industri dan Urbanisasi Terhadap Emisi Karbon CO <sub>2</sub> di Negara Berkembang: Pendekatan Panel <i>Threshold</i>	Urbanisasi, emisi CO <sub>2</sub> , konsumsi bahan bakar fosil, luas kawasan hutan, globalisasi, dan PDB perkapita	Hasil dari penelitian ini adalah Industrialisasi terhadap emisi karbon CO <sub>2</sub> akan meningkat secara signifikan seiring dengan kenaikan pendapatan, namun pada tingkat emisi yang tinggi efek tersebut mengalami penurunan. Pengaruh urbanisasi terhadap emisi karbon CO <sub>2</sub> akan meningkat secara signifikan terhadap emisi karbon CO <sub>2</sub> pada setiap perkembangan ekonomi.
6	Theresia (2018)	Analisis Penerapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Pada Beberapa Anggota <i>Indonesia Global Compact Network</i> (IGCN)	SDGs, IGCN, CSR, content analysis	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dari website perusahaan dan analisis dengan content analysis. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR untuk 7 perusahaan yang menjadi subjek penelitian sudah memenuhi kriteria SDGs terutama pada aspek sosial.
7	Pujiati, D. (2022)	Penerapan Pilar Green Economy Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Ngringinrejo Bojonegoro	<i>Green economy</i> , yaitu pilar ekonomi, sosial dan ekosistem (lingkungan)	Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa agrowisata kebun belimbing Ngringinrejo memiliki dampak terhadap peningkatan ekonomi, sosial, dan ekosistem.

## 2.3 Kerangka Penelitian

### 2.3.7 Tahap Penelitian

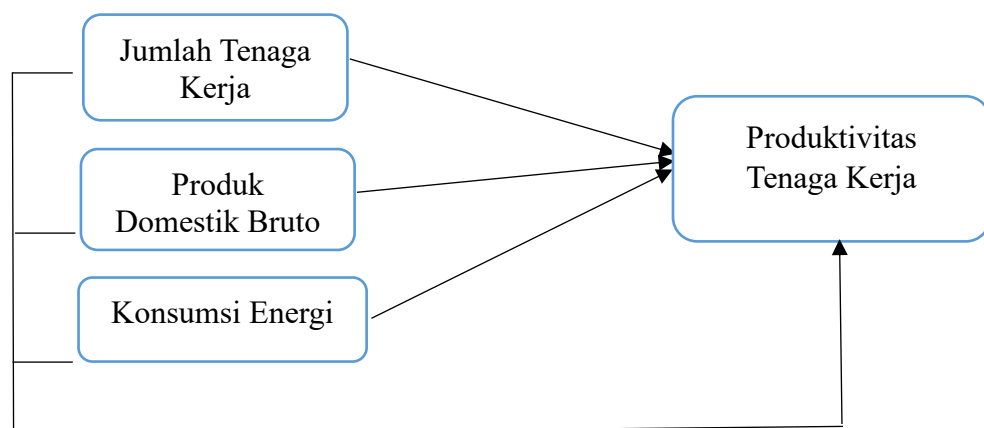
Beberapa indikator yang dianggap mempengaruhi stabilitas ekonomi yaitu produktivitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, tenaga kerja lulusan universitas, produk domestik bruto per kapita (PDB), dan konsumsi energi. Setelah dilakukan estimasi baru melihat faktor apa saja yang mempengaruhi *green economy*.

### 2.3.8 Kerangka Analisis Penelitian



Gambar 2.5 Kerangka Analisis Penelitian

### 2.3.9 Kerangka Konseptual Model Estimasi



Gambar 2.6 Bagan Kerangka Model Estimasi

Dalam Model ini, jumlah tenaga kerja, tenaga kerja lulusan universitas, produk domestik bruto perkapita, dan konsumsi energi merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap produktivitas tenaga kerja yang dimana merupakan variabel terikat.

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari jumlah tenaga kerja, produk domestik bruto perkapita, dan konsumsi energi terhadap produktivitas tenaga kerja.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari faktor-faktor green economy terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang disajikan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Data dalam penelitian ini berjenis *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut runtun waktu pada suatu variabel tertentu.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, Produk Domestik Bruto Per Kapita (PDB), dan Konsumsi Energi.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Model Ekonometrika

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
Produktivitas tenaga kerja	Rasio output total yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam suatu periode tertentu.	Variabel Terikat	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Jumlah tenaga kerja	Total individu yang bekerja dalam suatu periode tertentu di sebuah wilayah atau sektor.	Variabel bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Produk Domestik Bruto Per Kapita (PDB)	Nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk.	Variabel bebas	<a href="http://www.worldbank.org">www.worldbank.org</a>
Konsumsi Energi	Jumlah total energi yang digunakan, diukur dalam terajoule atau setara minyak.	Variabel bebas	<a href="http://www.esdm.go.id">www.esdm.go.id</a> <a href="http://www.iea.org">www.iea.org</a>

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Indonesia dengan melihat data yang dipublikasi oleh lembaga resmi terkait.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan direncanakan selama 3 bulan dimulai dari April hingga Juni 2024.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder pada



penelitian ini menggunakan data time series (runtun waktu) yang dimulai dari tahun 2013-2023.

#### **b. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbud, UNESCO, World Bank GDP, Kementerian ESDM, dan IEA Energy Consumption.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui website-website resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbud, UNESCO, *World Bank* GDP, Kementerian ESDM, dan *IEA Energy Consumption* dengan kurun waktu selama 10 tahun (2013-2023).

### **3.6 Model Estimasi**

Penelitian ini mengenai faktor *green economy* pasca penerapan SDGs yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data *times series* dari tahun 2019-2023. Model Ekonometrika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PTK_t = \beta_0 + \beta_1 JTK_t + \beta_2 PDB_t + \beta_3 Ket + \epsilon_t$$

Dimana:

- PTK<sub>t</sub> : Produktivitas tenaga kerja ( juta orang )  
 JTK<sub>t</sub> : Jumlah Tenaga Kerja ( juta orang )  
 PDB<sub>t</sub> : Produk Domestik Bruto Per Kapita (PDB) ( juta )  
 Ket : Konsumsi Energi ( Milyar )  
 β<sub>0</sub> : Konstanta  
 β<sub>1</sub> – β<sub>4</sub> : Koefisien

$t$  : Unit Waktu (2019-2023)

$\epsilon_t$  : *term of error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesa penelitian.

### 3.7 Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variabel yang diamati menggunakan data *time series* dalam kurun waktu 10 tahun (dari tahun 2013 sampai 2023). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (*Ordinary Least Square*) dalam bentuk regresi linier berganda (*multiple regression model*) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami. Asumsi yang mendasari model regresi linier menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata disturbance term = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (serial auto correlation) diantara disturbanceterm  $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
3. Sifat momocidentecity dari disturbance term  $Var(\epsilon^i) = \sigma^2$
4. Covariance antar  $\epsilon^i$  dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan
6. Tidak terdapat collinearity antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.

Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi gauss-markov), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*) (Gujarati, 2016).

### **3.8 Teknik Analisis Data**

#### **3.8.1 Metode Analisis Ekonomi Deskriptif**

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan indikator *green economy* pasca penerapan SDGs.

#### **3.8.2 Analisis Model Ekonometrika**

##### **A. Tahapan Analisis**

##### **1. Penaksiran**

##### **a. Kolerasi (R)**

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf  $r$  dimana bervariasi mulai  $-1$  sampai  $+1$ . Nilai  $r = -1$  atau  $+1$  menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai  $r = 0$ , mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda  $+$  (positif) dan  $-$  (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

### **b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted*  $R^2$  (Kuncoro, 2018).

## **2. Pengujian (Test diagnostic)**

### **a. Uji Parsial (Uji t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013).

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh produktivitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, tenaga kerja lulusan universitas, produk domestik bruto per kapita (PDB), dan konsumsi energi secara individual terhadap *green economy* pasca penerapan SDGs. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Perumusan Hipotesis**

Hipotesis  $H_0 : \beta_1 - \beta_4 = 0$  (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel produktivitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, tenaga kerja lulusan universitas, produk domestik bruto per kapita (PDB), dan konsumsi energi terhadap *green economy* pasca penerapan SDGs di Indonesia tahun 2013-2023).

Hipotesis  $H_a : \beta_1 - \beta_4 \neq 0$  (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel produktivitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, tenaga kerja lulusan universitas, produk domestik bruto per kapita (PDB), dan konsumsi energi terhadap *green economy* pasca penerapan SDGs di Indonesia tahun 2013-2023).

2. Uji statistik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah:

$$t_h = \frac{\beta_i}{Se-\beta_i}$$

Dimana:

$\beta_1$  = Produktivitas tenaga kerja

$\beta_2$  = Jumlah tenaga kerja

$\beta_3$  = Produk domestik bruto per kapita (PDB)

$\beta_4$  = Konsumsi energi

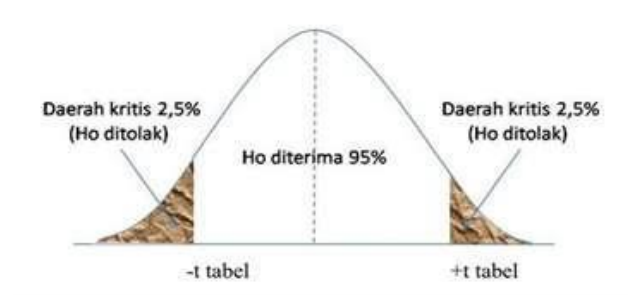
Se  $\beta_i$  = Standar error

Nilai t hitung akan dibandingkan dengan tabel =  $\pm t (\alpha / 2, n - 1)$

dengan derajat kesalahan  $\alpha$  pada tingkat 1%, 5%, 10%, dan 15%.

3. Kriteria Uji

Terima  $H_0$  jika  $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$  atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Uji t-hitung**

4. Kesimpulan: Sesuai kriteria uji maka terima  $H_0$  atau tolak  $H_0$

## b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh produktivitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, tenaga kerja lulusan universitas, produk domestik bruto per kapita (PDB), dan konsumsi energi secara individual terhadap *green economy* pasca penerapan SDGs. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Perumusan Hipotesis

Hipotesis H<sub>0</sub> :  $\beta_1 - \beta_4 = 0$  (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel produktivitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, tenaga kerja lulusan universitas, produk domestik bruto per kapita (PDB), dan konsumsi energi terhadap *green economy* pasca penerapan SDGs di Indonesia tahun 2013-2023).

Hipotesis H<sub>a</sub> :  $\beta_1 - \beta_4 \neq 0$  (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel produktivitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, tenaga kerja lulusan universitas, produk domestik bruto per kapita (PDB), dan konsumsi energi terhadap *green economy* pasca penerapan SDGs di Indonesia tahun 2013-2023).

2. Uji stastistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

$$F = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel = F ( $\alpha$ , n - k - 1)

dengan derajat kesalahan  $\alpha$  pada tingkat 1%, 5%, 10%, dan 15%.

### 3. Kriteria uji

Terima jika  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$ . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **c. Uji Asumsi Klasik**

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

#### **a) Autokorelasi**

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik

menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada  $2 < DW < 4$ -du maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2003).

### **b) Multikolinieritas**

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2003).

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinieritas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendekteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih dari  $R^2$  regresi *auxiliary* maka didalam model ini tidak terjadi multikolinieritas.

### **c) Heterokedastisitas**

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.



Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R<sup>2</sup> yang didapat digunakan untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$  (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observation R - Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditola

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Indonesia**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan dan 95° – 141° Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, Indonesia terdapat 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota dengan luas wilayah daratan secara keseluruhan sebesar 1.892.555,47 km<sup>2</sup> dengan total populasi pada Semester I Tahun 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan.

Luas lautan Indonesia sekitar 3.273.810 km<sup>2</sup> dan memiliki batas 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif sebesar 200 mil. Batas ujung barat Indonesia ialah Sabang; ujung timur adalah Merauke; ujung utara adalah Miangas; ujung selatan adalah Pulau Rote. Indonesia memiliki iklim tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau serta berada di belahan timur bumi. Indonesia memiliki 3 pembagian daerah waktu, yaitu WIB (Waktu Indonesia bagian Barat), WITA (Waktu Indonesia bagian Tengah), dan WIT (Waktu Indonesia bagian Timur).

#### 4.1.2 Kondisi Demografi Indonesia

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta jiwa atau 50,58% dari total penduduk Indonesia. Sementara, total penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta jiwa atau sebanyak 49,42 persen dari penduduk di Indonesia. Indonesia memiliki penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang terus meningkat sejak tahun 1971.

Rentang usia dibagi dalam 6 generasi, yaitu Post Generasi Z (lahir 2013 – sekarang) 10,88% dari total populasi penduduk di Indonesia, Generasi Z (lahir tahun 1997 – 2012) sebanyak 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,95% dari total seluruh populasi penduduk Indonesia, Generasi Milenial (lahir tahun 1981 – 1996) jumlah penduduk generasi millennial sebanyak 69,38 juta jiwa atau sebesar 25,87%, Generasi X (lahir 1965 - 1980) sebanyak 21,88%, Baby Boomer (lahir tahun 1946 – 1964) 11,56%, dan Pre-Boomer (lahir sebelum tahun 1945) 1,87% dari total populasi penduduk di Indonesia.



**Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Indonesia (2019-2023)**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) ( [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), diolah 2024

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 266,9 juta jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk yang stabil pada periode ini mencerminkan tren kelahiran yang masih tinggi, meskipun ada upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui berbagai program keluarga berencana.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk meningkat menjadi 270,2 juta jiwa. Peningkatan ini menandai tambahan sekitar 3,3 juta jiwa dalam satu tahun. Tahun 2020 juga dikenal dengan awal merebaknya pandemi COVID-19, yang berdampak luas pada aspek kesehatan dan ekonomi. Namun, dampak pandemi terhadap jumlah penduduk tidak terlalu signifikan pada tahun ini, meskipun ada peningkatan mortalitas dan perubahan dalam dinamika sosial.

Tahun 2021 mencatat jumlah penduduk sebesar 272,7 juta jiwa, dengan pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan sebesar 2,5 juta jiwa ini masih berada dalam tren pertumbuhan alami, meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Program vaksinasi dan penanganan pandemi mulai menunjukkan dampak positif, yang memungkinkan kehidupan sosial dan ekonomi untuk berangsur pulih.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk terus meningkat menjadi 275,7 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini mencerminkan stabilitas demografis dan keberlanjutan populasi yang cukup konsisten. Pada periode ini, ekonomi mulai bangkit kembali dengan lebih kuat, didukung oleh pemulihan di berbagai sektor yang sebelumnya terdampak pandemi.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278,8 juta jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan populasi yang tetap stabil, meskipun pada tingkat yang sedikit lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk yang terjadi dalam lima tahun terakhir ini juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait dengan penyediaan layanan publik, perumahan, dan lapangan kerja.

**Tabel 4.1 Ketenagakerjaan Indonesia**

Komponen	Tahun		
	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	140,15	143,73	147,71
Bekerja	131,05	135,30	139,85
Pengangguran Terbuka	9,10	8,42	7,86

Sumber: BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Angkatan Kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Berdasarkan definisi tersebut, pada periode 2021 s.d. 2023 jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebanyak 7,56 juta orang atau sekitar 5,39 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia.

Berdasarkan kegiatannya, angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2023 jumlah penduduk bekerja mencapai 140 juta orang. Jumlah ini meningkat sekitar 8,8 juta orang atau sekitar 6,71 persen pada periode 2021 s.d. 2023.

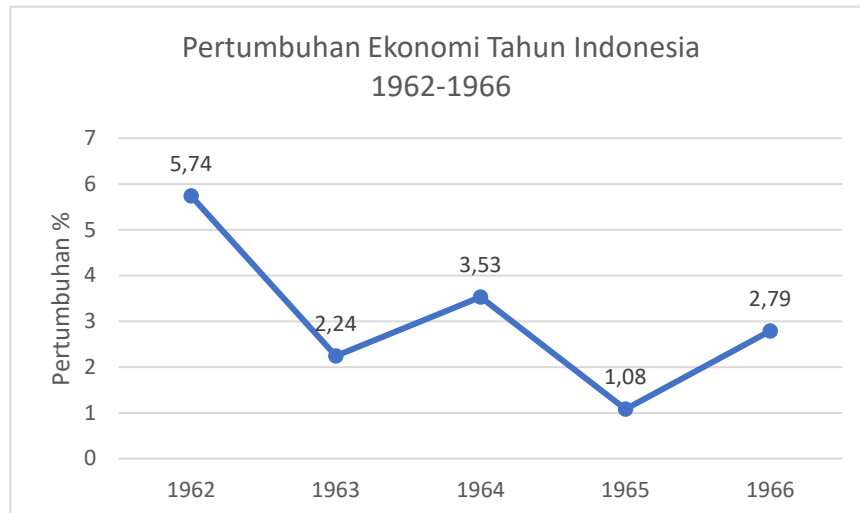
Pengangguran terbuka meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan definisi tersebut, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia terus menurun dalam sebanyak 1,24 juta orang pada tahun 2021 s.d. 2023. Begitupun dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), turun sekitar 1,17 persen pada periode yang sama.

#### **4.2.1 Perkembangan Ekonomi Di Indonesia Dari Masa Orde Baru Sampai Dengan Era Sekarang**

Perkembangan ekonomi Indonesia dari masa Orde Baru (Orba) hingga era sekarang dapat dibagi menjadi beberapa fase penting, yang masing-masing menunjukkan karakteristik dan tantangan yang berbeda.

##### **1. Masa Orde Baru**

Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Orde Baru berfokus pada stabilisasi ekonomi setelah periode inflasi tinggi dan ketidakstabilan pada masa Demokrasi Terpimpin. Kebijakan-kebijakan ekonomi diarahkan untuk menurunkan inflasi, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan menarik investasi asing. Orba dikenal dengan program pembangunan lima tahun (REPELITA) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. Sektor pertanian juga mendapat perhatian melalui program intensifikasi pangan seperti "Bimbingan Massal (BIMAS)."



**Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1962-1966**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) ( [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), diolah 2024

Pada tahun 1962, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,74%. Ini merupakan angka yang relatif tinggi, mengindikasikan adanya aktivitas ekonomi yang kuat, meskipun masih dalam konteks ekonomi yang berorientasi pada sektor primer seperti pertanian dan ekspor bahan mentah. Namun, tingginya pertumbuhan ini belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara luas, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

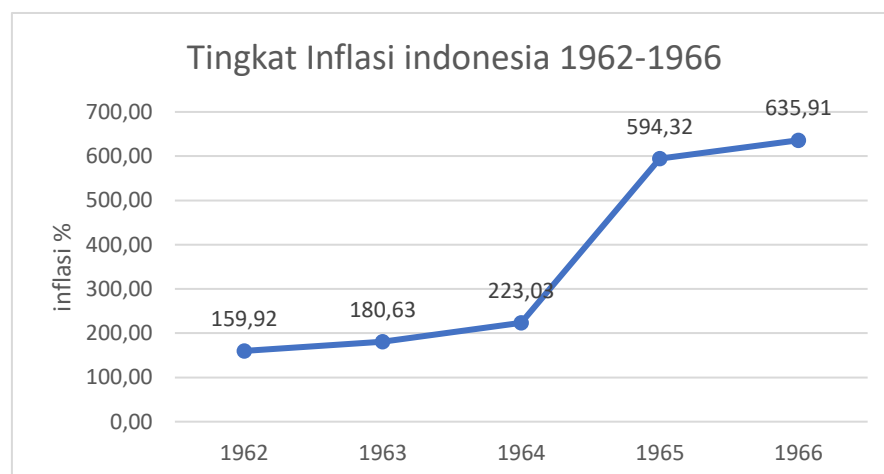
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1963 turun drastis menjadi 2,24%. Penurunan ini terjadi karena ketidakpastian politik yang semakin meningkat dan mulai munculnya masalah ekonomi yang serius, termasuk inflasi yang tinggi dan defisit anggaran yang membengkak. Situasi ini menyebabkan berkurangnya investasi dan aktivitas ekonomi, yang berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 1964, pertumbuhan ekonomi sedikit pulih menjadi 3,53%. Meskipun ada peningkatan, angka ini masih jauh dari ideal untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Ketegangan politik yang terus meningkat, serta

kebijakan ekonomi yang tidak efektif, membatasi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa ini. Meskipun demikian, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tahun 1965 mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, hanya sebesar 1,08%. Ini menandai puncak dari krisis ekonomi dan politik di Indonesia, di mana inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan terjadi ketidakstabilan sosial yang meluas. Keterbatasan sumber daya ekonomi dan tekanan eksternal memperburuk situasi ekonomi nasional, menyebabkan hampir terhentinya pertumbuhan.

Pada tahun 1966, pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat menjadi 2,79%, namun masih dalam kondisi yang jauh dari normal. Tahun ini menandai awal dari perubahan besar dalam kebijakan ekonomi, dengan upaya untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan situasi politik. Meskipun demikian, tantangan ekonomi masih sangat besar, dan pemulihan yang sebenarnya baru akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya setelah adanya perubahan dalam pemerintahan dan kebijakan ekonomi.



**Gambar 4.3 Tingkat inflasi Indonesia Tahun 1962-1966**  
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) ( [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), diolah 2024



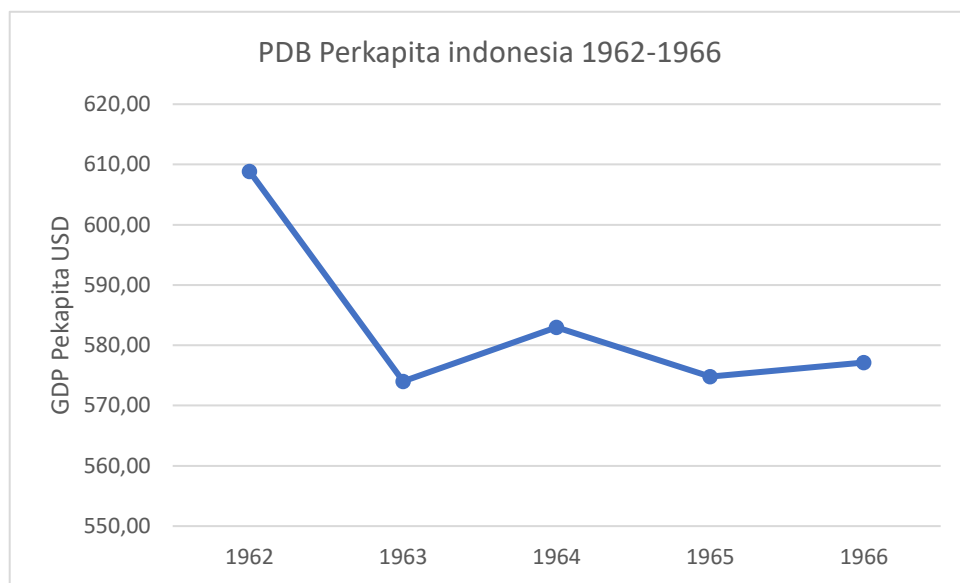
Pada tahun 1962, tingkat inflasi di Indonesia mencapai 159,92%. Ini menandai awal dari periode inflasi yang sangat tinggi di negara ini. Inflasi yang tinggi pada tahun ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal yang tidak terkendali, peningkatan pengeluaran pemerintah yang tidak seimbang dengan penerimaan, serta kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Meskipun demikian, inflasi pada tahun ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan, meskipun sangat merugikan daya beli masyarakat.

Tahun 1963 mencatat peningkatan inflasi menjadi 180,63%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa masalah inflasi semakin memburuk, dengan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. Kebijakan moneter yang tidak efektif dan terus meningkatnya pengeluaran pemerintah tanpa dukungan pendapatan yang memadai memperburuk situasi. Selain itu, ketidakpastian politik juga mulai mempengaruhi kepercayaan publik dan pasar, yang pada gilirannya mendorong inflasi lebih tinggi.

Pada tahun 1964, inflasi terus meningkat tajam menjadi 223,03%. Ini mencerminkan kondisi ekonomi yang semakin tidak terkendali, dengan harga-harga barang dan jasa meningkat secara eksponensial. Masyarakat mengalami penurunan daya beli yang signifikan, dan banyak bisnis menghadapi kesulitan dalam menjaga operasional mereka karena biaya yang terus meningkat. Kebijakan pemerintah yang gagal mengekang inflasi dan ketidakmampuan untuk menstabilkan ekonomi semakin memperparah situasi.

Pada tahun 1966, inflasi mencapai puncaknya dengan tingkat 635,91%. Ini merupakan salah satu tingkat inflasi tertinggi yang pernah dialami oleh Indonesia.

Pada tahun ini, kondisi ekonomi sangat kritis, dan inflasi yang ekstrem menyebabkan kesulitan yang sangat besar bagi masyarakat. Banyak orang kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, dan ketidakstabilan sosial semakin meningkat. Pemerintah mulai menyadari urgensi untuk melakukan reformasi ekonomi yang radikal untuk mengendalikan situasi ini, meskipun upaya tersebut baru mulai menunjukkan hasil di tahun-tahun berikutnya.



**Gambar 4.4 PDB Perkapita Tahun 1962-1966**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

Pada tahun 1962, PDB per kapita Indonesia tercatat sebesar 608,87 Rupiah. Angka ini mencerminkan ekonomi Indonesia yang pada masa itu masih cukup stabil, meskipun tantangan dalam pembangunan nasional tetap ada. Tahun ini bisa dianggap sebagai titik awal dari analisis, dengan kondisi ekonomi yang masih relatif baik dibandingkan tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 1963, PDB per kapita mengalami penurunan menjadi 574,02 Rupiah. Penurunan ini mungkin mencerminkan adanya tekanan ekonomi, seperti penurunan produktivitas atau awal dari ketidakstabilan ekonomi yang mulai

dirasakan. Perubahan ini bisa jadi merupakan indikasi awal dari masalah ekonomi yang lebih besar yang akan muncul dalam beberapa tahun ke depan.

Tahun 1964 mencatat sedikit peningkatan dalam PDB per kapita, menjadi 582,98 Rupiah. Meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya, angka ini tetap berada di bawah level tahun 1962, yang menunjukkan bahwa ekonomi masih belum pulih sepenuhnya. Peningkatan kecil ini bisa diartikan sebagai hasil dari upaya stabilisasi yang dilakukan, meskipun tantangan ekonomi tetap ada.

Pada tahun 1965, PDB per kapita kembali mengalami penurunan menjadi 574,82 Rupiah. Penurunan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang tidak stabil, terutama dengan latar belakang ketegangan politik yang memuncak di tahun ini. Penurunan ini juga mungkin mencerminkan dampak dari inflasi atau krisis ekonomi yang mulai mempengaruhi daya beli masyarakat.

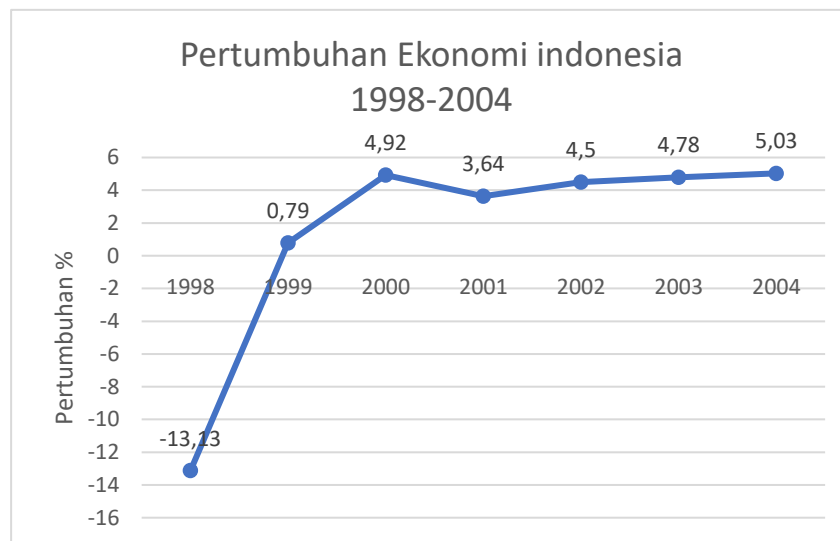
Tahun 1966 menunjukkan sedikit peningkatan dalam PDB per kapita, mencapai 577,15 Rupiah. Meskipun ada peningkatan dari tahun 1965, angka ini tetap jauh dari PDB per kapita yang tercatat pada tahun 1962. Tahun ini juga ditandai dengan pergantian pemerintahan dan upaya stabilisasi ekonomi, yang meskipun menunjukkan hasil, belum cukup untuk mengembalikan ekonomi ke kondisi yang lebih stabil

## **2. Masa Reformasi**

Setelah jatuhnya Soeharto, pemerintahan baru di bawah Presiden B.J. Habibie, dan kemudian Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, fokus pada pemulihan ekonomi. Pemerintah bekerja sama dengan IMF untuk

menstabilkan ekonomi, yang melibatkan restrukturisasi perbankan dan reformasi ekonomi.

Era Reformasi juga ditandai oleh proses demokratisasi dan desentralisasi, yang memberi otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, ini juga membawa tantangan baru dalam pengelolaan ekonomi di tingkat lokal. Ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan kembali ke jalur positif. Namun, pemulihan ini masih rapuh dan dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik.



**Gambar 4.5 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1998-2004**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang sangat parah dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -13,13%. Krisis Keuangan Asia yang dimulai pada 1997 berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, menyebabkan penurunan tajam dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Penurunan ini dipicu oleh devaluasi Rupiah, lonjakan inflasi, krisis perbankan, dan ketidakstabilan politik yang memperburuk keadaan.

Tahun 1999 menandai awal pemulihan ekonomi Indonesia, meskipun dengan pertumbuhan yang sangat lambat yaitu sebesar 0,79%. Periode ini ditandai

dengan stabilisasi nilai tukar, pemulihan parsial dalam sektor keuangan, dan upaya restrukturisasi ekonomi. Meskipun pertumbuhan masih rendah, ini merupakan titik balik dari resesi yang dialami pada tahun sebelumnya.

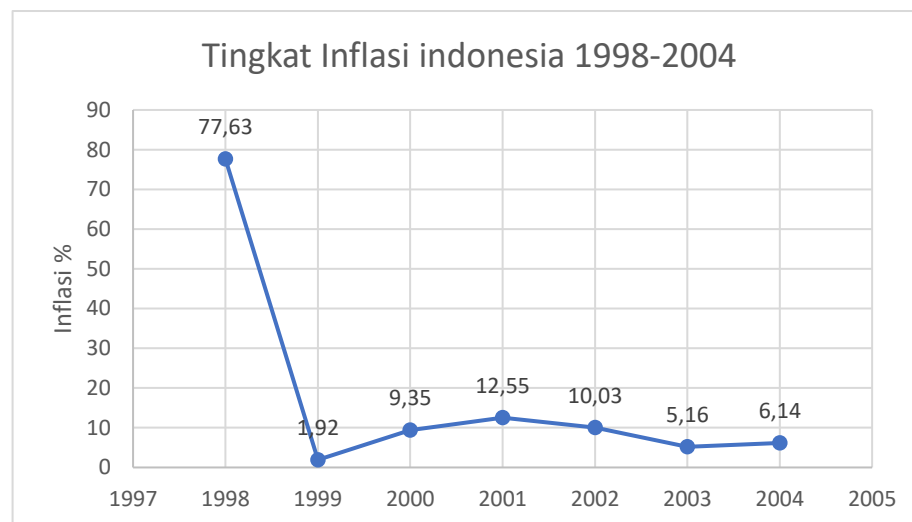
Pada tahun 2000, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih kuat dengan pertumbuhan sebesar 4,92%. Perbaikan dalam sektor perbankan, peningkatan investasi asing, serta reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah mulai membuahkan hasil. Kepercayaan pasar mulai pulih, dan sektor-sektor utama ekonomi kembali menunjukkan pertumbuhan.

Pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,64%. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh ketidakpastian politik di dalam negeri serta fluktuasi harga komoditas global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif, menunjukkan bahwa pemulihan masih berlanjut.

Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4,5%. Stabilitas politik yang lebih baik dan peningkatan harga komoditas, terutama minyak dan gas, mendorong peningkatan kinerja ekonomi. Pemerintah juga terus melanjutkan reformasi struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi dan menarik lebih banyak investasi.

Tahun 2003 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78%. Tahun ini menandai konsolidasi pemulihan ekonomi pasca-krisis, dengan sektor-sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa yang kembali menunjukkan kinerja yang solid. Kebijakan moneter dan fiskal yang lebih stabil juga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03%, yang merupakan angka tertinggi sejak krisis 1997-1998. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah pulih dari dampak krisis dan kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Peningkatan dalam konsumsi domestik, ekspor, serta investasi terus mendorong pertumbuhan ekonomi selama periode ini.



**Gambar 4.6 Tingkat inflasi Indonesia Tahun 1998-2004**  
 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) ( [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), diolah 2024

Pada tahun 1998, tingkat inflasi Indonesia mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 77,63%. Inflasi yang melonjak tajam ini merupakan dampak langsung dari Krisis Keuangan Asia yang melanda Indonesia. Krisis ini menyebabkan depresiasi tajam nilai tukar Rupiah, kenaikan harga impor, dan lonjakan biaya produksi. Selain itu, ketidakstabilan politik dan ekonomi memperburuk kondisi, membuat harga-harga barang dan jasa meningkat drastis.

Pada tahun 1999, tingkat inflasi turun drastis menjadi 1,92%. Penurunan ini mencerminkan stabilisasi ekonomi setelah puncak krisis, dimana nilai tukar Rupiah mulai stabil, dan tekanan inflasi dari sisi biaya produksi serta harga barang impor mulai mereda.

Pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat untuk mengekang laju inflasi, yang berkontribusi pada penurunan signifikan ini.

Pada tahun 2000, tingkat inflasi kembali meningkat menjadi 9,35%. Kenaikan ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, yang meningkatkan permintaan barang dan jasa. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga-harga yang diatur, seperti tarif listrik dan bahan bakar, juga turut mendorong inflasi pada tahun ini.

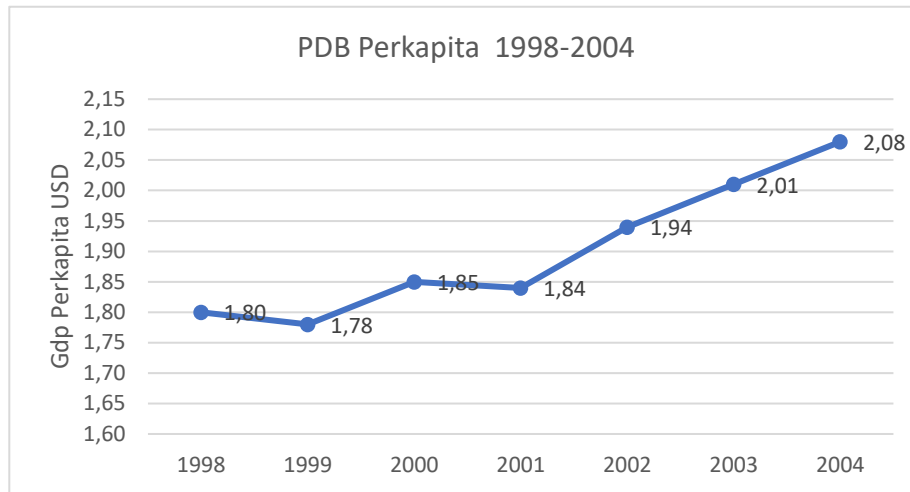
Tahun 2001 mencatat tingkat inflasi sebesar 12,55%. Inflasi yang tinggi pada tahun ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dan politik, serta tekanan dari kenaikan harga komoditas global, terutama minyak. Di sisi lain, pemulihan ekonomi yang belum merata juga menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa.

Pada tahun 2002, tingkat inflasi sedikit menurun menjadi 10,03%. Meskipun masih berada pada tingkat yang cukup tinggi, penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang lebih ketat serta pengendalian harga komoditas strategis. Selain itu, stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya juga membantu meredam inflasi.

Tahun 2003 mencatat penurunan inflasi menjadi 5,16%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan mulai memberikan hasil yang lebih nyata. Selain itu, adanya stabilitas dalam harga-harga barang konsumsi utama dan perbaikan pada sisi penawaran turut mendukung penurunan laju inflasi.

Pada tahun 2004, tingkat inflasi sedikit meningkat menjadi 6,14%. Meskipun ada sedikit kenaikan, inflasi tetap berada dalam kisaran yang lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh penyesuaian harga

bahan bakar dan komoditas lain di pasar domestik. Namun, secara umum, stabilitas ekonomi yang terus membaik membantu menjaga inflasi pada tingkat yang moderat.



**Gambar 4.7 PDB Perkapita Tahun 1998-2004**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

Pada tahun 1998, PDB per kapita Indonesia tercatat sebesar 1,8 juta Rupiah. Angka ini menunjukkan dampak signifikan dari krisis ekonomi yang menyebabkan kontraksi ekonomi yang tajam. Penurunan PDB per kapita pada tahun ini mencerminkan kondisi ekonomi yang sangat tertekan, di mana banyak sektor mengalami perlambatan aktivitas dan investasi.

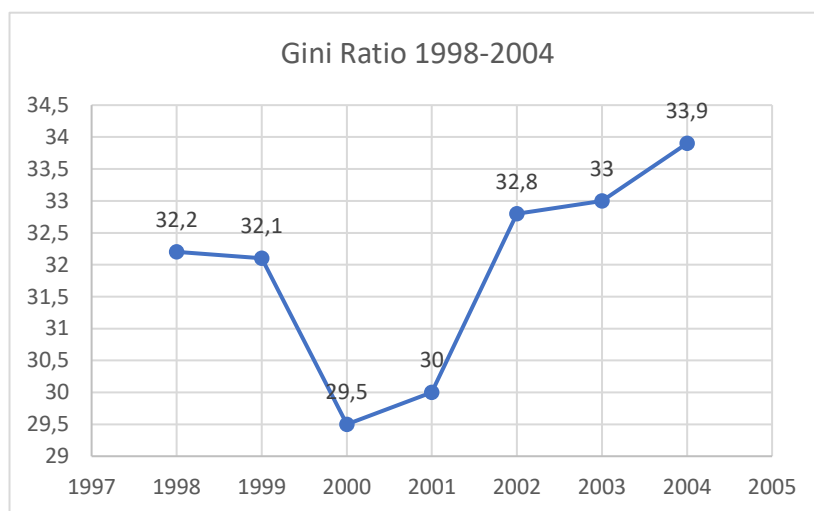
Tahun 1999, terdapat tanda-tanda pemulihan meskipun perlahan. PDB per kapita sedikit menurun menjadi 1,78 juta Rupiah, tetapi hal ini menunjukkan stabilisasi awal setelah guncangan krisis.

Pada tahun 2000, PDB per kapita mulai menunjukkan peningkatan menjadi 1,85 juta Rupiah, yang mencerminkan perbaikan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk ekspor, industri, dan investasi domestik. Pada tahun 2001, PDB per kapita meningkat menjadi 1,89 juta Rupiah, kemudian menjadi 1,94 juta Rupiah pada tahun 2002, dan terus naik menjadi 2,01 juta Rupiah pada tahun 2003. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan



kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam memulihkan kepercayaan pasar serta meningkatkan stabilitas makroekonomi.

Puncaknya, pada tahun 2004, PDB per kapita mencapai 2,08 juta Rupiah. Kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia telah berhasil pulih dari krisis dan mulai memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil. Peningkatan PDB per kapita juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum.



**Gambar 4.8 Gini Ratio Tahun 1998-2004**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

Pada tahun 1998, Gini rasio Indonesia tercatat sebesar 32,2. Angka ini mencerminkan tingkat ketimpangan yang moderat dalam distribusi pendapatan di tengah krisis ekonomi yang melanda Asia, termasuk Indonesia. Pada tahun 1999, Gini rasio sedikit menurun menjadi 32,1, namun perubahan ini tidak signifikan, menandakan bahwa distribusi pendapatan relatif stabil meskipun ekonomi sedang mengalami tekanan.

Tahun 2000 menunjukkan penurunan yang cukup tajam pada Gini rasio, dengan angka 29,5. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, yang mungkin disebabkan oleh berbagai upaya pemerintah dalam menstabilkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat setelah krisis. Pada tahun 2001, Gini rasio

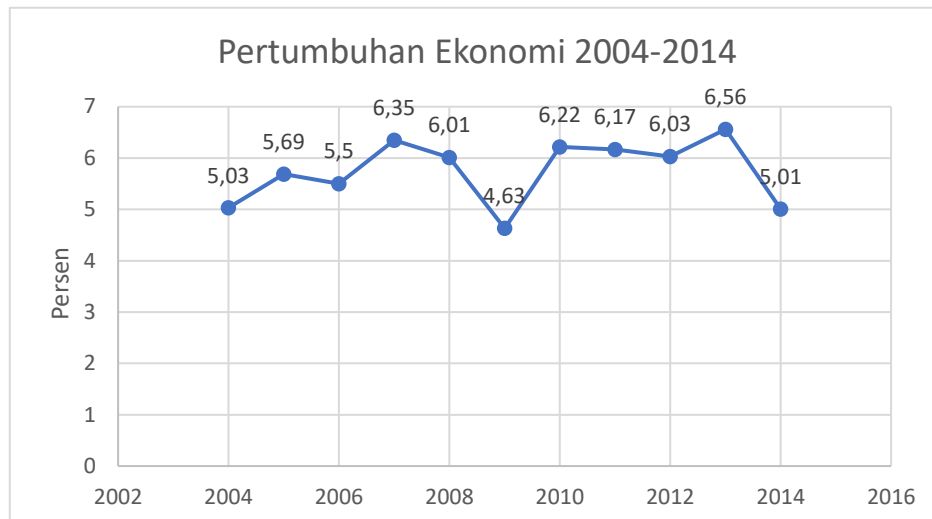
mengalami sedikit peningkatan menjadi 30, namun masih lebih rendah dibandingkan periode 1998-1999. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan ketimpangan, tingkatnya masih terkendali.

Memasuki tahun 2002, Gini rasio kembali meningkat signifikan menjadi 32,8. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan, yang mungkin disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang tidak merata, di mana kelompok masyarakat tertentu mulai pulih lebih cepat dibandingkan yang lain.

Pada tahun 2003, Gini rasio Indonesia naik sedikit menjadi 33, menunjukkan tren peningkatan ketimpangan yang berlanjut. Tren ini mencapai puncaknya pada tahun 2004, dengan Gini rasio sebesar 33,9, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Peningkatan ini mencerminkan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat di Indonesia, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perbedaan akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan.

### **3. Era SBY (2004-2014)**

Di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekonomi Indonesia menikmati periode stabil dengan pertumbuhan yang solid, rata-rata sekitar 5-6% per tahun. Peningkatan investasi asing dan ekspor, terutama komoditas, berkontribusi pada pertumbuhan ini. Program-program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Meski demikian, ketimpangan masih menjadi isu besar. Ekonomi Indonesia relatif tangguh menghadapi krisis keuangan global 2008, sebagian besar karena permintaan domestik yang kuat dan kebijakan moneter yang bijaksana.



**Gambar 4.9 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004-2014**

Sumber : world bank ( [www. data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03%. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian mulai mengalami akselerasi setelah periode pemulihan pasca krisis ekonomi akhir 1990-an. Tahun 2005 mencatat peningkatan pertumbuhan yang signifikan menjadi 5,69%, mencerminkan momentum positif dalam perekonomian nasional yang didorong oleh peningkatan investasi dan konsumsi domestik.

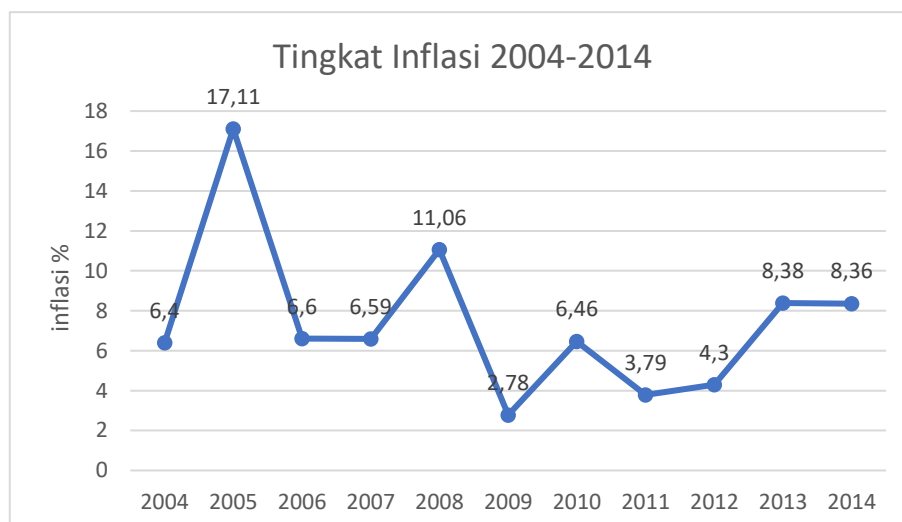
pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 5,5%. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini tetap mencerminkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat tajam menjadi 6,35%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan harga komoditas di pasar global serta investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan sektor-sektor strategis.

Pada tahun 2008, meskipun masih tinggi, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 6,01%. Ini sebagian disebabkan oleh dampak awal dari krisis keuangan global yang mulai mempengaruhi ekonomi dunia. Dampaknya semakin terlihat pada tahun 2009, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia turun cukup signifikan menjadi 4,63%.

Penurunan ini mencerminkan dampak dari ketidakstabilan global yang mempengaruhi ekspor dan aliran modal ke dalam negeri.

pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat menjadi 6,22%. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, dengan angka 6,17% pada tahun 2011 dan 6,03% pada tahun 2012. Stabilitas ini mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat, didukung oleh konsumsi domestik yang terus meningkat dan investasi yang berkelanjutan.

Puncaknya, pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,56%, yang merupakan angka tertinggi dalam dekade tersebut. Namun, pada tahun 2014, pertumbuhan kembali melambat menjadi 5,01%, yang sebagian besar disebabkan oleh perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian dalam pasar komoditas.



**Gambar 4.10 Tingkat inflasi Tahun 2004-2014**

Sumber : world bank ( [www. data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

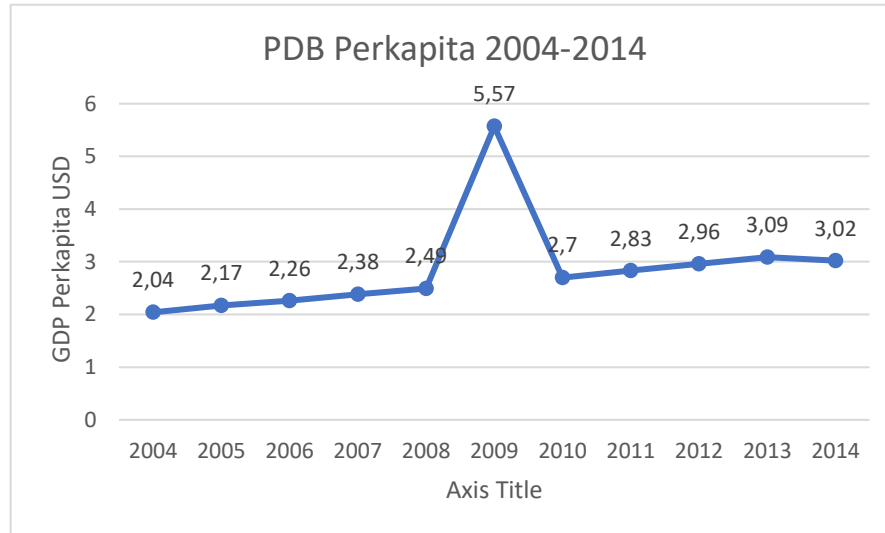
Pada tahun 2004, tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 6,4%. Angka ini mencerminkan stabilitas harga yang cukup terkendali, sejalan dengan kondisi perekonomian yang mulai pulih dan tumbuh dengan stabil. Namun, pada tahun 2005, inflasi mengalami lonjakan tajam mencapai 17,11%. Peningkatan drastis ini sebagian besar

disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

Setelah lonjakan yang signifikan pada tahun 2005, tingkat inflasi kembali terkendali pada tahun 2006, turun menjadi 6,6%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa dampak dari kenaikan BBM sebelumnya mulai mereda, dan harga-harga kembali ke tingkat yang lebih stabil. Tahun-tahun berikutnya, yaitu 2007 dan 2008, mencatat tingkat inflasi yang relatif stabil di kisaran 6,59% dan 11,06% masing-masing. Kenaikan pada tahun 2008 sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga komoditas global, termasuk pangan dan energi, yang mempengaruhi harga domestik.

Tahun 2009 mencatat penurunan inflasi yang signifikan menjadi 2,78%, yang merupakan tingkat inflasi terendah dalam periode ini. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh melemahnya permintaan global akibat krisis keuangan global, yang mengurangi tekanan inflasi di dalam negeri. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, inflasi kembali meningkat, mencapai 6,46% pada tahun 2010, 3,79% pada 2011, dan 4,3% pada 2012, mencerminkan peningkatan permintaan domestik seiring dengan pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2013, inflasi melonjak kembali menjadi 8,38%, diikuti dengan inflasi sebesar 8,36% pada tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga BBM, serta tekanan dari sisi penawaran akibat gangguan pasokan bahan pangan dan energi.



**Gambar 4.11 PDB Perkapita Tahun 2004-2014**

Sumber : world bank ( [www. data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

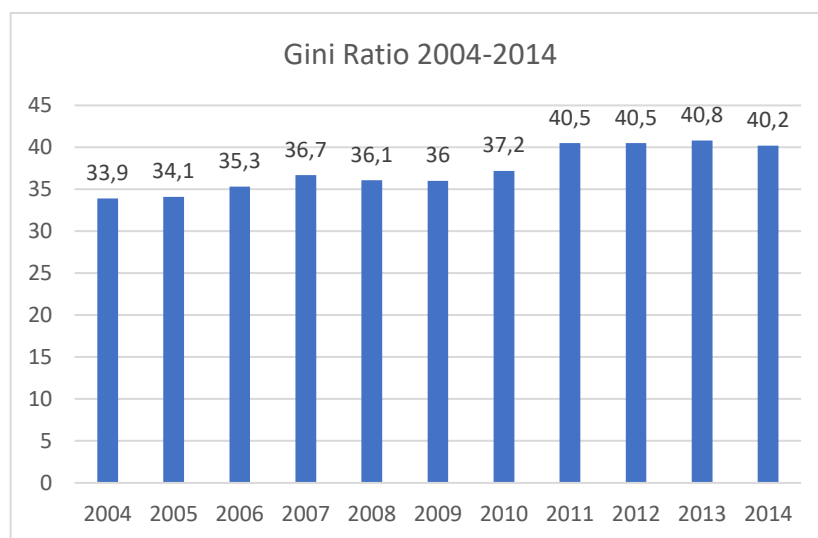
Pada tahun 2004, PDB per kapita Indonesia tercatat sebesar 2,04 juta Rupiah. Angka ini menandakan awal dari fase pertumbuhan yang lebih stabil setelah Indonesia berhasil mengatasi dampak krisis ekonomi akhir 1990-an. Pada tahun berikutnya, yaitu 2005, PDB per kapita meningkat menjadi 2,17 juta Rupiah, dan tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2006 dengan angka 2,26 juta Rupiah. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan yang berkesinambungan dalam perekonomian Indonesia, didorong oleh pertumbuhan di sektor-sektor utama seperti industri, jasa, dan investasi.

Pada tahun 2007, PDB per kapita kembali meningkat menjadi 2,38 juta Rupiah, diikuti oleh kenaikan menjadi 2,49 juta Rupiah pada tahun 2008. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia terus mengalami ekspansi, meskipun harus menghadapi tantangan eksternal seperti kenaikan harga komoditas global yang berpotensi mempengaruhi keseimbangan ekonomi domestik.

Namun, data pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan tajam PDB per kapita menjadi 5,57 juta Rupiah, yang merupakan lonjakan signifikan dalam tren pertumbuhan ini. Perubahan ini kemungkinan besar disebabkan oleh revisi metodologi penghitungan atau perubahan lain dalam cara data dikumpulkan atau dipresentasikan. Setelah lonjakan

ini, tren PDB per kapita kembali menunjukkan peningkatan moderat, dengan angka 2,7 juta Rupiah pada tahun 2010, 2,83 juta Rupiah pada 2011, dan 2,96 juta Rupiah pada 2012.

Pada tahun 2013, PDB per kapita terus meningkat menjadi 3,09 juta Rupiah, mencerminkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Namun, pada tahun 2014, terjadi sedikit penurunan PDB per kapita menjadi 3,02 juta Rupiah, yang mungkin mencerminkan tantangan ekonomi seperti penurunan harga komoditas global atau penurunan pertumbuhan di beberapa sektor utama.



**Gambar 4.12 Gini Ratio Tahun 2004-2014**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org) ), diolah 2024

Pada tahun 2004, Gini rasio Indonesia tercatat sebesar 33,9. Angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang moderat. Memasuki tahun 2005, Gini rasio sedikit meningkat menjadi 34,1, yang menandakan adanya sedikit peningkatan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Tahun 2006 dan 2007 menandai peningkatan yang lebih signifikan dalam Gini rasio, dengan nilai masing-masing sebesar 35,3 dan 36,7. Tren ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, kesenjangan pendapatan di Indonesia semakin melebar, mungkin disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di berbagai sektor.

Pada tahun 2008 dan 2009, Gini rasio sedikit menurun dan stabil pada kisaran 36,1 dan 36,0. Meskipun ada sedikit penurunan, tingkat ketimpangan masih cukup tinggi, menunjukkan bahwa perbaikan dalam distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata.

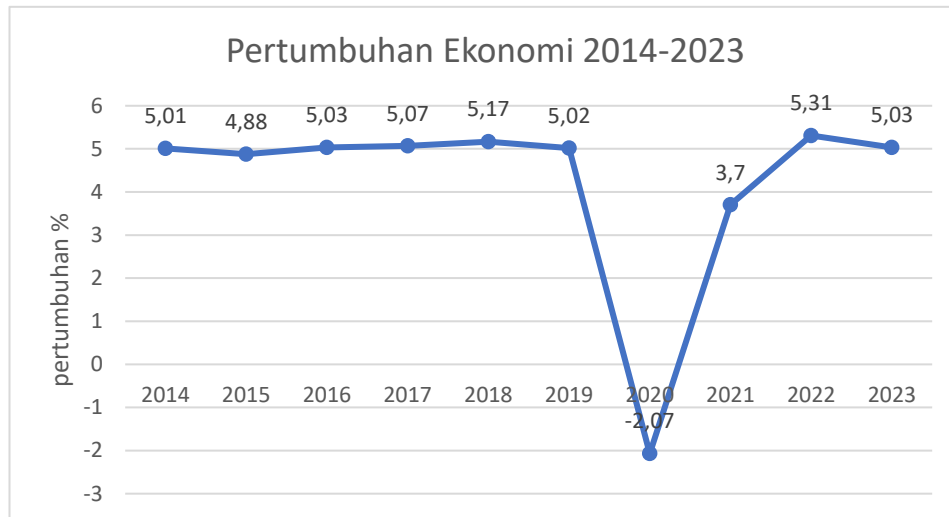
Memasuki tahun 2010, Gini rasio kembali mengalami peningkatan menjadi 37,2. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada tahun 2011 dan 2012 dengan nilai 40,5. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi dalam distribusi pendapatan, yang dapat menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Pada tahun 2013, Gini rasio Indonesia terus meningkat menjadi 40,8, angka tertinggi dalam periode ini. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin menjadi isu serius yang perlu ditangani oleh pemerintah. Pada tahun 2014, Gini rasio sedikit menurun menjadi 40,2, namun angka ini masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar.

#### **4. Era Jokowi (2014-sekarang)**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api. Jokowi juga meluncurkan berbagai paket reformasi ekonomi untuk memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan perizinan, dan mendorong sektor manufaktur. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan birokrasi.

Di era Jokowi, digitalisasi dan ekonomi kreatif mulai menjadi sektor yang semakin penting. Pemerintah mendorong perkembangan startup teknologi dan industri kreatif. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi ekonomi Indonesia, menyebabkan kontraksi ekonomi pada tahun 2020. Pemerintah merespons dengan paket stimulus besar-besaran dan program vaksinasi massal untuk memulihkan ekonomi. Setelah pandemi, fokus beralih pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan diarahkan pada penguatan daya beli masyarakat, keberlanjutan fiskal, dan pengurangan ketergantungan pada komoditas.





**Gambar 4.13 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2023**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,01%. Tahun ini menandai akhir dari tren pertumbuhan yang kuat pada dekade sebelumnya, yang kemudian diikuti dengan sedikit perlambatan pada tahun 2015, di mana pertumbuhan turun menjadi 4,88%. Perlambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan penurunan harga komoditas yang mempengaruhi sektor-sektor utama di Indonesia.

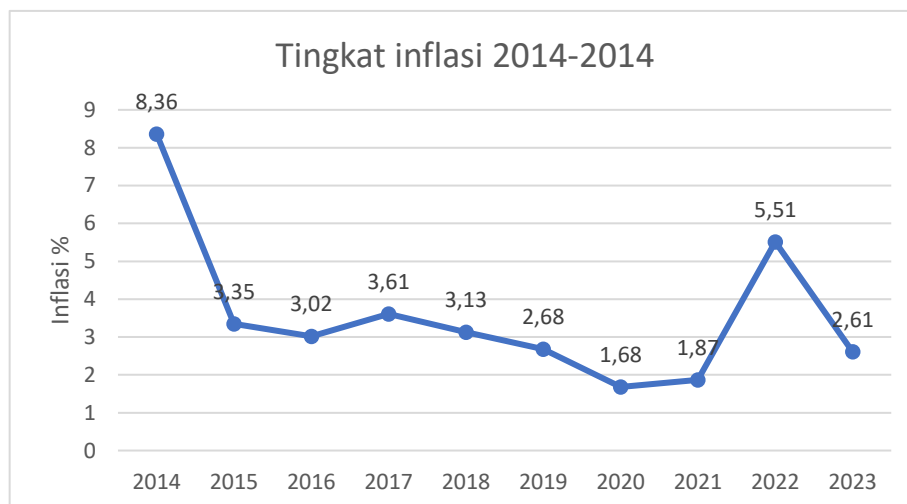
pada tahun 2016, perekonomian kembali pulih dengan pertumbuhan sebesar 5,03%, dan tren positif ini berlanjut pada tahun 2017 dengan angka 5,07%. Kenaikan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang mulai terjaga, didukung oleh kebijakan pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi domestik.

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya dalam periode ini, dengan angka 5,17%. Hal ini menunjukkan optimisme di pasar domestik serta penguatan sektor-sektor ekonomi utama seperti manufaktur dan jasa. Meskipun begitu, pada tahun 2019, pertumbuhan sedikit menurun menjadi 5,02%, menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah pertumbuhan yang kuat pada tahun sebelumnya.

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia dan banyak negara lain di dunia akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi signifikan sebesar -2,07%, pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Penurunan ini mencerminkan dampak dari pembatasan aktivitas ekonomi, penurunan permintaan global, dan gangguan pada rantai pasokan.

pada tahun 2021, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,7%, didorong oleh pelonggaran pembatasan dan stimulus ekonomi dari pemerintah. Pemulihan ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, mencerminkan kembalinya aktivitas ekonomi dan peningkatan kepercayaan pasar.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,03%, menandakan keberhasilan Indonesia dalam mengelola pemulihan pasca-pandemi dan mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.



**Gambar 4.14 Tingkat inflasi Tahun 2014-2023**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

Pada tahun 2014, tingkat inflasi di Indonesia mencapai 8,36%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Tingginya inflasi pada tahun ini dapat dikaitkan dengan

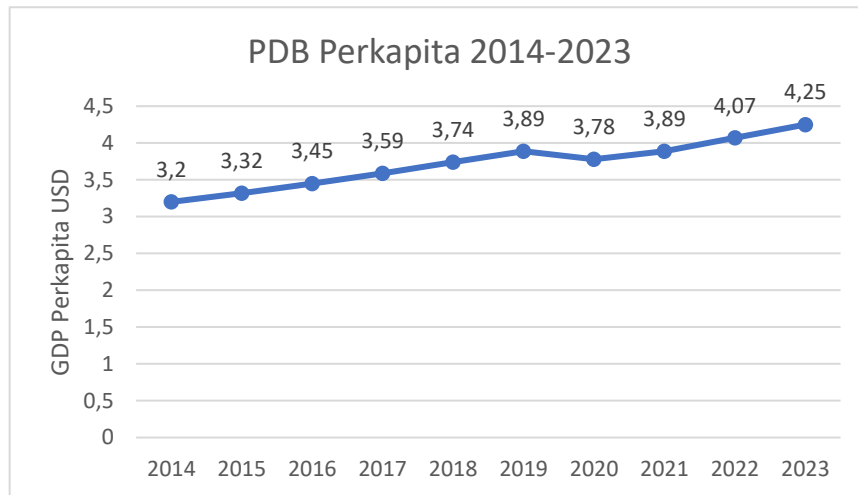
penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah, yang memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

pada tahun 2015, inflasi turun drastis menjadi 3,35% seiring dengan stabilisasi harga setelah penyesuaian besar di tahun sebelumnya. Inflasi terus menurun pada tahun 2016, mencapai 3,02%. Penurunan ini menunjukkan adanya pengendalian inflasi yang efektif oleh otoritas moneter melalui kebijakan yang mendukung stabilitas harga. Pada tahun 2017, inflasi sedikit meningkat menjadi 3,61%, namun tetap berada dalam kisaran yang terkendali. Hal ini menandakan adanya permintaan domestik yang meningkat, namun masih dalam batas yang bisa dikelola.

Pada tahun 2018, inflasi kembali turun menjadi 3,13%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2019, yaitu sebesar 2,68%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi harga-harga di pasar tetap stabil, dengan sedikit tekanan dari sisi permintaan atau pasokan.

Tahun 2020 menandai titik terendah dalam tingkat inflasi pada periode ini, yaitu sebesar 1,68%. Inflasi yang rendah ini kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan akibat pandemi COVID-19, yang mengurangi permintaan konsumen secara drastis. Pada tahun 2021, inflasi sedikit meningkat menjadi 1,87%, mencerminkan awal dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Tahun 2022 menunjukkan kenaikan inflasi yang cukup tajam, mencapai 5,51%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan lonjakan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, serta beberapa gangguan pada rantai pasokan yang menyebabkan tekanan harga. Namun, pada tahun 2023, inflasi kembali menurun menjadi 2,61%, menunjukkan stabilisasi harga seiring dengan normalisasi kondisi ekonomi.



**Gambar 4.15 PDB Perkapita Tahun 2004-2014**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

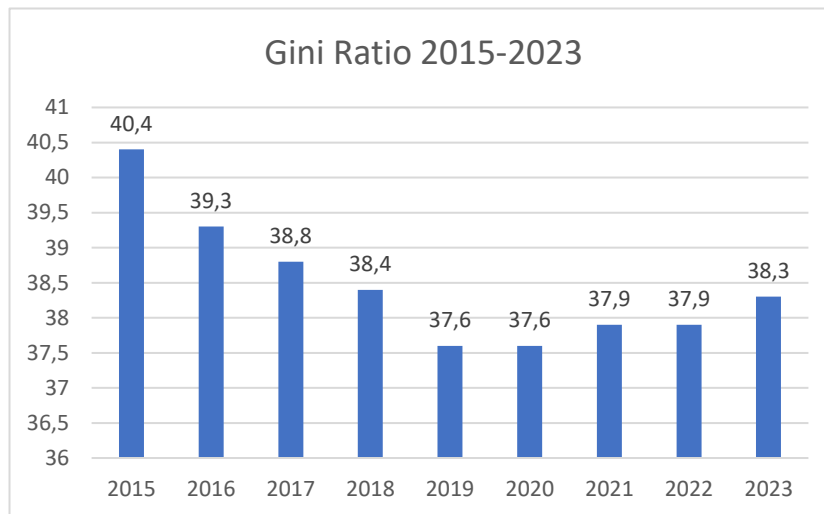
Pada tahun 2014, PDB per kapita Indonesia tercatat sebesar 3,2 juta Rupiah. Angka ini menandai awal dari periode pertumbuhan yang konsisten selama hampir satu dekade berikutnya. Pada tahun 2015, PDB per kapita naik menjadi 3,32 juta Rupiah, dan tren positif ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2016, PDB per kapita mencapai 3,45 juta Rupiah, yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

Pertumbuhan berkelanjutan ini terlihat jelas pada tahun 2017, di mana PDB per kapita meningkat menjadi 3,59 juta Rupiah. Angka ini terus meningkat hingga 3,74 juta Rupiah pada tahun 2018 dan 3,89 juta Rupiah pada tahun 2019. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat, didukung oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan sektor industri, jasa, dan investasi.

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Meskipun demikian, PDB per kapita Indonesia hanya mengalami sedikit penurunan menjadi 3,78 juta Rupiah, menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia

di tengah krisis global. Pada tahun 2021, PDB per kapita kembali ke angka 3,89 juta Rupiah, menandakan pemulihan ekonomi yang mulai berjalan.

Pada tahun 2022, PDB per kapita terus meningkat menjadi 4,07 juta Rupiah, dan tren ini berlanjut hingga 2023 dengan angka 4,25 juta Rupiah. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengelola pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta pertumbuhan yang stabil dalam berbagai sektor ekonomi.



**Gambar 4.16 Gini Ratio Tahun 2004-2014**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

Pada tahun 2015, Gini rasio Indonesia tercatat sebesar 40,4, menandakan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2016, angka ini mengalami penurunan menjadi 39,3, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, meskipun ketimpangan masih tetap besar.

Tahun 2017 dan 2018 memperlihatkan penurunan lebih lanjut dalam Gini rasio, masing-masing menjadi 38,8 dan 38,4. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia terus membaik, meskipun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai distribusi yang lebih merata.

Pada tahun 2019 dan 2020, Gini rasio stabil di angka 37,6. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi ketimpangan, distribusi pendapatan cenderung stagnan pada tingkat ini.

Namun, pada tahun 2021, Gini rasio mengalami sedikit peningkatan menjadi 37,9, dan angka ini tetap bertahan hingga tahun 2022. Kenaikan ini dapat mengindikasikan bahwa upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan mungkin mengalami tantangan atau hambatan, meskipun pada skala yang lebih kecil.

Pada tahun 2023, Gini rasio kembali mengalami peningkatan sedikit menjadi 38,3. Meskipun peningkatan ini tidak signifikan, hal ini mencerminkan adanya pergeseran kecil dalam ketimpangan pendapatan yang perlu diwaspadai oleh pembuat kebijakan.

## **4.2.2 Perkembangan Sosial Di Indonesia Dari Masa Orde Baru Sampai Dengan Era Sekarang**

Perkembangan sosial di Indonesia dari masa Orde Baru (ORBA) hingga era sekarang mencerminkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan sosial tersebut:

### **1. Masa Orde Baru**

Pada masa Orde Baru, pemerintah di bawah pimpinan Soeharto menekankan stabilitas politik dan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi prioritas, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan produksi pangan melalui program seperti "Revolusi Hijau".

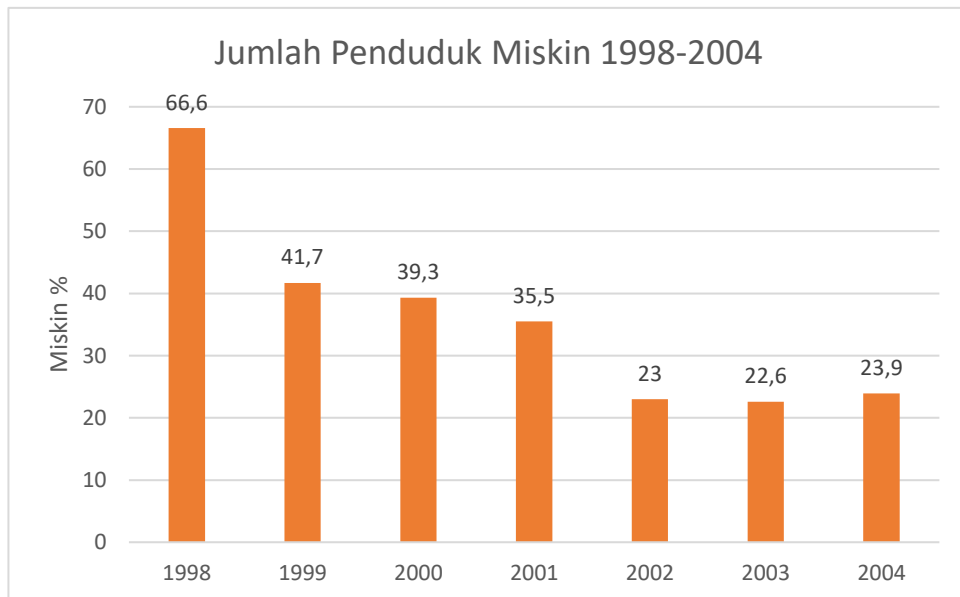
Pemerintah Orde Baru menerapkan kontrol ketat terhadap kehidupan sosial dan budaya. Media massa diawasi dengan ketat, dan kebebasan berpendapat dibatasi. Organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah sering kali ditindas. Orde Baru sangat sentralistis, dengan kekuasaan politik dan ekonomi yang terpusat di Jakarta. Ini menciptakan ketimpangan sosial antara pusat dan daerah, serta antara kelompok sosial yang berbeda.

## 2. Era Reformasi

Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya.

Era Reformasi membawa kebebasan pers yang lebih besar dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Media massa tumbuh pesat, dan masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk menyuarakan pendapat mereka. Proses demokratisasi juga mencakup pemilu yang lebih bebas dan adil.

Perjalanan sosial Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, proses perubahan sosial ini juga membawa banyak kemajuan dalam hal kebebasan, partisipasi masyarakat, dan kemajuan teknologi.



**Gambar 4.17 Jumlah Penduduk Miskin 1998-2004**

Sumber : Badan Pusat Statistik ( [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) ), diolah 2024

Tahun 1998, jumlah penduduk miskin di Indonesia mulai menurun secara signifikan. Pada tahun 1999, jumlah penduduk miskin turun drastis menjadi 41,7 juta orang. Penurunan ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan jumlah penduduk

miskin pada tahun 2000 mencapai 39,3 juta orang, dan terus menurun hingga tahun 2003, di mana tercatat sebanyak 22,6 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan.

Penurunan jumlah penduduk miskin selama periode ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dalam menangani kemiskinan. Meski begitu, pada tahun 2004, terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 23,9 juta orang. Peningkatan ini bisa jadi merupakan akibat dari berbagai faktor, termasuk dinamika ekonomi global, fluktuasi harga pangan, atau keterbatasan dalam efektivitas program-program pengentasan kemiskinan.

Perubahan jumlah penduduk miskin dari 1998 hingga 2004 menunjukkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, di mana berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin selama periode ini, serta mengeksplorasi penyebab dari kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2004.

### **3. Era SBY**

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014, Indonesia mengalami berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Selama periode ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Data Indeks Pembangunan Indonesia hanya ada di masa era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Jokowi Dodo.





**Gambar 4.18 IPM Indonesia Tahun 2010-2014**

Sumber : world bank ( [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)), diolah 2024

Berdasarkan data IPM Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014, terlihat adanya peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2010, IPM Indonesia tercatat sebesar 66,53. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, menjadi 67,09 pada tahun 2011, 67,70 pada tahun 2012, 68,31 pada tahun 2013, dan mencapai 68,90 pada tahun 2014.

Peningkatan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kenaikan dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 68,90 pada tahun 2014 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai program pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, program pendidikan gratis, serta berbagai inisiatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

Peningkatan IPM ini juga menandakan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Namun, meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target pembangunan manusia yang lebih tinggi. Misalnya, kesenjangan pembangunan antar daerah, tingkat pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.



**Gambar 4.19 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010-2014**

Sumber : lokaldata ( [www.lokaldata.bertiga.id](http://www.lokaldata.bertiga.id)), diolah 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014, terdapat tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 16,11%. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2011 menjadi 16,21%, yang mungkin mencerminkan dampak dari berbagai faktor eksternal seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau ketidakstabilan ekonomi. Namun, setelah tahun 2011, jumlah penduduk miskin mulai menunjukkan penurunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2012, persentase penduduk miskin menurun menjadi 14,98%, dan tren penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2014, di mana persentase penduduk miskin mencapai angka 13,58%.

Penurunan jumlah penduduk miskin ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia selama periode tersebut. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini meliputi kebijakan pemerintah yang lebih proaktif dalam menangani masalah kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program-program pengentasan kemiskinan seperti bantuan langsung tunai dan subsidi bahan pokok.

Meskipun demikian, angka kemiskinan yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia masih besar. Perlu adanya

upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial.

#### 4. Era Jokowi

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbagai indikator sosial telah mengalami perubahan yang mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.



**Gambar 4.20 IPM Indonesia 2015-2023**

Sumber : lokaldata ( [www.lokaldata.bertiga.id](http://www.lokaldata.bertiga.id)), diolah 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komprehensif yang mencakup tiga dimensi utama: kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak. IPM memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Data IPM di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten, mencerminkan kemajuan dalam pembangunan manusia di berbagai sektor.

Pada tahun 2015, IPM Indonesia tercatat sebesar 69,55. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, dengan nilai IPM mencapai 74,39 pada tahun 2023. Peningkatan ini

mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.



**Gambar 4.21 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010-2014**

Sumber : lokaldata ( [www.lokaldata.bertiga.id](http://www.lokaldata.bertiga.id)), diolah 2024

Tahun 2015-2017 Pada awal periode ini, jumlah penduduk miskin menurun dari 13,58% pada tahun 2015 menjadi 13,01% pada tahun 2017. Penurunan ini mencerminkan dampak positif dari berbagai kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, seperti program bantuan sosial dan penguatan ekonomi di daerah pedesaan.

Tahun 2018-2019: Pada tahun 2018, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah penduduk miskin, mencapai 11,32%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2019, dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 10,8%. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup melalui program-program kesejahteraan.

Tahun 2020-2023 Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin naik menjadi 11,41% akibat dampak pandemi COVID-19, pemerintah berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 10,77%, yang merupakan salah satu angka terendah selama periode tersebut.

Penurunan jumlah penduduk miskin ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, meskipun tantangan seperti krisis ekonomi global dan pandemi sempat mempengaruhi capaian tersebut. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin.

Namun, meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal kesenjangan antar daerah dan upaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

## **4.2 Perkembangan Dari Indikator *Green Economy* Di Indonesia**

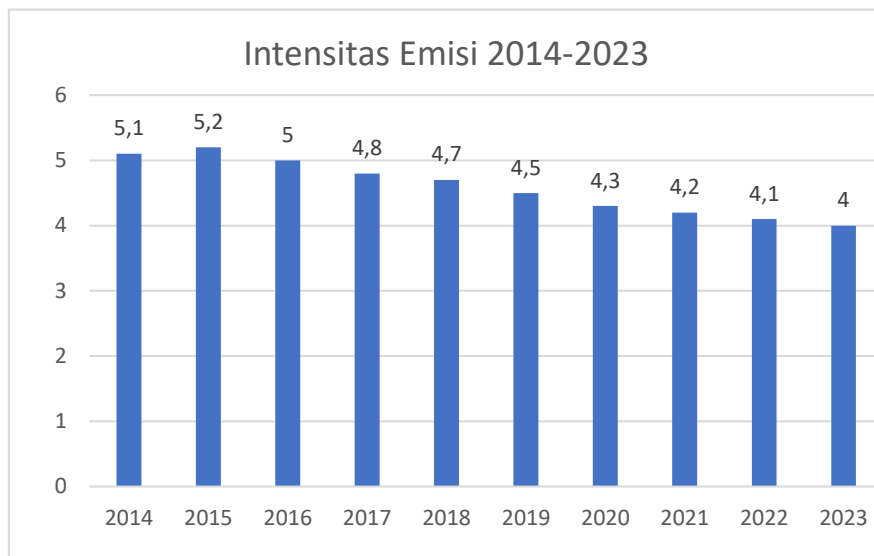
Menurut *United Nations Environment Programme* ( UNEP ), konsep ekonomi hijau ditandai dengan rendahnya emisi karbon, penggunaan sumber daya yang efisien, dan inklusi sosial. Pemerintah Indonesia menggunakan konsep *Green Economy* atau ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya jangka menengah panjang untuk mengurangi emisi karbon dan mentransformasikan sektor ekonomi.

Indikator ekonomi menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini mencakup tentang intensitas emisi, intensitas energi final, pendapatan nasional bruto perkapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sector industri, produktivitas tenaga kerja sector jasa.

### **4.2.1 Analisis Ekonomi Tentang Intensitas Emisi Di Indonesia 2014 – 2023**

Intensitas emisi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan per unit aktivitas atau output tertentu. Dalam konteks ekonomi, intensitas emisi sering diukur sebagai jumlah emisi GRK per unit *produkt domestik bruto* (PDB). Di sektor industri, intensitas emisi dapat diukur sebagai jumlah emisi per unit produksi, seperti per ton baja yang diproduksi atau per megawatt-jam listrik yang dihasilkan.

Menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), Tren global menunjukkan variasi dalam intensitas emisi antara negara-negara dan sektor-sektor ekonomi. Negara-negara dengan ekonomi maju cenderung memiliki intensitas emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang, sebagian karena penggunaan teknologi yang lebih efisien dan penerapan kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Namun, beberapa negara berkembang sedang mengupayakan pengurangan intensitas emisi mereka melalui adopsi teknologi hijau dan kebijakan yang mendukung energi bersih.



**Gambar 4.22 Intensitas Emisi Tahun 2014 – 2023**

Sumber : ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)), diolah 2024

Tahun 2014 mencatat sedikit penurunan intensitas emisi menjadi 5,1. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan upaya awal pemerintah dalam meningkatkan efisiensi energi dan mulai beralih ke sumber energi yang lebih bersih.

Intensitas emisi kembali menurun menjadi 5,0 pada tahun 2016. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kebijakan lingkungan dan peningkatan dalam penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pada tahun 2019, intensitas emisi menurun menjadi 4,5. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan dan upaya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

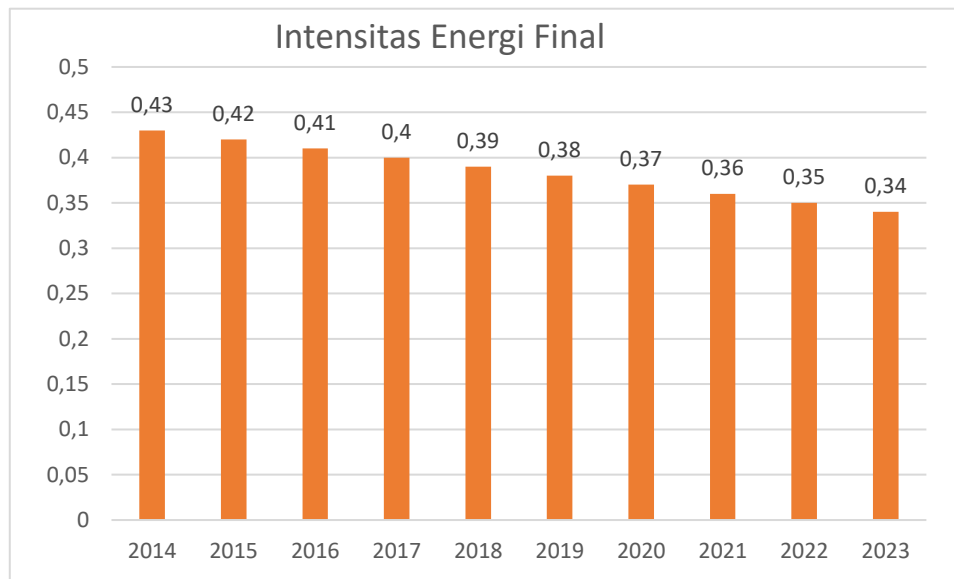
Tahun 2022 melihat penurunan intensitas emisi menjadi 4,1. Penurunan ini menandakan kemajuan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan lingkungan dan peningkatan penggunaan teknologi energi terbarukan. Pada tahun 2023, intensitas emisi Indonesia tercatat sebesar 4,0. Angka ini menunjukkan pencapaian signifikan dalam upaya pengurangan emisi selama satu dekade terakhir, menandakan komitmen Indonesia dalam mencapai target emisi yang lebih rendah dan berkelanjutan.

#### **4.3.1 Analisis Ekonomi Tentang Intensitas Energi Final Tahun 2014 – 2023**

Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam negeri, meskipun terdapat beberapa kilang yang memproduksi BBM di dalam negeri. Namun, produksi di kilang-kilang tersebut masih terbatas, dan sebagian besar hasilnya berupa produk seperti oli. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan BBM, Indonesia masih harus mengimpor dari negara-negara seperti Arab Saudi dan Nigeria.

Intensitas energi final merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan energi dalam menghasilkan output ekonomi. Biasanya, intensitas energi diukur sebagai jumlah energi yang dikonsumsi per unit *produk domestik bruto* (PDB) atau per unit output dari suatu sektor ekonomi. Ini adalah indikator penting yang menggambarkan seberapa efisien suatu negara atau sektor dalam memanfaatkan energi. Penggunaan bahan bakar fosil cenderung menghasilkan intensitas energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber energi terbarukan. Teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi akan menghasilkan intensitas energi yang lebih rendah.

Intensitas energi final indikator kunci dalam mengevaluasi kinerja energi suatu ekonomi. Penurunan intensitas energi menunjukkan peningkatan efisiensi energi dan kemajuan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui pemahaman dan pengelolaan intensitas energi, negara dan perusahaan dapat mengurangi biaya energi, mengurangi emisi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. *International Energy Agency (IEA)*.



**Gambar 4.23 Intensitas Energi Final Tahun 2014 – 2023**

Sumber : ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)), diolah 2024

Pada tahun 2014, intensitas emisi Indonesia adalah 0,43. Ini menunjukkan bahwa setiap unit PDB menghasilkan 0,43 unit emisi GRK. Pada tahun ini, Indonesia mulai meningkatkan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dan mulai mengadopsi beberapa kebijakan awal untuk mengurangi emisi.

Tahun 2020, intensitas emisi menurun menjadi 0,37. Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, yang berkontribusi pada pengurangan emisi, meskipun juga menciptakan tantangan bagi sektor energi.

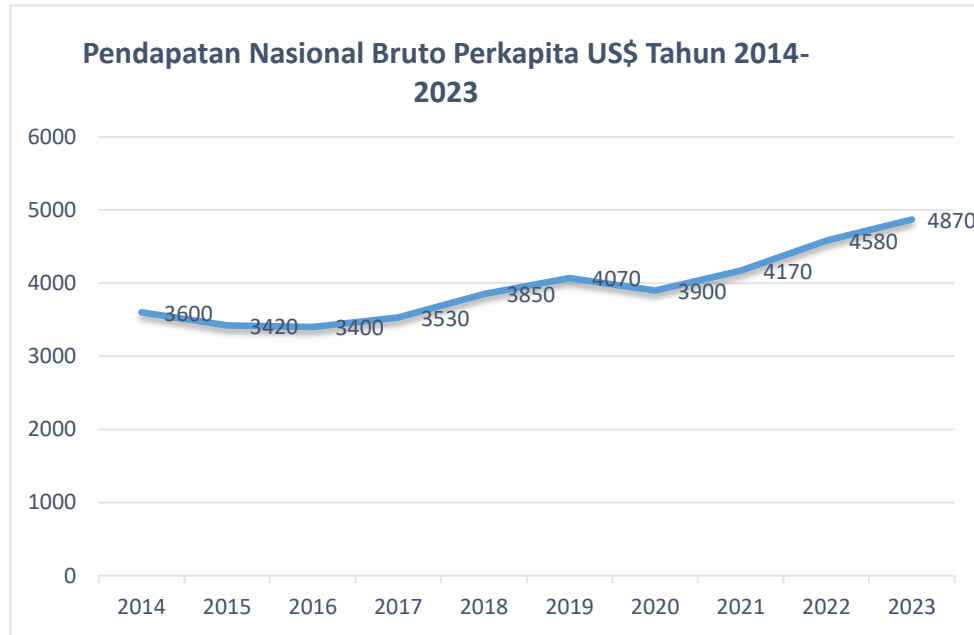
Tahun 2023 menunjukkan intensitas emisi sebesar 0,34. Ini mencerminkan tren penurunan yang konsisten selama satu dekade terakhir, didorong oleh inovasi teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dan pengurangan emisi.



#### **4.3.2 Analisis Ekonomi Tentang Pendapatan Nasional Bruto Perkapita Tahun 2014 – 2023**

Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, adalah indikator ekonomi yang mengukur total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara, termasuk pendapatan dari luar negeri yang diperoleh oleh warga negaranya, dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Indikator ini digunakan untuk menilai kesejahteraan ekonomi rata-rata individu dalam suatu negara.

Pendapatan Nasional Bruto per kapita mencakup pendapatan yang dihasilkan dari semua sektor ekonomi, baik dari produksi barang dan jasa dalam negeri maupun dari investasi dan kegiatan ekonomi lainnya di luar negeri. Bank Dunia menggunakan Pendapatan Nasional Bruto per kapita sebagai salah satu kriteria untuk mengklasifikasikan negara ke dalam kategori berpenghasilan rendah, menengah, atau tinggi.



**Gambar 4.24 Pendapatan Nasional Bruto Perkapita Tahun 2014 – 2023**

Sumber : ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)), diolah 2024

Pada tahun 2014, PNB per kapita Indonesia berada di angka 3600 USD. Tahun ini mencerminkan kondisi ekonomi yang cukup stabil setelah beberapa tahun sebelumnya terjadi peningkatan signifikan dalam sektor konsumsi dan investasi. PNB per kapita terus meningkat pada tahun 2018, mencapai 3850 USD. Faktor pendorong utama adalah pertumbuhan di sektor jasa dan peningkatan investasi asing langsung yang membantu mendorong ekonomi.

Pada tahun 2020, PNB per kapita menurun menjadi 3900 USD akibat pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan, dengan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor seperti pariwisata, manufaktur, dan perdagangan. Tahun 2023 mencatat PNB per kapita tertinggi selama periode analisis, yaitu sebesar 4870 USD. Peningkatan ini didorong oleh stabilitas ekonomi yang lebih baik, peningkatan investasi, serta perbaikan dalam sektor-sektor kunci seperti industri dan jasa.

#### **4.3.3 Analisis Ekonomi Tentang Produktivitas Pertanian Tahun 2019– 2023**

sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital di kehidupan manusia. Sektor tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan

program *Sustainable Development Goals (SDG's)* kedua, yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Peran sektor pertanian di Indonesia juga menjadi sangat penting karena merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap *Produk Domestik Bruto (PDB)* yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Produksi pangan terutama padi atau beras menjadi salah satu komponen penting di dalam perkembangan sektor pertanian. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya untuk menjalankan sejumlah program guna meningkatkan kapasitas produksi padi/beras nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, tersedianya data luas panen dan produksi padi yang tepat waktu dan akurat merupakan pondasi untuk dapat mewujudkan kebijakan perberasan nasional yang tepat sasaran.

Produksi padi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cuaca, ketersediaan air irigasi, serta praktik pertanian yang dilakukan oleh petani. Variabilitas cuaca dan perubahan iklim turut berkontribusi terhadap fluktuasi produksi dari tahun ke tahun.



**Gambar 4.25 Produktivitas Pertanian Tahun 2019 – 2023**

Sumber : ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)), diolah 2024

Pada tahun 2019, produktivitas pertanian tercatat sebesar 2.012.742,80. Angka ini relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2020,

terjadi lonjakan yang sangat signifikan, di mana produktivitas pertanian meningkat tajam menjadi 20.169.932,75. Lonjakan ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur, atau kebijakan pemerintah yang mendukung sektor ini.

Pada tahun 2021, produktivitas pertanian sedikit menurun menjadi 19.692.608,65. Penurunan ini, meskipun tidak signifikan, menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi sektor pertanian dalam mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi. Faktor-faktor seperti kondisi cuaca, perubahan harga komoditas, atau masalah distribusi mungkin berperan dalam penurunan ini.

Tahun 2022 kembali menunjukkan peningkatan produktivitas pertanian menjadi 20.566.448,25, yang mencerminkan pemulihan dan perbaikan dalam efisiensi sektor pertanian. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu beradaptasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, produktivitas pertanian sedikit menurun menjadi 20.074.411,45. Meskipun penurunan ini relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan tingkat produktivitas yang stabil.

Secara keseluruhan, periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren produktivitas pertanian yang fluktuatif. Setelah lonjakan besar pada tahun 2020, produktivitas cenderung stabil meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian Indonesia terus berkembang, tetapi masih perlu diwaspadai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas di masa mendatang.

#### **4.3.4 Analisis Ekonomi Tentang Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri**

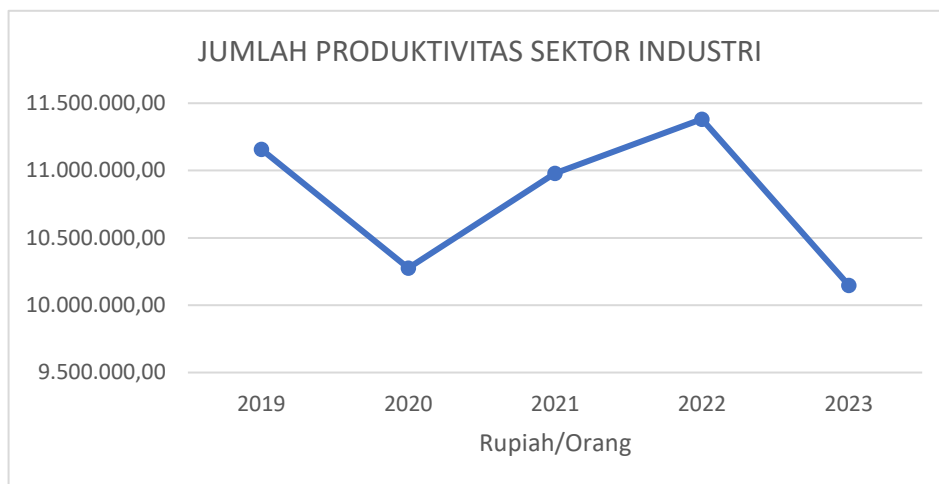
##### **Tahun 2014 – 2023**

Produktivitas tenaga kerja sektor industri di Indonesia adalah ukuran efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan output industri, seperti barang atau jasa, dalam suatu periode waktu tertentu. Produktivitas ini biasanya dinilai berdasarkan jumlah output yang dihasilkan per unit tenaga kerja atau per jam kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi

produktivitas tenaga kerja di sektor industri meliputi keterampilan dan pendidikan pekerja, teknologi yang digunakan, infrastruktur, serta manajemen dan praktik kerja yang diterapkan dalam industri tersebut. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Produktivitas tenaga kerja di sektor industri di Indonesia mengacu pada kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan output (barang atau jasa) per unit waktu yang ditentukan, seperti per jam atau per tahun, Badan Pusat Statistik (BPS).

Produktivitas yang meningkat ini menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia semakin mampu menghasilkan lebih banyak output dengan sumber daya yang ada, sekaligus menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global, Badan Pusat Statistik (BPS).



**Gambar 4.26 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri 2019 – 2023**

Sumber : ([www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id)), diolah 2024

Pada tahun 2019, produktivitas tenaga kerja sektor industri tercatat sebesar 11.158.754,40. Angka ini menunjukkan performa yang relatif baik pada awal periode pengamatan. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan produktivitas yang cukup besar, yaitu menjadi 10.275.445,35. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia

dan dunia, yang mengakibatkan gangguan dalam rantai pasokan, penurunan permintaan, dan pembatasan aktivitas industri.

Pada tahun 2021, produktivitas tenaga kerja sektor industri kembali meningkat menjadi 10.980.684,25. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemulihan yang dilakukan oleh sektor industri di tengah tantangan yang ada, termasuk adaptasi terhadap kondisi pasar yang berubah dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di tempat kerja.

Tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan yang berlanjut, di mana produktivitas tenaga kerja sektor industri mencapai 11.382.085,85. Ini merupakan puncak produktivitas selama periode pengamatan dan menunjukkan bahwa sektor industri telah berhasil mengatasi sebagian besar tantangan yang dihadapi selama pandemi.

Pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja sektor industri kembali mengalami penurunan menjadi 10.148.616,25. Penurunan ini, meskipun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2020, menunjukkan adanya tantangan baru atau berkelanjutan yang dihadapi oleh sektor industri. Faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan, atau masalah dalam rantai pasokan bisa menjadi penyebab penurunan ini.



**Gambar 4.27 Produktivitas Tenaga Kerja Jasa 2014 – 2023**

Sumber : ( [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) ), diolah 2024

Pada tahun 2019, produktivitas tenaga kerja sektor jasa tercatat sebesar 597.428,88, yang merupakan angka paling rendah dalam periode pengamatan.

Pada tahun 2020, terjadi lonjakan produktivitas yang sangat besar, mencapai 6.193.873,50. Peningkatan drastis ini mungkin dipengaruhi oleh perubahan struktural dalam perekonomian dan peralihan ke layanan digital serta adaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19, di mana banyak sektor jasa harus beralih ke metode operasi baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi.

Tahun 2021 menunjukkan kelanjutan dari tren peningkatan produktivitas dengan angka mencapai 6.312.559,18. Ini menunjukkan bahwa sektor jasa terus mengembangkan efisiensi dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Pada tahun 2022, produktivitas tenaga kerja sektor jasa semakin meningkat menjadi 6.571.356,38. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor jasa terus beradaptasi dan berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi dan transformasi digital yang berkelanjutan.

Namun, pada tahun 2023, terdapat sedikit penurunan produktivitas menjadi 6.547.498,48. Meskipun penurunan ini tidak signifikan, hal ini menunjukkan adanya stabilisasi setelah lonjakan besar yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Faktor-faktor seperti penyesuaian pasar, perubahan kebijakan, atau dinamika global mungkin telah mempengaruhi produktivitas di tahun ini.

### 4.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

#### 4.3.1 Estimasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas

#### Tenaga Kerja Di Indonesia Dalam Target SDGS Tahun 2030

**Tabel 4.2 Hasil Olahan Regresi Linear Berganda**

Dependent Variable: PTK

Method: Least Squares

Date: 08/26/24 Time: 15:45

Sample: 2014 2023

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.38723	26.32980	1.040161	0.3459
JTK	-0.326046	0.229343	-1.421650	0.2144
PDB_PK	1.67E-07	3.05E-07	0.547150	0.6078
KE	-0.624744	1.416847	-0.440940	0.6777
LU	9.13E-06	1.06E-05	0.863950	0.4271
R-squared	0.673629	Mean dependent var		1.816800
Adjusted R-squared	0.412533	S.D. dependent var		2.112701
S.E. of regression	1.619310	Akaike info criterion		4.108730
Sum squared resid	13.11082	Schwarz criterion		4.260022
Log likelihood	-15.54365	Hannan-Quinn criter.		3.942762
F-statistic	2.580001	Durbin-Watson stat		2.517483
Prob(F-statistic)	0.163332			

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan masalah bahwa tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Produktivitas Tenaga Kerja (PTK). Variabel jumlah tenaga kerja (JTK), PDB Perkapita (PDB\_PK), Konsumsi energi (KE), dan Lulusan Universitas (LU) tidak berpengaruh signifikan ( $\alpha > 0,15$ ). Oleh karena itu, dilanjutkan uji multikolinieritas sebagai berikut.



**Tabel 4.3 Hasil Regresi Multikolinieritas**

Variance Inflation Factors

Date: 08/26/24 Time: 15:52

Sample: 2014 2023

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	693.2583	2643.840	NA
JTK	0.052598	3442.787	19.33068
PDB_PK	9.30E-14	1176.261	36.55424
KE	2.007455	1158.586	1.364318
LU	1.12E-10	1194.280	6.592754

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Hasil uji diatas menunjukkan nilai Centered VIF Variabel jumlah tenaga kerja (JTK), dan PDB Perkapita (PDB\_PK) lebih besar dari 10 ( $VIF > 10$ ), maka artinya bahwa dalam hasil regresi diatas terjadinya multikolinieritas atau belum lolos uji asumsi klasik, dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut peneliti menghapus satu variabel bebas yaitu Lulusan Universitas (LU). Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Regresi Setelah Menghapus Variabel LU**

Dependent Variable: PTK

Method: Least Squares

Date: 08/26/24 Time: 15:57

Sample: 2014 2023

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41.87388	19.86650	2.107763	0.0796
JTK	-0.471144	0.152843	-3.082530	0.0216
PDB_PK	3.95E-07	1.49E-07	2.650668	0.0380
KE	-0.073574	1.238068	-0.059427	0.9545
R-squared	0.624908	Mean dependent var		1.816800
Adjusted R-squared	0.437362	S.D. dependent var		2.112701

S.E. of regression	1.584720	Akaike info criterion	4.047867
Sum squared resid	15.06803	Schwarz criterion	4.168901
Log likelihood	-16.23934	Hannan-Quinn criter.	3.915093
F-statistic	3.332026	Durbin-Watson stat	2.553935
Prob(F-statistic)	0.097745		

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Dari hasil regresi diatas ditemukan bahwa variabel bebas yaitu Jumlah Tenaga Kerja (JTK) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha < 0,05$ ). Variabel PDB Perkapita (PDB\_PK) berpengaruh signifikan pada tingkat 5% ( $\alpha < 0,05$ ). Sedangkan variabel Konsumsi energi (KE), tidak signifikan dikarenakan menunjukan probablitas di atas 15 % ( $\alpha < 0,015$ ). Hasil regresi juga menghasilkan nilai R-squared yang sangat tinggi yaitu sebesar 0.624908 , artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi. Oleh karena itu, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

**Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi**

Variabel	OLS (Ordinary Least Square)
PTK	-0.471144**
	(-3.082530)
PDB_PK	3.95E-07**
	(2.650668)
KE	-0.073574
	(0.9545)
Konstanta	41.87388*
	(0.0796)
Number of Obs	10
Adj R-Squared	0.437362
R (Correlation)	79,05%
Uji F	3.332026
	(0.097745)
D-W (Durbin-Watson)	2.553935

Sumber: Eviews 12 dan diolah

## 1) Penaksiran

### a. Statistika Deskriptif

**Tabel 4.6 Statistika Deskriptif**

	PTK	JTK	PDB_PK	KE
Mean	1.816800	130.6400	56699000	12.29463
Median	1.924000	128.2500	56450000	12.12260
Maximum	4.702000	145.0000	75000000	13.48781
Minimum	-3.544000	118.2000	41800000	12.01020
Std. Dev.	2.112701	10.34775	10703516	0.444983
Skewness	-1.579191	0.205604	0.344223	2.161103
Kurtosis	5.565756	1.479028	2.148794	6.443786
Jarque-Bera	6.899367	1.034354	0.499379	12.72547
Probability	0.031756	0.596201	0.779043	0.001725
Sum	18.16800	1306.400	5.67E+08	122.9463
Sum Sq. Dev.	40.17156	963.6840	1.03E+15	1.782090
Observations	10	10	10	10

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa setiap variabel memiliki penjelasan data sebagai berikut:

- a. Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) menunjukkan nilai minimumnya sebesar -3.544000 dan maksimumnya 4.702000 dengan standar deviasi 2.112701 sedangkan rata-ratanya menunjukkan 1.816800.
- b. Jumlah Tenaga Kerja (JTK) nilai minimumnya sebesar 118.2000 dan maksimumnya 145.0000 dengan standar deviasi 10.34775, sedangkan rata-ratanya adalah sebesar 130.6400.

- c. PDB perkapita (PDB\_PK) nilai minimumnya adalah 41800000 dan maksimumnya 75000000 dengan standar deviasi 10703516 sedangkan rata-ratanya adalah sebesar 56699000.
- d. Konsumsi Energi (KE) nilai minimumnya adalah 12.01020 dan maksimumnya 13.48781 dengan standar deviasi 0.444983 sedangkan rata-ratanya adalah sebesar 12.29463.

#### **b. Kolerasi (R)**

Dari hasil regresi diperoleh nilai R sebesar 0,79051, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel Jumlah Tenaga Kerja (JTK), Produk Domestik Bruto (PDB\_PK), Konsumis Energi (KET) terhadap variabel Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) menggambarkan hubungan yang sangat erat.

#### **c. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R-squared) menunjukkan besarnya kontribusi atau proporsi persentase variabel bebas yaitu variabel Jumlah Tenaga Kerja (JTK) Produk Domestik Bruto (PDB\_PK), Konsumis Energi (KET) dalam menjelaskan variabel terikat Produktivitas Tenaga Kerja (PTK). Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai R-squared sebesar 0.624908, artinya kontribusinya sebesar 62,49% . Sedangkan sisanya 37,51 % dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model estimasi ini atau berada pada disturbance error term.

## **2) Interpretasi Hasil**

Dari hasil regresi diatas maka model ekonometrikanya yaitu:

$$PTK_t = \beta_0 + \beta_1 JTK_t + \beta_2 PDB\_PK_t + \beta_3 KE_t + \varepsilon_t$$

Interpretasi hasil model sebagai berikut:

$$PTK_t = 41.87388 + (-0.471144) JTK_t + 3.95E-07 PDB\_PK_t + (-0.073574) KE + \varepsilon_t$$

Koefisien  $\beta_0 = 41.87388$ , artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Jumlah Tenaga Kerja (JTK), Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB\_PK), Konsumsi Energi (KE) kita abaikan maka diperkirakan tingkat Produktivitas Tenaga Kerja bertambah sebesar 41,87 %, dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai propabilitasnya sebesar 0.0796 ( $\alpha < 0,10$ ) yang berarti signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa benar jika prediksi tingkat Produktivitas Tenaga Kerja akan bertambah sebesar 41,87 % jika mengabaikan variabel bebas diatas.

Koefisien  $\beta_1 = -0.471144$ , artinya jika Jumlah Tenaga Kerja (JTK) kita gunakan maka diperkirakan tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ( PTK) akan menurun sebesar 0,47%. Dan jika kita lihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0216 ( $\alpha < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi.

Koefisien  $\beta_2 = 3.95E-07$ , artinya jika Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB\_PK) kita gunakan maka diperkirakan tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) akan meningkat sebesar 1,46%. Dan jika kita lihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0005 ( $\alpha < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PTK).

Koefisien  $\beta_3 = -0.073574$ , artinya jika Konsumsi Energi (KE) kita gunakan maka diperkirakan Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) akan meningkat sebesar

07,3 %. Dan jika kita lihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.09545 ( $\alpha < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan suku bunga kebijakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi.

### 3) Uji Statistik

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Rumus t hitung sebagai berikut:

$$t_h = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Dimana:

$\beta_i$  = Koefisien regresi variabel

$Se \beta_i$  = Standar eror dari masing-masing koefisien

Jika di masukkan nilai setiap koefisien ke dalam rumus tersebut maka menjadi sebagai berikut:

a. Jumlah Tenaga Kerja (JTK)

$$t_h = \frac{-0.471144}{0.152843} = -3.082530$$

b. Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB\_PK)

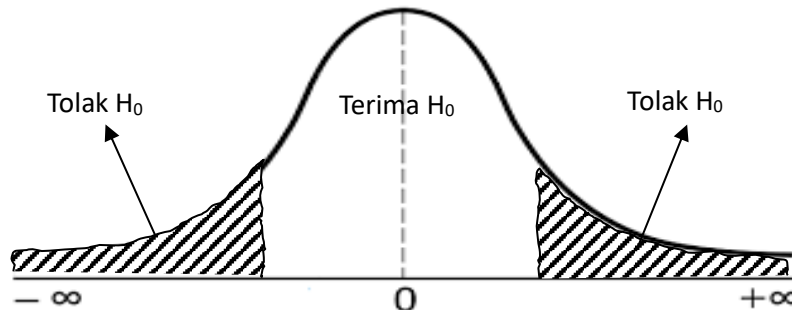
$$t_h = \frac{3.95E-07}{1.49E-07} = 2.650668$$

c. Konsumis Energi (KE)

$$t_h = \frac{-0.073574}{1.238068} = -0.059427$$

Uji-t statistik dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual atau masing-masing dalam menjelaskan variabel terikat. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai tabel dengan cara mencari  $df = (n-k) = 10 - 4 = 6$  dengan ( $\alpha = 10\%$ ) maka nilai tabel sebesar  $\pm 1,94318$ .

Terima  $H_0$  jika  $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$  atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



### Kesimpulan

- t hitung Jumlah Tenaga Kerja (PJK) (-0.471144) berada di luar  $\pm t$  tabel maka tolak  $H_0$  artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja. Namun dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.0216 atau berada pada alpha ( $\alpha = 5\%$ ).
- t hitung Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB\_PK) berada di dalam  $\pm t$  tabel maka terima  $H_0$  artinya ada hubungan yang signifikan antara Produk Domestik Bruto Perkapita terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada alpha ( $\alpha = 5\%$ ).
- t hitung Konsumsi Energi (KE) berada di luar  $\pm t$  tabel maka tolak  $H_0$  artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara terhadap Produktivitas Tenaga Kerja. Namun dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.9545 atau pada alpha ( $\alpha = 10\%$ ).

### b. Uji Simultan (Uji F)

Dimana rumus mencari F hitung adalah:

$$F = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang diobservasi

F hitung adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{0.624908 / 4 - 1}{(1 - 0.624908) / (10 - 4)} = 3.332026$$

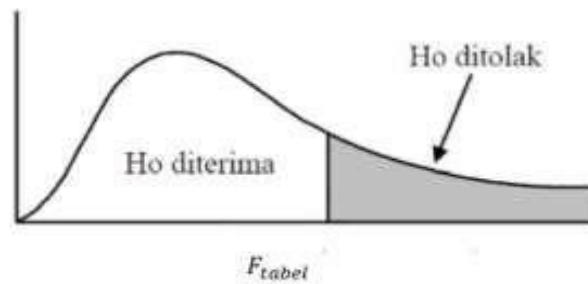
Uji Simultan (Uji-F) bertujuan untuk pengujian signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dari hasil regresi didapati variabel Jumlah Tenaga Kerja (JTK), Prdouk Domestik Bruto (PDB\_PK), Konsumsi Energi (KE) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.097745 dan nilai F statistic sebesar 3.332026.

Nilai F hitung akan dibandingkan dengan F tabel = F ( $\alpha$ , n - k - 1) dengan derajat kesalahan  $\alpha = 10\%$ , maka F tabel = (10% ; 10-4-1) = (0.1 ; 5) dengan demikian nilai F tabel adalah 5,05.

Kriteria uji

Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$ . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:





Kesimpulan yaitu  $F_{hitung} < F_{tabel}$  berarti TERIMA  $H_0$ . jika dilihat dari olahan Eviews, nilai probabilitasnya 0.097745 atau dibawah 10% yang berarti signifikan. Sehingga ada hubungan secara serentak antara Jumlah Tenaga Kerja (JTK), Produk Domestik Bruto (PDB\_PK), dan Konsumsi Energi (KE) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (PTK).

#### 4) Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors  
Date: 08/28/24 Time: 18:23  
Sample: 2014 2023  
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	394.6779	1571.584	NA
JTK	0.023361	1596.562	8.964431
PDB_PK	2.22E-14	293.4300	9.118820
KET	1.532813	923.6902	1.087711

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Salah satu cara untuk melihat adanya atau tidak multikolinearitas pada suatu model regresi ialah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan terbebas dari masalah multikolinearitas jika ( $VIF < 10$ ). Dari hasil uji diatas menunjukkan nilai Centered VIF dari semua variabel bebas berada

dibawah 10, maka artinya bahwa dalam hasil regresi diatas tidak terjadi masalah multikolinieritas.

### b. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	3.160547	Prob. F(3,6)	0.1071
Obs*R-squared	6.124442	Prob. Chi-Square(3)	0.1057
Scaled explained SS	1.380189	Prob. Chi-Square(3)	0.7102

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square (3) pada Obs\*R-squared yaitu sebesar 0.1057. Oleh karena p value  $0,1057 > 0,10$  maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### c. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.9 Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.528883	Prob. F(2,4)	0.6255
Obs*R-squared	2.091370	Prob. Chi-Square(2)	0.3515

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square (2) pada Obs\*R-squared yaitu sebesar 0,3515. Oleh karena p value  $0,3515 < 0,05$  maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi. Selain itu pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson

sebesar 2.553935, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi.

#### 4.4 Pembahasan Hasil Model Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (PTK) di Indonesia pada periode 2014-2023 menunjukkan hasil yang bervariasi:

##### 1. Variabel Jumlah Tenaga Kerja (JTK):

- Koefisien regresi sebesar (-0.471144) menunjukkan hubungan negatif. Artinya, peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1 unit akan mengurangi produktivitas tenaga kerja sebesar 0.47%. Nilai probabilitasnya sebesar (0.0216) menunjukkan bahwa JTK berpengaruh signifikan terhadap PTK pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha < 0,05$ ).

##### 2. Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB\_PK):

- Koefisien regresi sebesar (3.95E-07) menunjukkan hubungan positif. Peningkatan PDB per kapita sebesar satu satuan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebesar 0.0000395%. Dengan nilai probabilitas (0.0380), PDB per kapita berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha < 0,05$ ).

##### 3. Konsumsi Energi (KE):

- Koefisien regresi -0.073574 menunjukkan hubungan negatif. Artinya, peningkatan konsumsi energi tidak berpengaruh signifikan terhadap PTK, dengan probabilitas sebesar 0.9545, jauh di atas 5%, sehingga KE tidak berpengaruh signifikan.

#### 4.5 Pembahasan Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 menampilkan ringkasan dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti mengenai pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, keberhasilan usaha, emisi CO<sub>2</sub>, dan implementasi green economy. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, beberapa temuan signifikan diperoleh, seperti:

1. Widyawati R.F (2021) menemukan bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 18 negara Uni Eropa selama periode 2014-2019.
2. Dina Sofia Aprilia dan Inaya Sari Melati menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berkontribusi terhadap keberhasilan usaha industri batik di Pekalongan.
3. Fauzi R (2017) mengungkapkan bahwa konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi emisi CO<sub>2</sub> di enam negara ASEAN.
4. Bakhri M. S (2018) menyatakan bahwa konsumsi energi dan globalisasi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan emisi CO<sub>2</sub> di ASEAN.
5. Masykur M. (2023) menunjukkan bahwa industrialisasi dan urbanisasi mempengaruhi emisi karbon CO<sub>2</sub> di negara-negara berkembang.
6. Theresia (2018) menganalisis penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) pada beberapa perusahaan di Indonesia, dengan hasil bahwa pengungkapan CSR sudah memenuhi kriteria SDGs.
7. Pujiati D. (2022) melakukan penelitian kualitatif terkait penerapan green economy di sektor agrowisata, yang berdampak pada peningkatan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Bojonegoro.

Penelitian-penelitian ini memberikan berbagai perspektif terkait hubungan antara variabel ekonomi, tenaga kerja, globalisasi, dan lingkungan, yang semuanya memiliki relevansi dalam kebijakan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan usaha di berbagai sektor.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Hasil Analisis Deskriptif Indonesia berhasil menurunkan intensitas emisi (2014-2023) dari 5,1 menjadi 4,0, menunjukkan peningkatan efisiensi energi dan komitmen terhadap energi bersih. Intensitas energi final (2014-2023) turun dari 0,43 menjadi 0,34, menandakan efisiensi energi yang lebih baik, meskipun ada dampak pandemi. PNB per kapita (2014-2023) meningkat dari 3600 USD ke 4870 USD, didorong oleh pemulihan ekonomi dan pertumbuhan sektor industri serta jasa. Produktivitas pertanian (2014-2023) mengalami fluktuasi, dengan peningkatan tajam pada 2020 diikuti stabilisasi, menunjukkan adaptasi sektor ini. Produktivitas sektor industri (2014-2023) secara fluktuatif, dengan penurunan selama pandemi dan pemulihan pada 2022, namun kembali menurun pada 2023. Produktivitas sektor jasa (2014-2023) meningkat tajam hingga 2022, dengan stabilisasi pada 2023, menunjukkan adaptasi terhadap digitalisasi dan pandemi. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun menghadapi tantangan dari pandemi dan perubahan global.
2. Hasil Estimasi model Ekonometrika terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja hasilnya positif sesuai hipotesa penelitian dimana variabel jumlah tenaga kerja, produk domestik bruto perkapita dan konsumsi energi secara signifikan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja.

## 5.2 Saran

4. Mengingat keberhasilan penurunan intensitas emisi dan intensitas energi final, disarankan agar pemerintah dan sektor swasta terus meningkatkan investasi pada teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi. Hal ini akan membantu mempertahankan dan mempercepat tren positif dalam pengurangan emisi gas rumah kaca serta peningkatan efisiensi energi.
5. Fluktuasi produktivitas pertanian menunjukkan perlunya diversifikasi dan penguatan sektor ini, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca dan infrastruktur. Investasi dalam teknologi pertanian modern dan peningkatan infrastruktur pedesaan dapat membantu meningkatkan stabilitas dan efisiensi sektor pertanian.
6. Mengingat fluktuasi produktivitas di sektor industri, disarankan untuk meningkatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan memperkuat kebijakan yang mendukung inovasi. Penguatan program pelatihan tenaga kerja dan adopsi teknologi industri 4.0 akan membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor ini.
7. Sektor jasa menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan, terutama setelah pandemi. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung transformasi digital dan pengembangan sektor jasa melalui kebijakan yang mendorong inovasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbouZahr, C. (2009). Millennium development goals. *Pharma Times*, 41(6), 15–17.  
<https://doi.org/10.18356/1c380eba-en-fr>
- Armstrong, H. E. (1931). The Paris Observatory. *Nature*, 127(3207), 600–601.  
<https://doi.org/10.1038/127600a0>
- Aspiansyah. (2019). Model Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Peranan Ketergantungan Spasial. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 62–83.  
<https://doi.org/10.21002/jepi.2019.04>
- Bonannella. (2024). *Emisi Gas Rumah Kaca: Definisi, Penyebab, dan Cara Mengatasinyale*.
- Burchill, & Linklater, &. (2018). Peran Uni Eropa Dalam Penerapan Ekonomi Hijau Studi Kesepakatan Paris Tahun 2015-2018. *Jurnal Hubungan Internasional*, 307–326.  
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Sovereign/article/view/3025%0Ahttps://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Sovereign/article/download/3025/10001360>
- Climate Transparency. (2019). Brown to Green. ... . *Towards a Net-Zero Emissions Economy*. *Climate ...*, 1, 105–112. <http://www.berlin-ec.com/salzburg2017/files/Leipold.pdf>
- Djihadul Mubarak. (2023). Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Bina Ummat*, 6(2), 31–52.
- Juhro, S. M. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Tantangan dan Strategi Kebijakan (Sustainable Economic Growth: Challenges and Policy Strategies). *SSRN Electronic Journal*, January 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2945267>
- Khairina. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Sustainable Development Goals: Environmentally Friendly Policies to Maintain Environmental Resilience in Bantu. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155.
- Lamdik. (2023). *Analisis Ekonomi Hijau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan*. 4(1), 88–100.



- Mankiw. (2012). Analisis Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(April), 41–54.
- Sari. (2021). Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 185–203. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.12>
- Sihombing, L. (2013). PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs). *Politica*, 4(Mei), 129–156.
- Suryanto. (2009). Mampukah Pdb Hijau Mengakomodasi Degradasi Lingkungan Dan Kesejahteraan Masyarakat? *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(1), 99–109.
- UNDP. (2015). *Indicators and data mapping to measure Sustainable Development Goals (SDGs) targets*. 1–127.
- Admin. (2013). DARI MDGs KE SDGs Oleh: Muhadjir Darwin. Retrieved from <https://cpps.ugm.ac.id/dari-mdgs-ke-sdgs-oleh-muhadjir-darwin/>
- Sustainable Development Goals. (n.d.). Retrieved from <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- Pencapaian SDGs Indonesia Masih Kalah dari Malaysia pada 2022: Databoks. (n.d.). Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/pencapaian-sdgs-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia-pada-2022>
- (N.d.). Retrieved from [https://www.wisnuwardhana.ac.id/wp-content/uploads/2024/03/Book-Chapter-FULL\\_ASEAN\\_.pdf](https://www.wisnuwardhana.ac.id/wp-content/uploads/2024/03/Book-Chapter-FULL_ASEAN_.pdf)
- Admin. (2013). DARI MDGs KE SDGs Oleh: Muhadjir Darwin. Retrieved from <https://cpps.ugm.ac.id/dari-mdgs-ke-sdgs-oleh-muhadjir-darwin/>
- Indonesia - PDB per kapita 1960-2023 Data: 2024-2026 Perkiraan. (n.d.). Retrieved from <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita>

## LAMPIRAN

a. Data Mentah sebelum diregresi ( diolah )

Tahun	PTK	JTK	PDB_PK	KE	LU
2014	1,50	118	41800000	13,49	1550000
2015	4,70	119	45140000	12,20	1640000
2016	1,85	121	47960000	12,16	1597000
2017	2,80	125	51890000	12,08	1650000
2018	2,65	127	56000000	12,06	1575000
2019	2,94	129	59100000	12,01	1757169
2020	-3,54	138	56900000	12,04	1535074
2021	1,65	140	62200000	12,07	1629040
2022	2,00	144	71000000	12,40	1842588
2023	1,63	145	75000000	12,44	1930000

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Akbar Syahputra  
Npm : 2005180041  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pematang Pelintahan, 10 November 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

### 2. Data Pendidikan Formal

Tahun 2008-2014 : SD Al - Washliyah 47  
Tahun 2014-2017 : SMPN 1 Sei Rampah  
Tahun 2017-2020 : SMKS Teladan Sei Rampah  
Tahun 2020-2024 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 3862/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/10/12/2023

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 10/12/2023

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Akbar Sayhputra  
NPM : 2005180041  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset dan Eekonomi Bisnis

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Efektivitas Model Bisnis Bank Sampah,  
2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat  
3. Kontribusi Bank Sampah terhadap Green Economy  
4. Peran Pemerintah dan Keterlibatan Pihak Pribadi  
5. Dampak Lingkungan dan Manajemen Limbah 6. Keuangan dan Keberlanjutan Bank Sampah
- Rencana Judul : 1. Pemberdayaan Bank Sampah Sebagai Agen Transformasi Ekonomi Hijau Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan  
2. Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Perbatasan  
3. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Investasi Swasta Di Sektor Infrastruktur
- Objek/Lokasi Penelitian : Kabupaten Simalungun

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Akbar Sayhputra)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 3862/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/10/12/2023

Nama Mahasiswa : Akbar Sayhputra  
NPM : 2005180041  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Riset dan Ekonomi Bisnis  
Tanggal Pengajuan Judul : 10/12/2023  
Nama Dosen Pembimbing\*) : Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si  
Judul Disetujui\*\*) : ANALISIS PERKEMBANGAN KONSEP Green Economy di Indonesia pasca penerapan sustainable Development Goals (Sdgs).

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si)

**Keterangan:**

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembarannya ke-1 ini pada form online "Upload Pengisian Judul Skripsi"





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertaikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2025 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2024**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

**Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**Pada Tanggal : 20 Mei 2023**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

**Nama : Akbar Syahputra**

**N P M : 2005180041**

**Semester : VIII (Delapan)**

**Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**Judul Proposal / Skripsi : Analisis Perkembangan Konsep Green Economy dalam produktivitas tenaga kerja di Indonesia pasca penerapan sustainable Development Goals ( SDGS)**

**Dosen Pembimbing : Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkanya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 08 Agustus 2025**
4. Revisi Judul.....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 03 Shafar 1446 H

08 Agustus 2024



Dekan

**Dr.H. JANURI, SE.,MM.,M.Si., CMA**

**N I D N : 0 1 0 9 0 8 6 5 0 2**

**Tembusan :**

1. Peringgal.



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : AKBAR SYAHPUTRA  
N.P.M : 2005180041  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS  
Judul Proposal : ANALISIS PERKEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY* DI INDONESIA PASCA PENERAPAN *SUISTANABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16-05-2024	Bab I : Perbaikan latar belakang, Jabaran data dan Permasalahan.		
27-05-2024	Bab I : Perbaikan latar belakang dengan memasukkan beberapa data Rumus masalah, Tujuan Penelitian		
04-06-2024	Bab I : Perbaikan latar belakang Penjabaran dan urutan latar belakang dan koreksi data		
20-06-2024	BAB I . Perbaikan latar belakang dengan koreksi data BAB III perbaikan definisi operasional dan urutan metode Penelitian.		
26-06-2024	BAB I . Perbaikan latar belakang koreksi data BAB II Perbaikan dan Penambahan teori BAB III Perbaikan metode Penelitian		
01-07-2024	ACC Proposal / ujian skripsi .		

Medan, Juni 2024

Diketahui/Disetujui

Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si





**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Pada hari ini Kamis, 18 Juli 2024 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

**N a m a** : Akbar Syahputra  
**N .P.M.** : 2005180041  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Pematang pelintahan, 10 November 2001  
**Alamat Rumah** : Desa pematang pelintahan dusun IV kec, Sei Rampah  
**JudulProposal** : Analisis Perkembangan Konsep Green Economy Di Indonesia Pasca Penerapan Sustainable Development Goals ( SDGS )


Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Analisis perkembangan konsep green economy dalam produktivitas tenaga kerja di Indonesia pasca penerapan Sustainable Development Goals (SDGs).
Bab I	Perbaiki variabel bebas.
Bab II	Perbaiki teori produktivitas.
Bab III	Perambahkan persamaan ekonometrika.
Lainnya	.....
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Kamis, 18 Juli 2024

**TIM SEMINAR**

Ketua  
  
Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.

Pembimbing  
  
Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si

Sekretaris  
  
Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.  
Pemanding

  
Dr. Sylvia Vianty Ranita S.E. M.Si.,



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 18 Juli 2024* menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Akbar Syahputra  
NPM : 2005180041  
Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Pelintahan, 10 November 2001  
Alamat Rumah : Desa Pematang Pelintahan Dusun IV Kec. Sei Rampah  
Judul Proposal : Analisis Perkembangan Konsep Green Economy dalam Produktifitas Tenaga Kerja di Indonesia Pasca Penerapan Sustainable Development Goals (SDGS)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing:  
Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si.

Medan, Kamis 18 Juli 2024

TIM SEMINAR

Ketua



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Sekretaris



Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Pembimbing



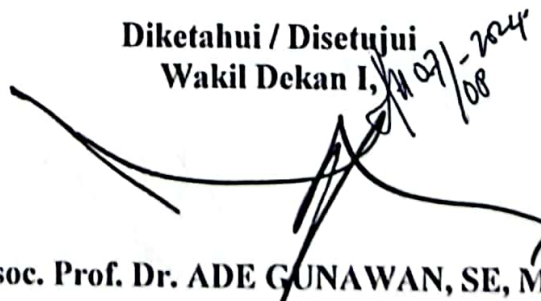
Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Pemanding



Dr. SYLVIA VIANTYRANITA, S.E., M.Si.

Diketahui / Disetujui  
Wakil Dekan I,



07/08/2024

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si